



**PERANAN PERS TIONGHOA PERANAKAN  
DI SURABAYA DALAM PERGERAKAN NASIONAL**

**1902 – 1942**

**SKRIPSI**

Oleh

**Saripa Haini Jumita Asmadi  
NIM. 090110301002**

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER**

**2015**



**PERANAN PERS TIONGHOA PERANAKAN  
DI SURABAYA DALAM PERGERAKAN NASIONAL  
1902 – 1942**

**SKRIPSI**

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan program Studi pada Jurusan Sejarah (S1) dan mencapai gelar Sarjana Sastra.

Oleh

**Saripa Haini Jumita Asmadi**  
NIM. 090110301002

**JURUSAN SEJARAH  
FAKULTAS SASTRA UNIVERSITAS JEMBER  
2015**

## PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Saripa Haini Jumita Asmadi

NIM : 090110301002

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul “Peranan Pers Tionghoa Peranakan di Surabaya dalam Pergerakan Nasional 1902-1942” adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sumbernya, belum pernah diajukan pada institusi mana pun dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik apabila ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 12 Februari 2015

Yang menyatakan,

Saripa Haini Jumita Asmadi  
NIM. 090110301002

## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui untuk diujikan oleh:

Dosen Pembimbing

Drs. Bambang Samsu Badriyanto M.Si  
NIP. 195806141987101001

**PENGESAHAN**

Diterima dan disahkan oleh

Panitia penguji Skripsi Program Strata 1 Jurusan Sejarah Fakultas Sastra  
Universitas Jember

Pada hari :

Tanggal :

**Ketua,**

Drs. Bambang Samsu Badriyanto, M.Si

NIP. 195806141987101001

**Anggota 1,**

**Anggota 2,**

Dr. Retno Winarni, M.Hum

NIP.195906281987022001

Drs. IG. Krisnadi, M.Hum

NIP. 196202281989021001

**Mengesahkan**

**Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,**

Dr. Hairus Salikin, M.Ed

NIP. 196310151989021001

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kepada Allah SWT atas segala rizki dan hidayahnya yang telah diberikan, serta kepada junjunganku Nabi Muhammad SAW.
2. Keluargaku, Ayahanda Asmadi dan Ibunda tercinta Mariyam yang tak henti-hentinya memberikan limpahan do'a, dukungan semangat cinta kasih yang senantiasa mengiringi setiap langkah demi keberhasilan, serta menyediakan segala kemudahan. Semoga Allah SWT memberikan hidayah-Nya kepada penulis agar mampu membalas kebaikannya.
3. Adekku tercinta Irma Yunita Asmadi dan Maria Aesara Asmadi, yang telah memberikan dorongan dan semangat selama ini.
4. Keluarga Besar di Gresik, Bapak Zainul Arif dan Ibu Sri Kadarwati terima kasih atas tumpangan, semangat dan nasehatnya.
5. Staf pengajar semua dosen jurusan Sejarah Fakultas Sastra Universitas Jember yang telah memberikan ilmu dan bimbingan kepada saya terutama Bapak Drs. Bambang Samsu Badriyanto, M.Si., selaku dosen pembimbing, Ibu Dr. Retno Winarni, M.Hum., selaku dosen penguji I, dan Bapak Drs. IG. Krisnadi, M.Hum., selaku penguji II.
6. Kepada Bapak dan Ibu Guru yang senantiasa mengajariku dengan ketelatenan dan kasih sayang dari mulai TK (Taman Kanak-kanak), SD (Sekolah Dasar), SMP (Sekolah Menengah Pertama), SMA (Sekolah Menengah Atas) sampai Perguruan Tinggi. Engkau akan kukenang sepanjang hidupku.
7. Almamater Fakultas Sastra Universitas Jember tercinta,
8. Kekasihku Arif Rachmad Ramadhana yang telah memberikanku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.

9. Seluruh teman-temanku baik teman terbaikku maupun angkatan 2009 (Sejarah) yang telah memberikan kontribusi, dukungan, ide yang inspiratif, dan kritikan yang konstruktif. Trimakasih atas semua kontribusi yang kalian berikan.



**MOTTO**

*Orang Jawa Membajak dan Menanam  
Orang Cina Memanen  
dan Orang Eropa membawanya pergi.*

(P.H. Fronberg)

*Pers sebagai bagian dari budaya-cetak memberikan kemungkinan terjadinya  
komunikasi antara sang pemberi dan penerima pesan  
yang memupuk kesadaran untuk menumbuhkan  
komunitas yang dibayangkan*

(Benedict Anderson)

*Tak wajarlah bagi orang yang bodoh, berdiam diri di atas kebodohnya,  
dan tak wajarlah bagi orang yang berilmu berdiam diri di atas ilmunya*  
(H.R. Ath-Thabrani dan Abu-Na'im)



## PRAKATA

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala rahmat, nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Sholawat serta salam semoga Allah SWT limpahkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai sumber inspirasi dan membuat penulis lebih kuat dan menatap setiap hal yang penuh optimis dan berfikir positif, dalam menunjang kemampuan penulis dalam menjalani persaingan globalisasi kerja nantinya.

Skripsi ini mengkaji tentang “Peranan Pers Tionghoa Peranakan di Surabaya dalam Pergerakan Nasional 1902-1942”. Penyusunan skripsi ini digunakan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Strata satu (SI) pada jurusan Sejarah Fakultas sastra Universitas Jember.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua yang telah memberikan bimbingan, dukungan, dan arahan kepada penulis selama penyusunan laporan skripsi ini, khususnya kepada:

1. Dr. Hairus Salikin, M.Ed., Dekan Fakultas Sastra Universitas Jember,
2. Drs. Nawiyanto, M A, Ph D., Ketua Jurusan Sejarah,
3. Drs. Bambang Samsu Badriyanto, M.Si., Dosen pembimbing yang dengan sepenuh hati telah mengarahkan secara cermat dan meluangkan waktu, pikiran serta perhatian dalam penulisan skripsi ini,
4. Dr. Retno Winarni, M.Hum., selaku komisi bimbingan yang telah memperjuangkan skripsi penulis di ruang rapat,
5. Ayahanda tercinta Asmadi dan Ibunda tercinta Mariyam atas segala doa, dukungan semangat dan materil. Saudaraku tersayang Irma Yunita Asmadi dan Maria Aesara Asmadi yang tak henti-hentinya memberi semangat, serta saudara-saudaraku semua yang telah memberikan doa dan motivasi kepada saya,
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas sastra khususnya Jurusan Ilmu Sejarah, yang telah memberikan bimbingan dan ilmu pengetahuan kepada

penulis selama menempuh kuliah,

7. Seluruh Keluarga Besar BKMS, Terima kasih atas kebersamaanya,
8. Seluruh karyawan dan staf Fakultas Sastra Universitas Jember, terima kasih atas segala bantuan, informasi dan pelayanan selama ini,
9. Opa Hwie, Mas Sinyo, Mas Didin , dan segenap karyawan Perpustakaan Medayu Agung Surabaya atas bantuan yang diberikan sehingga penulis dapat memperoleh referensi yang diperlukan,
10. Keluarga Besar di Gresik, Bapak Zainul Arif dan ibu Sri Kadarwati trimakasih atas tumpangan, semangat dan nasehatnya.
11. Kekasihku Arif Rachmad Ramadhana yang telah memberikanku semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Seluruh sahabat-sahabatku Kos 71 A Bad, Dian, Ika, Nova dan Fitri (piik) yang telah memberi canda, tawa, semangat, dan marah. Semoga kita bisa sukses.
13. Rekan-rekan mahasiswa Sejarah angkatan 2009. Agus, Daut, subur, Eko, Nailul, Mega, Tika, Cici, Zaenal, Afif, Dea, Firman, Dicki, Ulil, Impron, Imam, dan Victor yang mewarnai hidupku saat kuliah, memberikan bantuan, semangat, motivasi beserta kasih sayangnya dalam menyelesaikan skripsi ini. Ingat! apa yang kita lakukan saat ini pasti suatu saat akan kita saksikan sebagai sejarah. Semoga semuanya sukses dunia dan diakhirat. Amin,

Semoga atas bantuan, pengarahan, dukungan dan bimbingannya, mudah mudahan mendapatkan balasan yang sesuai dari Allah SWT. Untuk kesempurnaan karya ilmiah ini penulis berharap dan membuka ruang seluas-luasnya terhadap kritik dan saran dari semua pihak, karena penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat.

Jember, 12 Februari 2015

Saripa Haini Jumita Asmadi

## ABSTRACT

The background of this research is a disappointment of Tionghoa Peranakan who was oppressed by the apartheid system of Hindia Belanda Government. The goal of this research is to reveal the background of why the awareness of Tionghoa Peranakan identity occurred, how the press of Tionghoa Peranakan kept its existence, and the idea of nationality which occurred in newspaper and the impact of its occurrence to the national indigene movements. This research uses historical method to reveal the problems of the study of the research. The end of 19th century became a start of Pan-Tionghoa movement that spread the idea of nationalism in Java. This movement got strong support from *Tionghoa Peranakan* (i.e. The Descendants of Chinese who were settled for a long period in Indonesia) because of their disappointment of apartheid system in this long period that was applied by *Hindia Belanda Government*. The awareness of identity of *Tionghoa Peranakan* was realized in Tiong Hoa Hwe koan (THHK) that was formed on March 17, 1900 in Batavia. It was also followed by some ideas of nationalism that got its places in press of *Tionghoa Peranakan* which developed in the beginning of 20th century. Press of *Tionghoa Peranakan* became a place for nationalists to spread their ideas of nationalism, so *Tionghoa Peranakan* became more aware about their identity. The impact of the existence of ideas of nationalism that was spread by press of *Tionghoa Peranakan* brought up some political organizations and the social education associations for indigenes or the natives of Indonesia. The aim of the organizations was to improve the prosperity of the people.

**Key words:** Tionghoa peranakan, the awareness of identity, press Tionghoa Peranakan, Hindia Belanda.

## ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kekecewaan Kaum Tionghoa peranakan yang terhimpit oleh sistem *apartheid* yang dijalankan pemerintah Kolonial Hindia Belanda di Surabaya. Tujuan penelitian ini adalah mengungkapkan apa yang menjadi latar belakang munculnya kesadaran identitas kaum Tionghoa Peranakan, bagaimana kehidupan pers Tionghoa peranakan, dan gagasan kebangsaan yang muncul dalam surat kabar, serta dampaknya bagi gerakan nasionalisme kaum pribumi. Penelitian ini menggunakan metode sejarah untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan yang dijadikan kajian. Akhir abad ke-19 menjadi awal bagi gerakan Pan-Tionghoa yang menyebarkan ide-ide nasionalisme di Pulau Jawa. Gerakan ini mendapat dukungan kuat dari kaum Tionghoa peranakan yang kecewa akibat sistem *apartheid* yang selama ini diterapkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kesadaran identitas kaum Tionghoa peranakan terwujud dalam Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) yang didirikan pada 17 Maret 1900 di Batavia. Bersamaan dengan itu, ide-ide nasionalisme mendapatkan wadahnya dalam persuratkabaran Tionghoa peranakan yang mulai berkembang pada awal abad ke-20. Pers Tionghoa peranakan menjadi wahana bagi kaum nasionalis dalam menyebarkan ide-ide nasionalisme, sehingga masyarakat Tionghoa peranakan menjadi semakin tersadarkan akan identitas mereka. Dampak adanya ide-ide nasionalis yang disebarkan pers Tionghoa peranakan muncul organisasi-organisasi politik dan perkumpulan-perkumpulan sosial pendidikan di kalangan pribumi yang bertujuan untuk memperbaiki nasib rakyat.

**Kata Kunci:** Tionghoa Peranakan, Kesadaran Identitas, Pers Tionghoa peranakan, Hindia Belanda

## RINGKASAN

Akhir abad ke-19 hingga pertengahan abad ke-20, dinamika pers Tionghoa peranakan di Surabaya semakin meningkat. Tidak sedikit orang Tionghoa peranakan yang terlibat dalam kegiatan tersebut. Seiring dengan perubahan dalam masyarakat sejak bangkitnya kesadaran identitas kaum Tionghoa peranakan, maka pers Tionghoa peranakan sebagai medium komunikasi semakin menjerumuskan kaum Tionghoa peranakan pada politik praktis. Berawal dari kesadaran akan identitasnya sebagai kaum perantauan di luar tanah kelahirannya dan lahirnya kesatuan dalam wadah Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) di bawah pimpinan Phoa Keng Hek yang berdiri pada tanggal 17 Maret 1900 pers Tionghoa peranakan semakin terseret dalam arus politik, sehingga kaum Tionghoa peranakan terpecah menjadi tiga kelompok yang masing-masing memiliki orientasi dalam pandangan politiknya.

Aliran politik yang berorientasi ke Tiongkok ini menganggap bahwa golongan Tionghoa peranakan harus tetap menjadi orang asing dan menganggap bahwa Tiongkok adalah tanah airnya. Aliran ini mulai muncul sejak terbitnya surat kabar *Sin Po* pada 1910 di Batavia. *Sin Po* mulai memiliki pengaruh yang luas pada 1920-an ketika surat kabar ini melakukan kampanye menentang WNO. Oleh sebab itu, aliran yang berorientasi politik ke Tiongkok terkenal dengan sebutan aliran *Sin Po*. Di Surabaya, surat kabar yang sejalan dengan *Sin Po* adalah *Pewarta Soerabaia*. Surat kabar ini diterbitkan oleh percetakan Kwa Hok Ing pada 1902 dengan nomor-nomor percobaan. *Pewarta Soerabaia* mulai memperlihatkan kecenderungan politiknya pada 1917. Surat kabar yang berorientasi politik ke Tiongkok lainnya adalah *Sin Jit Po* yang terbit pertama kali pada 1923 di Surabaya. Surat kabar ini dipimpin oleh T.H.H Phoa sebagai *hoofdredacteur* dengan dibantu oleh Oei Kie Hok dan R.M. Bintarti sebagai anggota redaksi. Pada 1925 terbit surat kabar baru yang berorientasi politik ke Tiongkok di Surabaya, yaitu *Soera Publiek*. Pada dasarnya surat kabar ini

merupakan versi baru dari surat kabar tertua di Surabaya, yaitu *Bintang Soerabaia*.

Kampanye menentang WNO yang gencar dilakukan oleh golongan berorientasi politik ke Tiongkok pada 1920-an mengalami kegagalan. Hal ini memberikan kesempatan kepada elit Tionghoa peranakan yang berorientasi ke Hindia Belanda untuk berusaha agar kehadirannya terasa. Berbeda dengan kelompok *Sin Po* yang mengharapkan perlindungan dari negeri Tiongkok dan ingin bekerja di luar lembaga-lembaga kolonial, para bekas pemimpin CHH Nederland tidak melihat Tiongkok sebagai tempat yang tepat untuk meminta perlindungan. Basis utama kekuatan CHH adalah di Semarang. Di kota tersebut banyak terdapat golongan Tionghoa peranakan kaya yang mendirikan perusahaan-perusahaan besar. Di Surabaya, pada periode ini, tidak ditemukan surat kabar yang berorientasi ke Hindia Belanda seperti surat kabar yang terbit di beberapa wilayah lain di Jawa. Di kota ini tidak ditemukan adanya surat kabar berorientasi politik ke Hindia Belanda. Justru pada periode ini, kecaman terhadap aliran pemikiran ini banyak dilakukan oleh surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan di Surabaya. Bahkan perseteruan yang lebih kencang tentang perbedaan orientasi politik terjadi antara golongan yang pro Tiongkok dengan golongan yang mengusung orientasi politik baru, yakni pro pribumi. Surat kabar yang paling keras mengkritik keberadaan CHH adalah *Sin Jit Po*.

Sebelum berdirinya PTI di Surabaya sudah ada dua surat kabar yang mengusung gagasan tentang kewarganegaraan Indonesia. Dua surat kabar itu adalah *Sin Tit Po* dan *Soera Publiek/Swara Publiek*. Liem Koen Hian pernah bekerja sebagai *hoofdredacteur* pada kedua surat kabar itu. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, *Sin Tit Po* adalah kelanjutan dari *Sin Jit Po*. Beberapa orang nasionalis sekuler menyadari pentingnya kedudukan golongan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda dan kemungkinan untuk bekerja sama dengan mereka dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada awal 1928, *Soera Publiek* mengemukakan gagasan Liem Koen Hian tentang “Kewarganegaraan Hindia Belanda” (*Indisch Burgerschap* atau *Indier Burgerschap*) bagi golongan Tionghoa peranakan guna menandingi WNO. Menurut pendapatnya, golongan

Tionghoa peranakan yang memandang Hindia Belanda sebagai tanah air harus diberi status hukum pribumi dan oleh karena itu mereka berhak memiliki tanah. Sebaliknya mereka harus pula mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama seperti orang-orang pribumi.

Ide kesadaran identitas kaum Tionghoa peranakan yang muncul sebagai antitesa terhadap politik *apharteid* Kolonial Hindia Belanda menjadi alat pemersatu kaum Tionghoa peranakan dan berkembang dengan pesat bersamaan dengan keberadaan pers yang menjadi pendukung laju pergerakan nasional di Hindia Belanda. Kehidupan pers Tionghoa peranakan terus berkembang menyuarkan identitas mereka meskipun keberadaannya terus menerus diancam kebijakan pembredalan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Aspek yang paling mudah dipertimbangkan dalam melihat dampak pers Tionghoa peranakan dengan gerakan nasionalisme kaum pribumi adalah aspek politik. Pers Tionghoa peranakan dipergunakan oleh tokoh pergerakan untuk menyebarkan ide-ide perjuangan pergerakannya. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan efektivitas pers Tionghoa peranakan. Pers Tionghoa peranakan dianggap relatif aman karena posisinya yang netral, sedangkan pers pribumi lebih mudah terdeteksi dan akhirnya dibredel dan pemimpin atau penyumbang pemikirannya ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Hubungan antara pers Tionghoa peranakan dengan nasionalisme kaum pribumi dapat dilihat melalui fungsi utama pers, yaitu sebagai media komunikasi massa. Pers Tionghoa peranakan memberikan informasi yang jernih dan opini-opini dari tokoh terkemuka, sehingga pemikirannya dapat tersebar secara luas dan dapat menjadi pegangan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah sosial yang ada. Pers dalam hal ini menjadi barometer perasaan kolektif dan menjadi wakil dari opini publik. Apa yang dirasakan kaum Tionghoa peranakan yang tercermin melalui surat kabar dan terbitan lainnya secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran kaum pribumi akan identitas bangsanya.

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN .....	iii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iv
PERSEMBAHAN .....	v
MOTTO .....	vii
PRAKATA .....	viii
ABSTRACT .....	x
ABSTRAK .....	xi
RINGKASAN .....	xii
DAFTAR ISI .....	xv
DAFTAR TABEL .....	xvii
DAFTAR SINGKATAN .....	xviii
DAFTAR ISTILAH .....	xix
DAFTAR LAMPIRAN .....	xxiii
<b>BAB I. PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>14</b>
<b>1.3 Tujuan dan Manfaat .....</b>	<b>15</b>
<b>1.4 Ruang Lingkup .....</b>	<b>16</b>
<b>1.5 Tinjauan Pustaka .....</b>	<b>17</b>
<b>1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori .....</b>	<b>20</b>



1.7 Metode Penelitian .....	24
1.8 Sistematika Penulisan .....	26
<b>BAB. II DINAMIKA KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA PERANAKAN DI SURABAYA MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA .....</b>	<b>29</b>
2.1 Kondisi Geografis Kota Surabaya Masa Kolonial Hindia Belanda .....	29
2.2 Keberadaan Etnis Tionghoa Peranakan di Surabaya .....	32
2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa Peranakan Masa Kolonial Hindia Belanda .....	41
2.4 Kehidupan Pers di Surabaya Sebelum Munculnya Kesadaran Identitas Tionghoa Peranakan .....	50
<b>BAB III KEHIDUPAN PERS TIONGHOA PERANAKAN DI SURABAYA .....</b>	<b>64</b>
3.1 Munculnya Gerakan Nasionalisme Kaum Tionghoa Peranakan .....	65
3.2 Pers Tionghoa Peranakan Surabaya dari Komersialisasi Menuju Konflik Politik .....	84
3.3 Gagasan Kebangsaan dalam Surat Kabar Tionghoa Peranakan .....	112
3.4 Dampak Pers Tionghoa Peranakan Bagi Gerakan Nasionalisme Pribumi .....	131
<b>BAB IV KESIMPULAN .....</b>	<b>140</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>142</b>
<b>LAMPIRAN .....</b>	<b>151</b>

**DAFTAR TABEL**

- 1. Tabel 2.1: Jumlah Penduduk Kotapraja Surabaya Tahun 1930-1940 .....39**



**DAFTAR SINGKATAN**

CHH	: Chung Hwa Hui adalah organisasi kaum Tionghoa yang mendapat pendidikan barat dan berorientasi ke Belanda
HCS	: Hollandsch Chineesche School
HKBHH	: Hwa Kiaw Bian Hap Hwee
NIVB	: Nederlandsch Indische Voetbal Bond atau Federasi Sepakbola Hindia Belanda
PKI	: Partai Komunis Indonesia
PNI	: Partai Nasionalis Indonesia
PTI	: Partai Tionghoa Indonesia adalah organisasi yang didirikan kaum Tionghoa peranakan dan berorientasi ke Indonesia dan diketuai oleh Liem Koen Hian
SI	: Serikat Islam
THHK	: Tiong Hoa Hwe Koan, organisasi yang didirikan tahun 1901 untuk mewartakan kaum Tionghoa perantauan dan memberikan pendidikan secara teratur bagi anak-anak Tionghoa
WNO	: <i>Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap</i> atau undang-undang kewulanegaraan Belanda

## DAFTAR ISTILAH

Almagatie	: Percampuran Suku Bangsa
Ambtenaar	: Pegawai birokrasi pemerintahan Kolonial Hindia Belanda
Apartheid	: Sistem yang secara tegas membedakan kedudukan setiap kelompok dalam masyarakat berdasarkan ras
Breestraat	: Jl. Slompretan
Chi-nan She	: Klub Pengembara Nanyang
Chinesche Heerenstraat	: Jl. Bongkaran
Chinesche Tempelstraat	: Jl. Gula
Chinesche Voorstraat	: Pecinan Koelon atau Jl. Pahlawan
Comite Indie Weerbar	: Panitia Pertahanan Hindia Belanda
<i>Drukpers Reglement</i>	: Undang-undang tentang peraturan penerbitan barang cetak
Gaya Tropika	: Istilah yang digunakan untuk menggambarkan arti posisi pers sebagai orang yang berseru di tengah padang pasir, iklim yang memanaskan jiwa, dan pertimbangan-pertimbangan persaingan
<i>Great Depretion</i>	: Depresi Ekonomi yang melanda dunia pada 1930-an
Hak Siang Hwee	: Perkumpulan Murid
Hokkian Kong Tik Soe	: Perkumpulan orang-orang Tionghoa dari Hokkian
Hoofdredacteur	: Kepala Dewan Redaksi
<i>Indisch Burgerschap</i>	: Kewarganegaraan Hindia Belanda (Indonesia)

Indonesier	: Sebagai orang Indonesia
<i>Indonesierschap</i>	: Kewarganegaraan Indonesia; pemikiran Liem Koen Hian bahwa semua orang yang menganggap Indonesia sebagai tanah air adalah bangsa Indonesia
Indie Weerbar	: Pertahanan Hindia Belanda
<i>Inlanders</i>	: Inlanders Golongan pribumi; salah satu golongan penduduk berdasarkan pembagian yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda
Ja Hak Hwee	: Perkumpulan pemuda yang mengadakan sekolah malam dan mengajarkan bahasa Tjing Im (Mandarin)
Kapitalisme-Cetak	: Sejak ditemukannya mesin cetak, surat kabar diproduksi secara besar-besaran yang ditujukan untuk komersialisasi
Kiong Hoo Wie Sien Hwee	: Perkumpulan sosial yang memberi bantuan dana kepada anggotanya yang akan melaksanakan upacara pemakaman
Kongkoan	: Dewan Kampung Tionghoa
Lingua Franca	: Bahasa yang digunakan oleh kelompok masyarakat tertentu dalam berkomunikasi sehari-hari
Minoritas	: Golongan kecil atau kelompok kecil penduduk dalam suatu bangsa
Pacht	: Hak pengelolaan gerbang pajak jalan, rumah candu, dan rumah gadai yang diberikan pemerintah Kolonial Hindia Belanda
Pan-Tionghoa	: Gerakan Kesadaran Identitas Kaum Tionghoa
<i>Passenstelsel</i>	: Sistem surat pas jalan yang menjadi kebijakan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dengan mewajibkan golongan

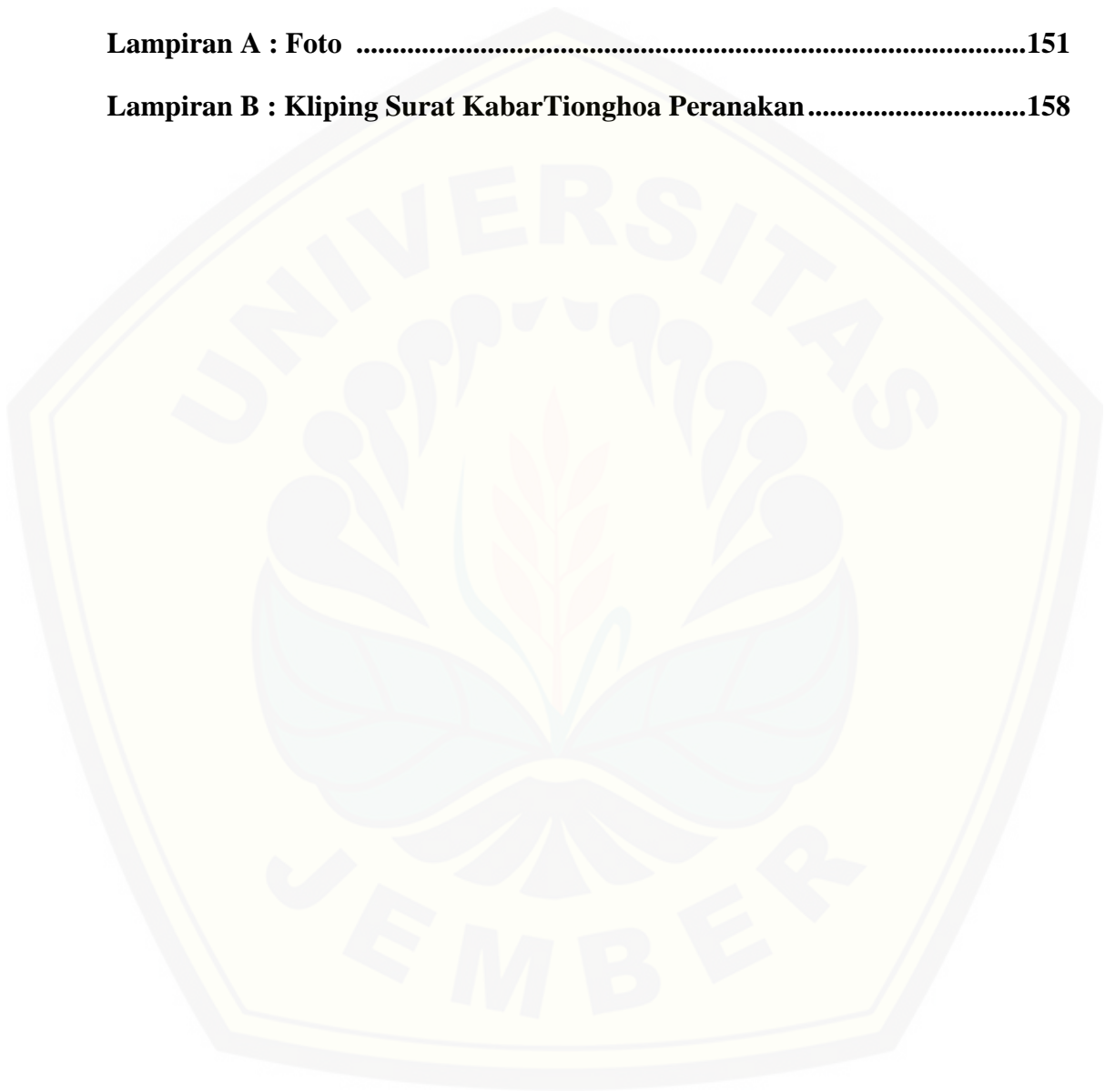
Tionghoa untuk membawa surat pas jalan ketika mengadakan perjalanan keluar dari kampung Pecinan

- Pers : Istilah ini merupakan terjemahan dari bahasa Inggris ‘*press*’ yang dapat mempunyai pengertian luas maupun sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Semua itu lebih dikenal dengan istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, atau jurnalistik pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan pada produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan atau tengah bulanan yang semuanya lebih dikenal sebagai media cetak.
- Persdelict* : Tulisan dalam media massa yang melanggar undang-undang
- Politie Staat : Politik Negara
- Politik Etis : Kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang menekankan pada pembaharuan dalam bidang pendidikan, pengairan, dan transmigrasi
- Raad van Justitie : Hukum Pengadilan Eropa
- Regerings Reglement* : Peraturan Pemerintah Kolonial Belanda
- Resinification* : Penyadaran dan penegasan identitas kaum Tionghoa peranakan sebagai keturunan bangsa Tionghoa
- Siang Hwee : Kamar Dagang Tionghoa adalah sebuah organisasi yang bertujuan untuk melindungi para pedagang Tionghoa dari tekanan pemerintah Kolonial Hindia Belanda

Sin Po	: Organisasi yang didirikan oleh kaum Tionghoa berpendidikan swasta dan beorientasi ke kepada daratan Tiongkok. Nama ini diambil dari nama surat kabar Sin Po
Soe Po Sia	: Taman Bacaan
<i>Staat</i>	: Negara
<i>Thauwcang</i>	: Kunci panjang orang-orang Tionghoa yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah
Tionghoa Peranakan	: Menunjukkan suatu golongan atau orang yang berasal dari keturunan campuran yang biasanya lahir dari ayah Tionghoa dan ibu pribumi
Tionghoa Totok	: Menunjukkan golongan Tionghoa yang dilahirkan di Tiongkok dan dalam orientasinya lebih condong ke daratan Tiongkok
T'ung-meng Hui	: Partai revolusioner dr. Sun Yat Sen
Volksraad	: Dewan rakyat yang dibentuk pemerintah Kolonial Hindia Belanda
<i>Vreemde Osterlingen</i>	: Golongan Timur Asing (Tionghoa, Arab, dan India); salah satu golongan penduduk berdasarkan pembagian yang dibuat oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda
<i>Wijkenstelsel</i>	: Kebijakan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang mengharuskan setiap golongan ras tinggal di pemukiman tersendiri
<i>Wijkmeester</i>	: Kepala Kampung

**DAFTAR LAMPIRAN**

<b>Lampiran A : Foto .....</b>	<b>151</b>
<b>Lampiran B : Kliping Surat KabarTionghoa Peranakan.....</b>	<b>158</b>





## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1. Latar Belakang**

Salah satu kebutuhan manusia yang sangat mendasar baik sebagai individu maupun anggota masyarakat adalah kebutuhan bahasa. Bahasa memang sudah menjadi kebutuhan manusia yang esensial untuk berbagai tujuan. Melalui bahasa manusia dapat mengikuti dan memahami berbagai peristiwa yang terjadi di sekitarnya yang dapat mencerdaskan kehidupan, dan memperluas cakrawala pandangan, sehingga semua itu dapat meningkatkan kedudukan serta peranannya di dalam masyarakat.

Bahasa merupakan alat komunikasi yang berfungsi untuk menyampaikan ide-ide dan gagasan seseorang untuk orang lain. Dengan bahasa manusia dapat menjalin hubungan melalui persamaan persepsi. Melalui pertukaran ide, manusia dapat mengembangkan pengetahuan yang lebih luas. Dalam perkembangan lebih lanjut penyampaian gagasan seseorang dapat disalurkan melalui berbagai media. Salah satu media yang sering dipakai oleh seseorang untuk menyebarkan ide-ide dan gagasannya adalah surat kabar.

Berkaitan dengan hal tersebut, surat kabar merupakan salah satu media yang dapat membantu manusia dalam penyebaran bahasa yang diperlukan. Sebagai salah satu media, surat kabar juga merupakan sumber informasi dan interpretasi yang dengan menggunakan bahasa dapat dimengerti oleh manusia

sehingga mempengaruhi pikiran dan sikap manusia. Di samping itu, surat kabar juga sebagai alat pembentuk, penghimpun dan penyalur pendapat umum.<sup>1</sup>

Sebagai institusi sosial, pers<sup>2</sup> tidak dapat melepaskan diri dari masyarakat, karena ia hidup dan beroperasi di tengah-tengah masyarakat. Pers dan masyarakat merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Sebagai lembaga sosial, ia dipengaruhi dan mempengaruhi lembaga-lembaga sosial lainnya. Demikian juga hubungannya dengan pemerintah, ia tidak dapat melepaskan diri dari lingkup kekuasaan pemerintah yang bersangkutan. Oleh karena itu, sistem sosial dan sistem politik sangat menentukan corak dan sepak terjang serta tingkah laku pers.<sup>3</sup>

Kehadiran pers adalah konsekuensi logis dari penemuan teknologi cetak yang diciptakan oleh Johannes Gutenberg pada abad ke-15 di Eropa.<sup>4</sup> Penulisan naskah yang sebelumnya digandakan secara manual kini bergeser pada reproduksi dengan cara memakai timah-timah baja, yang dapat mengurangi kesalahan manual. Benedict Anderson menengarai bahwa asal mula kesadaran nasionalisme tidak terlepas dari penemuan mesin cetak yang didorong oleh kapitalisme-cetak.<sup>5</sup>

---

<sup>1</sup> Denis McQuail, *Teori Komunikasi Massa, Suatu Pengantar*, (Jakarta: Erlangga, 1997), hlm. 12.

<sup>2</sup> Istilah pers merupakan terjemahan dari bahasa Inggris 'press' yang dapat mempunyai pengertian luas maupun sempit. Dalam pengertian luas, pers mencakup semua media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain. Semua itu lebih dikenal dengan istilah jurnalistik radio, jurnalistik televisi, atau jurnalistik pers. Dalam pengertian sempit, pers hanya digolongkan pada produk-produk penerbitan yang melewati proses percetakan, seperti surat kabar harian, majalah mingguan atau tengah bulanan yang semuanya lebih dikenal sebagai media cetak. Lihat, F. Rachmadi, dalam *Perbandingan Sistem Pers, Analisis Deskriptif Sistem Pers di Berbagai Negara*, (Jakarta: Gramedia, 1990), hlm. 9-10.

<sup>3</sup>*Ibid.*, hlm. 30.

<sup>4</sup> Benedict Anderson, *Imagined Communities, Komunitas-Komunitas Terbayang*, (Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar bekerja sama dengan Insist, 2001), hlm. 50.

<sup>5</sup> Penggunaan istilah "kapitalisme-cetak" untuk menunjukkan pengertian bahwa sejak ditemukannya mesin cetak, surat kabar masa Kolonial Hindia Belanda banyak dijadikan alat kaum bermodal (kapitalis) sebagai kepanjangan tangan dalam menyuarakan paham liberalisme. Pengertian ini bukan berarti menafikan surat kabar yang lahir dari perjuangan rakyat.

Adanya kapitalisme-cetak yang memberikan informasi tentang berbagai peristiwa di lingkungan masyarakat secara tidak langsung dapat menumbuhkan nasionalisme-nasionalisme-linguistik. Ia juga berpendapat bahwa, pers sebagai bagian dari budaya-cetak yang memberi kemungkinan terjadinya komunikasi antara sang pemberi dan penerima pesan, meskipun dibatasi oleh waktu dan tempat, adalah salah satu saluran yang paling efektif untuk memupuk kesadaran. Kalau teori nasionalisme digunakan, dapatlah dikatakan bahwa pers yang menghasilkan teks tentang hal-hal kekinian dan yang bisa menyebar ke mana saja, itulah yang kemudian meletakkan landasan untuk pertumbuhan sebuah ‘bangsa’ yang secara teoritis disebut ‘komunitas yang dibayangkan’.<sup>6</sup>

Kemajuan teknologi bangsa Eropa, secara tidak langsung merambah ke tanah Hindia Belanda. Dalam konteks kolonialisme, dengan semangat *Gold, Glory, dan Gospel*, para misionaris Spanyol dapat disebut sebagai orang-orang yang berjasa mendatangkan mesin cetak di kepulauan Indonesia. Batavia (Jakarta) pada awal abad ke-17 mendapatkan mesin cetak, namun, mesin cetak yang diperoleh tidak diiringi dengan tenaga-tenaga yang mampu mengoperasikan mesin tersebut, sehingga mesin cetak belum menampakkan hasilnya. Baru pada tahun 1659 mesin cetak tersebut memberikan hasil nyata. Karya cetak yang pertama tersebut adalah almanak yang dibuat oleh Kornelis Pijl, sedangkan surat kabar pertama di Indonesia baru muncul lebih dari seratus tahun kemudian, yaitu dengan munculnya surat kabar *Bataviase Nouvelles* pada tahun 1810.<sup>7</sup> Adanya mesin cetak dan tenaga operasional ini kemudian mempengaruhi perkembangan pers masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Catatan sejarah menunjukkan, bahwa surat kabar yang terbit antara tahun 1836 sampai tahun 1909, semuanya berbahasa Belanda dengan modal penerbitan dari orang-orang atau perusahaan-perusahaan Belanda, terutama pabrik gula. Surat kabar pada masa itu jarang diterbitkan setiap hari, paling hanya empat kali

---

<sup>6</sup> Anderson, *op. cit.*, khususnya Bab 3.

<sup>7</sup> Ahmad Adam, *Sejarah dan Bibliografi Akbar dan Majalah Melayu Abad Kesembilan Belas*, (Bangi: University Kebangsaan Malaysia, 1992), hlm. 20.

seminggu. Demikian G.H. von Faber dalam bukunya *Oud Soerabaia* yang diterbitkan di Surabaya, pada 1 April 1931 menggambarkan.<sup>8</sup>

Pers yang pernah hidup di Hindia Belanda memiliki latar belakang sejarah yang sangat erat hubungannya dengan tersegmennya masyarakat. Berdasarkan kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang tercantum dalam *Regerings Reglement* (Peraturan Pemerintah) 1854, masyarakat Indonesia dibagi dalam tiga lapisan. Lapisan pertama ditempati oleh orang-orang Belanda dan Eropa lainnya, lapisan kedua ditempati oleh orang-orang Timur Asing, dan lapisan ketiga ditempati oleh kaum pribumi (*inlander*). Latar belakang yang demikian dalam kehidupan sosial di Indonesia ini mempengaruhi sistem sosial lainnya. Seperti dalam hal pendidikan diadakan pemisahan antara anak-anak penduduk pribumi, Timur Asing, dan Belanda (Eropa).<sup>9</sup>

Pers di Hindia Belanda pada awal kemunculannya hanya bertujuan untuk memberitakan masalah periklanan, perekonomian dan lelang barang-barang produksi. Seiring dengan perkembangan politik dan kebutuhan pers guna mensosialisasikan kebijakan pemerintah, model pemberitaan pers semakin cenderung pada masalah yang bersifat sosial politik. Namun, dalam masalah ini yang dibicarakan adalah model kebijakan pemerintah yang menyangkut peraturan ketentuan-ketentuan dalam pers. Bagaimana pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengawasi dan mensensor berita-berita yang dianggap membahayakan bagi stabilitas pemerintah.<sup>10</sup>

Kekhawatiran terganggunya kekuasaan pemerintah dan kekhawatiran terjadinya perubahan dalam masyarakat akibat pengaruh pers, menjadi salah satu

---

<sup>8</sup> Hotman M. Siahaan, "Pers dalam Era Pers Perjuangan", dalam, Hotman M. Siahaan dan Tjahjo Purnomo (ed.), *Tajuk-Tajuk dalam Terik Matahari*, (Surabaya: Yayasan Keluarga Bhakti, 1993), hlm. 36; H. Tatang Istiawan (dkk), *Pers Jawa Timur dari Masa ke Masa*, (Surabaya, Serikat Penerbit Surat kabar, 1994), hlm. 34.

<sup>9</sup> Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 54.

<sup>10</sup> Ignatius Haryanto, "Beberapa Aspek Hubungan Pers dan Pemerintah", dalam *Sejarah* vol. 7, (Jakarta: kerja sama MSI dan PT. Gramedia Pustaka Utama, 1999), hlm. 25.

sebab dihalang-halangi dan dibatasinya kemerdekaan pers oleh pemerintah kolonial Hindia Belanda. Kultur dan sensor, meminjam istilah Maters, merupakan *alte kameraden* (dua sahabat lama) dan *feindliche bruder* (dua saudara yang saling bermusuhan).<sup>11</sup> Cara yang ditempuh pihak pemerintah kolonial Hindia Belanda untuk mengekang kemerdekaan pers atau membatasi kebebasan pers bisa berbeda-beda sifat dan tingkatnya, namun, ada sarana-sarana yang dapat digunakan pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Sarana-sarana yang digunakan oleh pihak pemerintah pada pokoknya terbagi dalam empat kategori:

1. Sarana yuridis, seperti sensor preventif, ketentuan-ketentuan pidana yang represif, dan kewajiban tutup mulut bagi pegawai pemerintah;
2. Sarana administratif, seperti sistem perizinan untuk mendirikan percetakan, sistem uang agunan, dan larangan publikasi dari pemerintah;
3. Sarana ekonomi, seperti pemungutan pajak untuk kertas, iklan dan langganan, dan pemberian subsidi;
4. Sarana sosial, seperti pemberian peringatan, propaganda penerangan, dan penerapan sensor diri.<sup>12</sup>

Demikian kondisi sosial politik kehidupan pers di Hindia Belanda masa pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Begitu juga dengan pers Tionghoa peranakan. Perkembangan pers Tionghoa peranakan di Hindia Belanda, selain dipengaruhi oleh adanya “kapitalisme-cetak”<sup>13</sup> dan penerbitan Belanda, juga dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan baru yang mengekang dan membatasi ruang gerak komunitas etnis Tionghoa peranakan dalam melakukan perdagangan di daerah-daerah Hindia Belanda. Lahir dan tumbuhnya pers Tionghoa peranakan di Indonesia didorong oleh adanya pers kolonial untuk kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang membela kaum pemilik modal (kapitalis) dan membatasi peranan mereka dalam perpolitikan. Peranan pers Tionghoa peranakan

---

<sup>11</sup> Mirjam Maters, *op. cit.*, hlm. 11.

<sup>12</sup> Edward C Smith, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1983), hlm. 27.

<sup>13</sup> Pengertian tentang istilah “kapitalisme-cetak” lihat catatan kaki no.5

di Indonesia diwarnai oleh aktivitas pemimpin-pemimpin etnis Tionghoa peranakan yang menyuarakan akan arti identitas kebangsaannya dan menolak tuduhan-tuduhan yang kerap dikeluarkan oleh pers pemerintah Hindia Belanda bahwa terpuruknya kondisi sosial kaum pribumi disebabkan oleh sifat korup etnis Tionghoa peranakan yang sering menyalahgunakan peranannya sebagai pedagang perantara.

Perkembangan pers Tionghoa, jika dirunut akar sejarahnya sebelum memasuki abad ke-20 belum bisa dikatakan sebagai pers Tionghoa peranakan. Hal ini karena pada periode awal munculnya tahun 1850-an sampai 1900-an lebih banyak dipimpin oleh orang-orang Indo-Eropa,<sup>14</sup> dan lebih populer dikenal sebagai pers Melayu-Tionghoa. Surat kabar pertama berbahasa Melayu yang terbit di Hindia Belanda adalah *Soerat Kabar Bahasa Melayoe*. Surat kabar ini terbit pertama kali pada 12 Januari 1856. Kehadiran surat kabar ini diketahui publik dari surat kabar *Oostpost*. Dalam edisi pertama ditulis:

“Harganja langganan ini Soerat Kabar Bahasa Melajoe dalam satoe tahoen moesti dibayar lebih dahoeleoe kepada jang kloewaran ini soerat. Harganja kabaran jang 10 perkataan f. 1- rec. selainnja zegel. Dan boleh dapat dari E. Fuhri di Soerabaja”.<sup>15</sup>

Tujuan diterbitkannya surat kabar ini dijelaskan pula pada penerbitan pertamanya sebagai berikut:

“Bermoelanja kita mengloearkan kepada orang-orang njang soeka batja ini Soerat Kabar , njang bergoena soedah terseboet di dalam Soerat Kabar Oostpost jaini Soerat Kabar Bahasa Melajoe sangat didjadikan pertoeleengannja orang berdagang di negrie Djawa seblah timor. Mangka segala orang berdagang njang soeka taroeh satoe kabar dagang atawa belajar, berseangkat, datang dari penjoewalan barang, harga atawa dari lain-lain kabar, ija boleh kirim di kantor citakan ini soerat di kota Soerabaja”.<sup>16</sup>

---

<sup>14</sup>Golongan Indo-Eropa merupakan keturunan dari pasangan, biasanya pihak ayah dari Eropa dan pihak ibu dari penduduk pribumi.

<sup>15</sup>Serikat Penerbit Surat Kabar Cabang Jawa Timur, *Sejarah Pers Di Jawa Timur*, (Surabaya: SPSK Jawa Timur, tanpa tahun), hlm. 19.

<sup>16</sup>SPSK, *ibid.*, hlm. 24.

Sembilan tahun kemudian atau tahun 1865 surat kabar *Bientang Timoer* terbit untuk pertama kalinya dan dicetak oleh Gimberg & Co. Edisi pertama terbit hari Rabu 4 Januari 1865. Pada halaman kiri atas edisi pertama itu diturunkan penjelasan penerbit:

“Siapa-siapa jang bisa trima soerat kabar bernama Bintang Timoer, soeka diteroeskan ini taon 1865, dikasi taoe njang oewangnja itoe soerat kabar harganja f. 15, bole lekas dikirimkan sama jang kloewarkan itoe soerat kabar. Lagi dikasih inget nyang di sembarang kota dapet post wissel njang bolee di toetoep franco dalam soerat, dengan dikirimken sama Gebr. Gimberg & Co di Soerabaias njang kloewaran Soerat Kabar Bintang Timoer....”<sup>17</sup>

Beberapa surat kabar berbahasa Melayu lainnya yang terbit sebelum tahun 1900 adalah *Bintang Soerabaia*, *Tjahaya Moelia* dan *Betara Indra*.<sup>18</sup>

Memasuki awal abad ke-20 pers Tionghoa peranakan baru bisa dikatakan pers yang berdiri sendiri, karena lembaga ini dikelola dan dipimpin oleh orang Tionghoa peranakan yang mendapat pendidikan gaya Barat. Bersamaan dengan itu etnis Tionghoa peranakan juga mengelola penerbitan surat kabar yang tenaga kerjanya dari orang-orang mereka sendiri dan berorientasi kepada kelompoknya. Tampilnya pers Tionghoa peranakan<sup>19</sup> pada awal abad ke-20 ini akibat meningkatnya nasionalisme dan bertambahnya jumlah penduduk Tionghoa “totok”,<sup>20</sup> namun begitu, wartawan-wartawan peranakan dalam menulis berita umumnya menggunakan bahasa Melayu rendah atau Melayu pasar, yaitu bahasa pergaulan umum antar berbagai kelompok penduduk di Hindia Belanda.

---

<sup>17</sup>SPSK, *ibid.*, hlm. 27.

<sup>18</sup>SPSK, *ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>19</sup>Istilah Tionghoa “Peranakan” ini menunjukkan golongan atau orang yang berasal dari keturunan campuran yang biasanya lahir dari ayah Tionghoa dan ibu pribumi. Untuk lebih jelasnya lihat Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, terj, F.S. Hardoyo, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet, ke-2, 1994), hlm. 24.

<sup>20</sup>Istilah Tionghoa ‘Totok’ menunjukkan golongan Tionghoa apabila ia dilahirkan di Tiongkok dan dalam orientasinya lebih condong ke daratan Tiongkok. Golongan ini lebih banyak datang ke Indonesia sebagai imigran sesudah abad ke-20. Satu-satunya tanda kebudayaan yang dapat dipercaya dari pernyataan diri sebagai orang Tionghoa dan penyatuan diri ke dalam sistem sosial Tionghoa adalah pemakaian, setidaknya-tidaknya dalam beberapa bentuk dan keadaan, nama keluarga Tionghoa. *Ibid*, hlm. 25.

Sekalipun diterima sebagai bahasa komunikasi (*lingua franca*) dalam kehidupan sehari-hari, pihak pemerintah Kolonial Hindia Belanda lebih menyukai bentuk yang lebih halus, yaitu bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa resmi. H.J.M. Maier menganggap perbedaan dalam bahasa Melayu rendah dan tinggi sebagai bentuk sensor, karena perbedaan itu membedakan orang Tionghoa dari orang Indonesia berpendidikan yang menggunakan bahasa Melayu Tinggi.<sup>21</sup>

Perkembangan pers Tionghoa peranakan pada awal abad ke-20 tidak dapat dipungkiri didorong oleh munculnya Pan-Asia yang mulai menyebar di seluruh wilayah Hindia Belanda. Anak-anak opsir dan pedagang kaya Tionghoa peranakan seperti, Lie Kim Hok, Phoa Keng Hek, dan Yoe Tjai Siang yang mendapat pendidikan gaya Barat kembali dari perjalanan intelektualnya dengan membawa pemikiran-pemikiran baru ke Jawa. Mereka melihat bahwa Jepang sebagai negara di Asia mulai diakui kekuatannya oleh negara-negara Barat. Hal ini secara tidak langsung mendorong munculnya kesadaran identitas di kalangan etnis Tionghoa peranakan di Indonesia. Nasionalisme etnis Tionghoa peranakan di Indonesia diwujudkan dengan membentuk organisasi Tiong Hoa Hwe Koan (THHK) di bawah pimpinan Phoa Keng Hek. Organisasi ini berdiri pada tanggal 17 Maret 1900 di Batavia (Jakarta) yang bertujuan untuk memajukan kembali budaya Tionghoa dan agama Khonghucu serta mendidik orang-orang Tionghoa agar menghentikan kebiasaan buruk berjudi dan menghambur-hamburkan uang dalam melakukan upacara kematian.<sup>22</sup>

Pembentukan THHK disusul dengan munculnya surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan yang dikelola dan diterbitkan dengan menggunakan tenaga-tenaga etnis Tionghoa peranakan. Beberapa surat kabar Tionghoa peranakan yang terbit antara lain, *Li Po* terbit tahun 1901 di Sukabumi, *Pewartar Soerabaia* terbit tahun 1902 di Surabaya, dan *Chabar Perniagaan* terbit tahun 1903 di Batavia. Semua surat kabar-surat kabar tersebut merupakan corong yang menyuarakan pemikiran-pemikiran kaum Tionghoa peranakan akan identitas mereka di Hindia

---

<sup>21</sup>Dalam Maters, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>22</sup> Suryadinata, *op. cit.*, hlm. 24.



Belanda. Kesadaran identitas kaum Tionghoa peranakan semakin meningkat dengan terbentuknya *Siang Hwe* (Kamar Dagang Tionghoa) pada tahun 1908 yang bertujuan melindungi para pedagang Tionghoa peranakan dari intimidasi pemerintah Kolonial Hindia Belanda.<sup>23</sup>

Kaum Tionghoa peranakan sejak dekade tahun 1910-an sampai 1930-an semakin terseret dalam pusaran politik di Indonesia di mana wadah THHK yang menaungi kaum Tionghoa peranakan dirasa tidak dapat mewakili semua aspirasi mereka, dan organisasi ini lebih banyak dikuasai oleh kaum Tionghoa totok yang lebih berorientasi ke Tiongkok, negara nenek moyang mereka. Pada akhirnya, terjadi perpecahan di tubuh THHK menjadi tiga kelompok aliran yang semuanya mempunyai warna sendiri-sendiri. Aliran pertama adalah kelompok yang dinamakan sesuai dengan surat kabar yang terbit tahun 1910, yaitu *Sin Po*. Surat kabar ini menjadi corong kelompok *Sin Po* yang menyuarakan agar kaum Tionghoa peranakan Hindia Belanda mempertahankan kebangsaannya dan menarik golongan peranakan lebih dekat ke Tiongkok, serta menganggap Tiongkok sebagai tanah air orang Tionghoa peranakan Hindia Belanda.<sup>24</sup> Kelompok ini mempunyai hubungan yang erat dengan gerakan kaum nasionalis Tionghoa Asia Tenggara yang kegiatannya terpusat di Singapura. Seperti diketahui Batavia (Jakarta) merupakan pusat pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, dan di wilayah ini terdapat pelabuhan internasional yang menjadi pintu gerbang bagi kaum pendatang Tionghoa baru di Jawa. Para Tionghoa yang datang dari luar ini sering membawa gagasan-gagasan nasionalisme Tionghoa ke Jawa. Oleh karena itu, Batavia menjadi basis gerakan nasionalis Tionghoa pertama dan menjadi pusat kegiatan kelompok *Sin Po*.<sup>25</sup>

---

<sup>23</sup> Charles A. Coppel, *Tionghoa Indonesia dalam Krisis*, (Jakarta:Pustaka Sinar Harapan, 1994), hlm. 15.

<sup>24</sup> Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers dan Kebangkitan Kesadaran Ke-indonesiaan 1855-1913*.Terjemahan Amarzan Loebis dan Mien Joebhar, (Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan kayu, dan Perwakilan KITLV, 2003), hlm., 43.

<sup>25</sup> Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers*, *ibid.* hlm. 56.

Aliran kedua adalah kelompok yang diwakili oleh anak-anak saudagar kaya dan opsir Tionghoa peranakan yang pernah menjadi pelajar dan mahasiswa di Negeri Belanda. Pada saat sekolah di Negeri Belanda ini mereka bergabung dengan *Hung Hwa Hui* Nederland yang didirikan tahun 1911 di Leiden. Setelah menyelesaikan sekolah di Negeri Belanda mereka kembali ke Jawa dan mendapati kaumnya diperlakukan tidak adil. Pada tahun 1928 bekas pelajar dan mahasiswa yang pernah menjadi anggota CHH Nederland membentuk *Chung Hwa Hui* (CHH). Melalui surat kabar *Perniagaan* yang menjadi corongnya CHH, kelompok ini menghendaki orang Tionghoa peranakan tetap mempertahankan identitas etnisnya di lingkungan Indonesia dan memperjuangkan kebudayaan dengan Tiongkok. Kelompok yang kebanyakan dimotori oleh pelajar dan mahasiswa yang mendapat gaya pendidikan barat ini mempengaruhi gerakan politiknya, sehingga kelompok ini lebih berorientasi dan bekerjasama dengan pemerintah Kolonial Hindia Belanda.<sup>26</sup> Melalui dukungan dari para saudagar Tionghoa peranakan yang kaya kelompok ini mendapatkan basis massanya di Semarang. Daerah ini dikenal sebagai pusat saudagar Tionghoa peranakan yang sudah mapan, kolot dan tidak begitu bergairah untuk ambil bagian dalam kegiatan nasionalis Tionghoa.<sup>27</sup>

Aliran ketiga diwakili oleh kelompok yang tidak sejalan dengan arah politik CHH yang lebih banyak dikuasai oleh kaum saudagar Tionghoa peranakan. Kelompok ini banyak dimotori oleh kaum Tionghoa peranakan dari kalangan bawah yang tidak bisa mengakses dan mengaspirasikan suaranya. Kaum Tionghoa peranakan dari kalangan bawah ini lebih banyak berhubungan dengan kaum nasionalis pribumi daripada golongan Tionghoa peranakan yang kolot, sehingga mempengaruhi arah politik mereka yang mendukung kaum nasionalis pribumi yang menginginkan kemerdekaan Indonesia. Liem Koen Hian salah satu tokoh kelompok ini memperkenalkan gagasan tentang “Indonesier” dan bahwa

---

<sup>26</sup> Benny G. Setiono, *Tionghoa Dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2002), hm., 456

<sup>27</sup> Suryadinata, *op. cit.*, hlm. 89.

kaum Tionghoa peranakan harus sadar untuk menjadi warga negara Indonesia (Indonesier).<sup>28</sup>

Kesadaran identitas etnis Tionghoa peranakan yang melanda di Hindia Belanda ini secara tidak langsung mempengaruhi nasionalisme para pedagang Jawa akan identitas mereka sebagai penduduk pribumi untuk membentuk suatu wadah bagi golongan mereka melalui Serikat Dagang Islam. Pengaruh gerakan nasionalisme etnis Tionghoa peranakan ini banyak dirasakan oleh kaum intelektual di Hindia Belanda melalui surat kabar-surat kabar yang dikelola oleh etnis Tionghoa peranakan sebagai corong pemikiran mereka. Salah satu surat kabar yang menerbitkan pemikiran-pemikiran nasionalisme kaum Tionghoa peranakan adalah *Sin Tit Po*. Surat kabar *Sin Tit Po* merupakan corong gerakan nasionalis Tionghoa peranakan di Surabaya yang sering menurunkan berita tentang gagasan pemikiran Liem Koen Hian. Misalnya, gagasan pemikiran Liem Koen Hian mengenai konsep *Indonesier* yang dijelaskan dengan:

“Perkataan *Indonesier* bisa berarti seorang *Indonesier* asli, jaitoe artian *ethnologisch* dan djoega bisa berarti rakjat dari negri Indonesia, jaitoe artian *staatkundig*. Seperti djoega perkataan *Nederland* bisa berarti seorang Belanda totok, tetapi bisa djoega berarti seorang Duits totok, seorang Inggris totok, atau seorang Tionghoa totok....

Maka itoe sama sekali tidak ada anehnja, djikalaoe perkataan *Indonesier* tidak sadja berarti seorang *Indonesier* asli, tetapi djoega berarti seorang yang djadi rakjat dari ini negri. Dengan lain perkataan, perkataan *Indonesier* tidak mesti coema berarti seorang *Indonesier* asli sadja.

Orang barangkali akan bilang, sebegitoe lama Indonesia beloem mempoenyai pemerintah sendiri, sebegitoe lama beloem ada *burgerschap* ataoe kerakjatan Indonesia, sebegitoe lama djoega beloem bisa ada *staatkundig begrip* dari perkataan *Indonesier* dalam arti *staatkundig*.

... saja berkejakinan, dalam tempo jang tidak terlaloe lama tentoe lahir itoe *staatkundig begrip*, tentoe lahir *burgerschap* atau kerakjatan Indonesia, toeroet mana tidak sadja orang *Indonesier* asli dinamakan *Indonesier*, tetapi djoega peranakan Tionghoa, peranakan Belanda, peranakan Arab....”<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ahmad Adam, *Sejarah Awal Pers*, *op. cit.*, hlm. 57.

<sup>29</sup> *Sin Tit Po*, “Tiga Aliran Politiek dalam Doenia Tionghoa Peranakan”, edisi 26 Agustus 1932.

Gagasan Liem Koen Hian tentang *Indonesier* ini mendapat sambutan hangat dari kaum Tionghoa peranakan kalangan bawah dan pada 25 September 1932 Liem Koen Hian dan Ong Liang Kok serta kaum Tionghoa peranakan mendirikan *Partai Tionghoa Indonesia* (PTI) di Surabaya yang bertujuan untuk membantu kemajuan ekonomi, sosial dan politik dari Indonesia sampai menjadi satu negara yang menaungi hak dan kewajiban warga negaranya. PTI menginginkan tiap individu Tionghoa peranakan di Indonesia tetap mempertahankan etnisnya, tetapi secara politik terasimilasi ke dalam masyarakat pribumi. Mereka menganggap Indonesia sebagai tanah airnya dan menamakan dirinya sebagai *Indonesier* (orang Indonesia), menuntut persamaan hak dan kewajiban dengan orang pribumi, mau berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, dan percaya bahwa nasib mereka terikat dengan nasib orang pribumi.<sup>30</sup> Kelompok ini mendapat dukungan massa di Surabaya yang menjadi pusat hubungan antara kaum nasionalis Tionghoa peranakan, pribumi, dan keturunan Arab. Hubungan intensif ini tidak terdapat di dua kota lainnya, yaitu Batavia dan Semarang.<sup>31</sup>

Pendudukan tentara militer Jepang di Hindia Belanda tahun 1942 menyebabkan hampir semua pers yang hidup di Hindia Belanda tidak boleh terbit, dan dipaksa berintegrasi dalam Barisan Propaganda Militerisme Jepang. Kantor berita nasional Antara<sup>32</sup> dimasukkan ke dalam kantor berita *Domei*, dan di Hindia Belanda hanya ada beberapa surat kabar yang boleh terbit, seperti *Soeara Asia* yang terbit di Jawa Timur.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Suryadinata, *ibid.*, hlm. 86-87.

<sup>31</sup> Benny, *op. cit.*, hlm. 489.

<sup>32</sup> Kantor Berita Antara didirikan pada tahun 1947 merupakan hasil prakarsa Adam Malik untuk memudahkan para jurnalis dalam pengaksesan berita luar negeri maupun pemerintah yang sangat dibutuhkan surat kabar-surat kabar. Sebenarnya kantor berita ini merupakan kelanjutan dari Kantor Berita Antara yang dirikan pada masa kolonial Hindia Belanda tahun 1937 yang kemudian pada masa pendudukan Jepang diganti namanya dengan *Yashima*. Pada tanggal 6 Juli 1942 kantor berita ini diganti nama dengan *Domei*. Lihat Edward C. Smith, *op. cit.*, hlm. 90; juga H. Tatang Istiawan, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>33</sup> Edward C. Smith, *ibid.*, hlm. 84.

Berdasarkan latar belakang yang diuraikan di atas, dalam penulisan skripsi ini penulis tertarik untuk mengkaji kehidupan pers Tionghoa peranakan dan peranannya dalam pergerakan nasional yang tumbuh subur pada dekade 1902-an. Ketertarikan penulis terhadap permasalahan pers ini karena beberapa alasan: *pertama*, terinspirasi oleh besarnya pengaruh pers terhadap perubahan sosial dalam masyarakat pada masa sekarang atau dengan kata lain pers sangat berperan besar dalam mengubah perilaku masyarakat sehingga timbul suatu pertanyaan besar bagi penulis bagaimana dengan masyarakat Tionghoa peranakan yang berdomisili di Indonesia, apakah adanya pers menjadi media informasi mempengaruhi etnis Tionghoa peranakan untuk terjun dalam bidang persuratkabaran pada masa dahulu? *Kedua*, tersedianya data yang cukup memadai, sehingga memotivasi penulis untuk menyelesaikan skripsi.

Beberapa alasan yang tercatat di atas tersebut mendorong penulis menetapkan judul skripsi ini dengan **“Peranan Pers Tionghoa Peranakan di Surabaya Dalam Pergerakan Nasional 1902 - 1942”**. Agar penulisan skripsi ini terfokus pada kajian yang dikehendaki, perlu diadakan penjelasan mengenai pengertian yang terkandung di dalam judul skripsi tersebut. Istilah peranan<sup>34</sup> dalam terminologi Indonesia merupakan bentuk kata kerja yang mempunyai makna ikut berpartisipasi atau mengalami. Pers adalah media komunikasi massa, seperti radio, televisi, dan film yang berfungsi memancarkan atau menyebarkan informasi, berita, gagasan, pikiran, atau perasaan seseorang atau sekelompok orang kepada orang lain,<sup>35</sup> tetapi yang menjadi perhatian penulis lebih dipersempit pada pers cetak. Pertimbangan penulis menitikberatkan pada surat kabar karena ini merupakan medium yang paling banyak mendapat tekanan dari pemerintah, di samping itu juga surat kabarliah yang banyak mengekspos peristiwa dan berita-berita di masa pergerakan nasional.

---

<sup>34</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan), hlm. 347.

<sup>35</sup> Lihat Rachmadi, *loc. cit.*, hlm. 9-10.

Pers mempunyai peran penting dalam masyarakat di suatu negara. Peranan penting pers antara lain: *pertama*, sebagai agen penyebaran informasi yang pers sangat membantu dalam mempercepat proses perubahan dari masyarakat tradisional menjadi masyarakat modern. *Kedua*, pers juga berperan dalam memberikan informasi, mendidik, membangun, dan menggerakkan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan. *Ketiga*, sebagai media untuk menyampaikan kebijaksanaan dan program pembangunan pemerintah kepada masyarakat pada satu sisi, dan masyarakat juga dapat menggunakan pers sebagai penyalur aspirasi dan pendapat serta kritik atau kontrol sosial. Dengan kata lain, pers berperan sebagai salah satu penghubung yang kreatif antara pemerintah dengan masyarakat.<sup>36</sup>

Kajian dalam penulisan skripsi ini menitikberatkan pada peranan pers Tionghoa peranakan dalam gerakan nasionalisme. Peranan pers yang dimaksudkan di sini adalah hidup dan berkembangannya suatu surat kabar yang ada di Hindia Belanda dalam kaitannya dengan gerakan nasional, sehingga surat kabar tersebut menjadi bagian dari sejarah masyarakat Indonesia, sedangkan Tionghoa peranakan merupakan salah satu etnis yang menempati wilayah Indonesia. Catatan sejarah menunjukkan etnis ini sudah lama bermigrasi ke Indonesia. Para ahli membagi etnis Tionghoa ke dalam dua kelompok, yaitu Tionghoa *peranakan* dan Tionghoa *totok*.<sup>37</sup> Penyebutan dua kelompok ini berdasarkan awal keberadaan mereka di Hindia Belanda dan darah keturunan.

## 1.2. Perumusan Masalah

Kalau paradigma dimaknai sebagai keseluruhan susunan kepercayaan, nilai-nilai, serta teknik-teknik yang dianut dan menjadi filsafat dasar, maka dapat dinyatakan paradigma pers perjuangan bersifat kritis terhadap negara, dan bersifat afirmatif terhadap masyarakat (*society*). Realitas yang obyektif banyak membenarkan

---

<sup>36</sup> *Ibid.*, hlm.16.

<sup>37</sup> Untuk mengenal perbedaan antara Tionghoa *peranakan* dan Tionghoa *totok* lihat catatan kaki no.15 dan 16.

dugaan ini sehingga dirasakan menarik untuk dikaji dan dipahami pola-pola dinamika perjuangan pers.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dalam penulisan skripsi ini dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut:

1. Apa yang melatarbelakangi munculnya kesadaran identitas Tionghoa Peranakan di Surabaya?
2. Bagaimana kehidupan pers Tionghoa peranakan dalam perpolitikan di Surabaya?
3. Bagaimana gagasan kebangsaan dalam surat kabar Tionghoa Peranakan?
4. Apa dampak pers Tionghoa Peranakan bagi gerakan nasionalisme pribumi?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat**

Tujuan yang ingin dicapai dari penulisan skripsi ini:

1. Mengetahui latar belakang munculnya gerakan nasionalisme Tionghoa peranakan;
2. Memberikan gambaran kehidupan pers Tionghoa peranakan dalam perpolitikan di Surabaya;
3. Menampilkan isi gagasan kebangsaan dalam surat kabar Tionghoa peranakan;
4. Mengetahui dampak pers Tionghoa peranakan bagi gerakan nasionalisme kaum pribumi.

Adapun manfaat yang diperoleh dari penulisan ini bagi penulis adalah sebagai berikut:

1. Dapat menjelaskan munculnya gerakan nasionalisme Tionghoa peranakan di Hindia Belanda;
2. Dapat memberikan gambaran kehidupan pers Tionghoa peranakan dalam perpolitikan di Hindia Belanda;

3. Dapat menampilkan gagasan kebangsaan dalam pers Tionghoa peranakan yang berperan dalam bagi gerakan nasionalisme kaum pribumi;
4. Sebagai bahan pertimbangan bagi peneliti lain yang ingin mendalami tentang permasalahan Tionghoa peranakan di Indonesia;
5. Sebagai wahana bagi aplikasi pemahaman teori yang selama ini penulis terima di bangku kuliah.

#### 1.4. Ruang Lingkup

Kajian ini difokuskan pada pers Tionghoa peranakan yang ada di Surabaya. Kota Surabaya merupakan salah satu wilayah Indonesia yang menjadi pusat administrasi setelah Jakarta. Kota ini merupakan sebuah kota lama yang keberadaannya diketahui jauh sebelum kedatangan bangsa barat dan penelitian ini difokuskan pada daerah ini. Alasan pengambilan tempat penelitian (*scup spacial*) di wilayah ini didasarkan pada: *pertama*, sebagai sebuah kota terbesar setelah Jakarta, kota Surabaya merupakan sentral dari arus pengetahuan di mana wilayah ini menjadi pusat bagi aliran Partai Tionghoa Indonesia yang didirikan oleh Liem Koen Hian; *kedua*, berkaitan dengan poin pertama Kota Surabaya merupakan daerah kantong dari etnis Tionghoa peranakan yang menjadi pokok kajian; *ketiga*, sebagai kota administrasi Kota Surabaya merupakan pusat administrasi pemerintah Propinsi Jawa Timur yang mana pemerintah Kolonial Hindia Belanda menempatkan pusat administrasinya di kota ini.

Tahun 1902 dijadikan awal kajian dalam penulisan skripsi ini karena pada tahun itu di Surabaya telah terbit surat kabar pertama yang menjadi penanda bagi kesadaran identitas kaum Tionghoa peranakan, yaitu surat kabar *Pewart Soerabaia*. Surat kabar ini dikelola dengan tenaga orang Tionghoa peranakan sendiri yang dijadikan sebagai alat propaganda dan corong gerakan nasionalis kaum Tionghoa peranakan. Tidak lama kemudian bermunculan surat kabar-surat kabar lain yang juga sama-sama menyuarakan kesadaran identitas bagi kaum Tionghoa peranakan di Surabaya, sedangkan tahun 1942 dijadikan batasan akhir studi ini dengan alasan tahun 1942 merupakan akhir berdirinya surat kabar-surat



kabar Tionghoa peranakan ketika masuknya Tentara Pendudukan Jepang yang menasionalisasi pers di seluruh bekas jajahan Hindia Belanda. Pada masa itu semua pers harus berada di bawah pengawasan dan sensor pemerintah Pendudukan Jepang. Sementara itu, skop spasial kajian ini difokuskan di Surabaya yang menjadi pusat pertumbuhan dan perkembangan pers Tionghoa peranakan yang bercorak nasionalisme. Dengan demikian maksud dari kajian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar peranan pers Tionghoa peranakan dalam pergerakan nasional pada tahun 1902-1942.

### 1.5. Tinjauan Pustaka

Studi yang mengkaji tentang kehidupan dan peranan pers Tionghoa peranakan dalam arus gerakan nasionalis pada awal abad ke-20 ini dari perspektif sejarah sebenarnya belum banyak dikaji oleh para sarjana. Kajian tentang Tionghoa peranakan lebih banyak ditonjolkan dari sisi hubungan minoritas Tionghoa peranakan dengan kaum pribumi dalam kaitannya dengan permasalahan ekonomi. Meskipun begitu ada tiga kajian yang dapat dijadikan acuan dalam mengkaji kehidupan pers di Surabaya. Pertama adalah kajian Mirjam Maters dalam bukunya *“Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan”*.<sup>38</sup> Mirjam meninjau perkembangan pers dari sisi perubahan gaya bahasa dan isi berita yang disampaikan kepada publik yang kemudian memunculkan persoalan baru dalam hubungan dengan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Lebih lanjut Mirjam menjelaskan bahwa pers di Hindia Belanda pada abad ke-19 belum bisa dikatakan pesurat kabar sebenarnya karena isinya hanya dalam permasalahan pemberitaan lelang dan iklan. Pers di Hindia Belanda baru bisa dikatakan surat kabar sebenarnya pada dekade tahun 1850-an yang isi beritanya mengalami perubahan secara keseluruhan dengan menonjolkan berita-berita sosial ekonomi dan politik. Bentuk surat kabar juga mengalami

---

<sup>38</sup> Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003).

perubahan dari hanya selebaran menjadi surat kabar mingguan dan harian seperti surat kabar sebenarnya.<sup>39</sup>

Perubahan pers selebaran menjadi bentuk surat kabar mingguan dan harian dengan isi berita yang menyoroti berbagai persoalan di masyarakat yang menjurus pada politik ini mendorong pemerintah Kolonial Hindia Belanda mengeluarkan peraturan barang cetakan tahun 1856 yang tertuang dalam *Reglemen op de drukwerken in Nederlandsch-Indie* atau yang lebih lazim dikenal dengan *Drukpers Reglemen*. Isi peraturan ini antara lain:

“Semoea karya tjetak sebeloem diterbitkan, satoe exemplar haroes dikirimkan dahoeloe kepada kepala pemerintah setempat, pejabat joestisi, dan algemene secretarie. Pengiriman ini haroes dilakoekan oleh pihak pentjetak dan penerbitnja dengan ditandatangani. Kalaoe ketentoean ini tidak dipatoehi, karja tjetak terseboet disita. Tindakan ini bisa disertai dengan penjegelan pertjetakan atau tempat penjimpanan barang-barang pertjetakan terseboet.”<sup>40</sup>

Peraturan barang cetakan ini mendorong munculnya kritik di antara pemilik percetakan dan penerbitan. Para pemilik percetakan merasa keberatan dengan pasal-pasal yang sangat ketat dalam mengatur penerbitan yang intinya sangat membatasi ruang gerak mereka dalam mengatur usaha miliknya. Surat kabar di Surabaya yang pertamakali kena *Drukpers Reglemen* adalah surat kabar *Newsbode* edisi 3 tahun 1864. Surat kabar ini merupakan milik JJ. Nose yang pertamakali terbit tahun 1861 dengan skala terbit dua kali seminggu. Berita-berita yang sering diturunkan surat kabar ini sering berhubungan dengan peristiwa-peristiwa penting di tingkat lokal yang ada kaitannya dengan kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, seperti pembangkangan penduduk atau kerusuhan anak buah kapal.<sup>41</sup> Meskipun kajian Mirjam ini memberikan sebuah gambaran hidup mengenai perkembangan pers di Surabaya, namun keberadaan pers Tionghoa kurang disoroti.

---

<sup>39</sup> *Ibid.*, hlm., 30-70.

<sup>40</sup> *Staatsblad* No. 74, tahun 1856.

<sup>41</sup> Mirjam, *op. cit.*, hlm. 76.

Kajian kedua mengenai kehidupan pers di Surabaya adalah terbitan Serikat Penerbit Surat Kabar (SPSK) yang mencoba mendata lembaga-lembaga penerbitan yang pernah hidup di Hindia Belanda dari masa Kolonial Hindia sampai tahun 1949.<sup>42</sup> Kajian SPSK ini lebih banyak mengulas tentang perjalanan dan perkembangan surat kabar-surat kabar dari sisi isi surat kabar dan jumlah oplah yang diterbitkan. Perkembangan pers di Surabaya ini dibagi dalam periodisasi berdasarkan pada ras dan jaman di mana surat kabar itu pernah hidup. Berdasarkan ras surat kabar yang hidup di Surabaya terpolarisasi dalam tiga kelompok, yaitu surat kabar Belanda, surat kabar Tionghoa, dan surat kabar pribumi, sedangkan berdasarkan periodisasi surat kabar di Surabaya dibedakan menurut jamannya, yaitu jaman Kolonial Hindia Belanda, jaman Pendudukan Tentara Jepang, dan jaman Perang Kemerdekaan 1945-1949. Kajian SPSK ini memang lebih banyak menyajikan data-data tertulis daripada ulasan-ulasan mengenai bagaimana hubungan pers dengan masyarakat Surabaya atau tulisan berita-berita yang berkenaan dengan peristiwa-peristiwa lokal, akan tetapi mempunyai arti penting dengan adanya data-data lembaga-lembaga pers yang pernah hidup di Surabaya, sehingga gambaran kajian pers Tionghoa peranan penulis mempunyai gambaran yang cukup jelas dengan data-data yang dicatat oleh SPSK.

Surat kabar di Jawa Timur, pada masa kolonial Belanda, hamper semuanya berpusat di Surabaya. Catatan sejarah menunjukkan, surat kabar yang terbit antara tahun 1836 sampai tahun 1909, semuanya berbahasa Belanda dengan modal penerbitan dari orang-orang atau perusahaan-perusahaan Belanda, terutama pabrik gula. Surat kabar pada masa itu jarang diterbitkan setiap hari, paling hanya empat kali seminggu. Demikian H. Tatang Istiawan mencoba menggambarkan kehidupan pers di Jawa Timur dalam bukunya "*Pers Jawa Timur dari Masa ke Masa*".<sup>43</sup> Situasi kehidupan jurnalistik masa itu sudah ditandai kendala kebebasan

---

<sup>42</sup> Serikat Penerbit Surat Kabar Cabang Jawa Timur, *Sejarah Pers Di Jawa Timur*, (Surabaya: SPSK Jawa Timur, tanpa tahun).

<sup>43</sup> H. Tatang Istiawan (dkk), *Pers Jawa Timur dari Masa ke Masa*, (Surabaya, Serikat Penerbit Surat kabar, 1994).

pers, misalnya Soerat Kabar Bahasa Melayoe yang izin terbitnya diberikan khusus untuk pemuatan hal-hal yang hanya berhubungan dengan advertensi atau iklan saja, seperti jual-beli serta lelang barang-barang, kedatangan kapal di pelabuhan Jawa Timur, serta berita kelahiran dan kematian. Sebagian besar penerbitan pers dekade 1850-an mendukung pemerintah kolonial Belanda, dan dapat dikatakan semua surat kabar di Surabaya tidak berafiliasi dengan atau tidak bercorak politik tertentu. Juga tidak pernah muncul kritik terhadap kebijaksanaan pemerintah kolonial Belanda. Baru pada tahun 1856, terdapat gejala kecenderungan kritik terhadap penguasa. Memasuki dekade tahun 1860-an surat kabar-surat kabar di Surabaya mulai berurusan dengan pihak yang berwajib dengan ditandai munculnya berita-berita dan karangan yang bersifat menyerang pribadi-pribadi orang, atau mengkritik pemerintah Belanda. Dikotomi pers Tionghoa di Surabaya terlihat jelas sekitar tahun 1920-an, ketika sikap politik kaum Tionghoa terpecah menjadi dua, yaitu antara pers yang menyuarakan kaum Tionghoa totok dengan pers yang menyuarakan kaum Tionghoa peranakan. Pers kaum Tionghoa totok dengan suaranya yang reaksioner menjadi ciri khas surat kabar ini. Permusuhan ini didasarkan pada perbedaan perjuangan kaum Tionghoa dalam menanggapi kedudukan mereka di tanah Hindia Belanda. Kaum Tionghoa totok memusuhi kaum Tionghoa peranakan karena kedekatan mereka dengan kaum pribumi dan mendukung adanya gerakan nasionalisme di kalangan pribumi. Sebaliknya kaum Tionghoa peranakan mengecam pendirian kaum Tionghoa totok yang mencoba menjauhi kaum pribumi dan bersikap eksklusif sehingga menumbuhkan kebencian di antara kalangan pribumi.

### **1.6 Pendekatan dan Kerangka Teori**

Penulisan sejarah baru dapat dikatakan ilmiah jika menggunakan seperangkat alat untuk dijadikan media penganalisaan. Metode dan teori inilah yang berfungsi sebagai alat untuk menjelaskan berbagai persoalan yang terkait dalam peristiwa

sekaligus untuk menghubungkan atau membandingkan antara fakta satu dengan fakta yang lain, sehingga terbentuk suatu penulisan yang utuh.<sup>44</sup>

Setiap permasalahan yang muncul dalam penulisan skripsi ini dicoba didekati dengan menggunakan ilmu bantu, yaitu pendekatan sosiologi komunikasi massa. Sosiologi komunikasi massa merupakan sebuah disiplin baru yang berkembang akibat pengaruh media massa yang semakin berkembang pada masa sekarang. Proyek pengkajian sosiologi terhadap pengaruh media terhadap perubahan sosial, dahulu dikenal dengan sosiologi pers dengan (*Zeitungwesen*), dan ilmu yang membahas secara sosiologi gejala pers kemudian dikenal dengan “*Zeitungwissenschaft*”. Dekade 1930-an di negara Amerika muncul pendidikan jurnalistik di Washington College berkat rintisan Robert Lee yang lulusan lembaga pendidikan ini (di antaranya T. Siebert) berusaha mengembangkan teori-teori jurnalistik. Dengan latar belakang ilmu sosial mereka mulai mengulas tema jurnalistik sebagai gejala sosial. Melalui *Zeitungwesen* di Jerman dan jurnalistik di Amerika, perlahan-lahan sosiologi komunikasi massa berkembang sebagai disiplin tersendiri. Kehadiran media massa dalam masyarakat modern menarik minat para sosiolog untuk tidak mengabaikan peranan media massa. Mereka meneliti secara psikologis pengaruh media massa pada pembentukan opini dan sikap individual masyarakat. Mereka mempertanyakan bagaimana media massa mengembangkan norma-norma sosial, membentuk interaksi sosial, melakukan kontrol sosial, dan menimbulkan perubahan sosial. Dengan begitu sosiologi komunikasi massa berusaha menelaah hubungan timbal-balik antara media massa dengan masyarakat dengan mempertanyakan sejauh mana proses dan dinamika sosial dipengaruhi media massa, dan sejauh mana pula proses sosial mempengaruhi mekanisme kerja media massa.<sup>45</sup>

Pengertian komunikasi massa kadang-kadang tidak bisa didefinisikan secara jelas. Akan tetapi, jika mengacu proses aktivitas komunikasi didapat

---

<sup>44</sup>Sartono Katodirdjo, *Pendekatan Ilmu Sosial dalam Teori dan Metodologi Sejarah*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 1983), hlm. 2.

<sup>45</sup> Charles R. Wright, *Sosiologi Komunikasi Massa*, (Bandung: Rosdakarya, 1988), hlm. 1-2.

adanya media dan orang atau lembaga yang melakukan komunikasi. Dalam setiap proses komunikasi pasti terdapat komunikator, pesan (kata-kata), dan media transmisi, namun dalam pengertian komunikasi massa, komunikator, media transmisi, dan pesan yang disampaikan tidak sama dengan komunikasi biasa. Komunikator dalam media massa menurut definisi Jeremy Tunstall adalah petugas non-administratif (*non-clerical*) di dalam organisasi-organisasi komunikasi yang bekerja dalam memilih, menyusun, merencanakan program-program, cerita-cerita, dan pesan-pesan lainnya untuk disebarkan kepada khalayak (massa).<sup>46</sup> Massa, menurut Herbert Blummer adalah suatu kelompok yang anggota-anggotanya bisa berasal dari berbagai lapisan kehidupan, tingkatan sosial yang anonim dengan interaksi yang jarang atau pertukaran pengalaman antaranggota jarang sekali dan mereka secara fisik terpisah satu sama lainnya, sehingga kesempatan untuk bergabung seperti “crowd” (gerombolan) jarang terjadi, serta organisasinya bersifat longgar sehingga anggota-anggotanya tidak mampu untuk bertindak bersama atau secara kesatuan. Berdasarkan konsep massa Blummer tersebut dapat diidentifikasi sebuah massa harus memenuhi empat syarat, yaitu anggotanya terdiri dari berbagai lapisan sosial, anonim, interaksi yang longgar, dan anggotanya tidak mampu untuk bertindak bersama-sama.<sup>47</sup>

Berdasarkan batasan pengertian tersebut ‘komunikasi massa’ dapat dijelaskan berdasarkan sifat-sifat yang membentuk media, yaitu sifat khalayak, sifat bentuk komunikasi, dan sifat komunikator. *Pertama*, sifat khalayak komunikasi massa ditujukan ke arah khalayak luas, yang heterogen dan anonim. Definisi ini mengandung pengertian bahwa pesan-pesan ditujukan kepada individu-individu khalayak luas yang anonim. Karena khalayak luas mengandung pengertian yang relatif, maka perlu dispesifikasikan. Luas suatu khalayak apabila suatu komunikasi dilakukan selama suatu periode waktu tertentu dan selama periode waktu tersebut komunikator tidak dapat berinteraksi dengan khalayaknya secara tatap muka. Heterogen yang dimaksud dalam komunikasi adalah pesan-

---

<sup>46</sup> *Ibid.*, hlm. 3.

<sup>47</sup> *Ibid.*, hlm. 4.

pesan yang disampaikan media tidak semata-mata diarahkan pada khalayak elit atau eksekutif tertentu, tetapi berita yang dikomunikasikan diarahkan pada sekumpulan individu dengan berbagai posisi di dalam masyarakat, yang anggota-anggotanya terdiri dari berbagai jenis usia, jenis kelamin, tingkat pendidikan, dan sebagainya. Anomitas yang dimaksud di sini adalah bahwa anggota-anggota khalayak secara individual tidak dikenal atau tidak diketahui oleh komunikator.<sup>48</sup>

Sifat kedua adalah bentuk komunikasi massa. Komunikasi dilihat dari bentuknya sebagai komunikasi yang umum, cepat dan selintas. Keumuman yang dimaksud adalah pesan-pesan yang disampaikan bukan ditujukan kepada satu orang saja, tetapi isinya terbuka untuk setiap orang, yang orang-orang khalayak menyadari bahwa setiap anggota tidak peduli dari tingkatan usia, status, maupun pendidikan memperoleh pesan yang sama. Pesan komunikasi dikatakan cepat dalam arti bahwa pesan-pesan itu dimaksudkan untuk menjangkau khalayak luas dalam waktu relatif singkat. Sedang selintas yang dimaksud adalah bahwa pesan-pesan yang dikomunikasikan biasanya dibuat agar dapat dikonsumsi dengan segera, bukan untuk diingat, atau dengan kata lain berita yang disampaikan umumnya sekali pakai. Sifat ketiga adalah sifat komunikator. Komunikasi massa adalah yang terorganisasikan. Seorang komunikator di media massa bekerja melalui sebuah organisasi yang kompleks yang mengandung suatu pembagian kerja yang eksekutif dengan suatu biaya tertentu bersamaan dengan pekerjaan tersebut. Jadi dapat dikatakan batasan komunikasi massa dilihat dari sifat khalayak yang pesannya diarahkan kepada khalayak yang relatif luas, heterogen, dan anonim; dengan bentuk sifatnya yang pesan-pesannya disampaikan secara umum yang dapat menjangkau khalayak luas secara serempak dengan cepat dan selintas; dan komunikatornya cenderung sebagai sebuah organisasi yang kompleks yang berperan dengan mengandalkan modal besar.<sup>49</sup>

Sehubungan dengan itu, perkembangan dan hidup-matinya pers banyak ditentukan oleh kondisi dan sistem politik yang berlangsung di negara tempat pers

---

<sup>48</sup> *Ibid.*, hlm. 5.

<sup>49</sup> *Ibid.*, hlm. 6.

itu hadir. Hal tersebut tercermin dalam sistem pers yang berakar pada filsafat yang dianut oleh masing-masing negara. Teori diartikan bukan sebagai suatu sistem pandangan yang mirip aturan hukum, melainkan sebagai sejumlah gagasan yang status asalnya bervariasi dan dapat dipakai untuk menjelaskan atau menafsirkan fenomena. Oleh karena itu, teori yang dapat digunakan untuk menjelaskan penulisan skripsi ini adalah Teori Tanggung jawab Sosial (*Social Responsibility Theory*) dari Theodore Peterson.

Teori ini digunakan untuk menjelaskan bagaimana kehidupan pers dalam mengubah perilaku masyarakat ketika berkomunikasi. Teori ini menekankan pada tanggung jawab moral dan sosial orang-orang atau lembaga-lembaga yang menjalankan media massa, dalam hal ini adalah surat kabar. Tanggung jawabnya adalah kewajiban untuk memberikan informasi dan diskusi kepada publik tentang masalah-masalah sosial yang penting dan menghindari aktivitas-aktivitas yang merugikan masyarakat. Dari segi bahasa rakyat akan semakin dapat memahami bahasa yang digunakan dalam surat kabar, sehingga secara tidak langsung merubah pemahaman masyarakat akan bahasa yang dipakai. Menurut Theodore Peterson, teori tanggung jawab sosial menerima peran pers dalam melayani sistem politik, memberi penerangan kepada masyarakat dan menjaga hak-hak orang perorangan. Teori ini menerima peran pers dalam melayani sistem ekonomi, tetapi tidak menghendaki diprioritaskannya fungsi ini melebihi fungsi mendukung proses demokrasi atau memberikan penerangan kepada masyarakat.<sup>50</sup>

Sebagai media penerangan informasi, surat kabar mempunyai peranan yang sangat dominan pada masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Seperti yang dilakukan oleh Liem Koen Hian dalam menjelaskan kedudukan kaum Tionghoa peranakan di Surabaya. Melalui media yang awalnya Liem Koen Hian mencoba menerangkan kedudukan kaum Tionghoa peranakan di mata kaum pribumi. Liem Koen Hian, menyerukan agar kaum peranakan Tionghoa yang menganut nasionalisme Tiongkok menukar obyek orientasi mereka ke Indonesia

---

<sup>50</sup>Fred S. Siebert, Theodore Peterson, dan Wilbur Schramm, *Empat Teori Pers*, terj., (Jakarta: PT. Intermedia, 1986), hlm. 84.



dan bekerja untuk kemerdekaan Indonesia.<sup>51</sup> Gagasan Koen Hian ini kemudian mempengaruhi kelompok Tionghoa peranakan yang ada di Surabaya.

### 1.7. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode sejarah. Metode sejarah terdiri atas empat tahap yaitu; heuristik, kritik, interpretasi dan historiografi.<sup>52</sup> Heuristik adalah usaha untuk mencari dan mengumpulkan sumber sejarah. Sumber sejarah tersebut berasal dari sumber primer maupun sumber sekunder.<sup>53</sup> Sumber primer adalah sumber yang diperoleh dari pengamatan langsung terhadap peristiwa, sedangkan sumber sekunder adalah sumber yang berasal dari orang ketiga, buku-buku, literatur, koran dan majalah, atau tulisan-tulisan yang semasa dengan peristiwa yang dikaji.

Adapun sumber sejarah yang digunakan dalam penulisan ini terdiri dari dua macam, yaitu:

- a. Sumber primer, terdiri dari dua macam kategori, antara lain: berupa arsip dan dokumen-dokumen lain yang berhubungan langsung dengan obyek penulisan, yaitu surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan yang pernah terbit pada masa Kolonial Hindia Belanda, atau surat kabar-surat kabar sejaman yang menerangkan kehidupan pers Tionghoa peranakan.
- b. Sumber sekunder diperoleh dari buku-buku tentang pers yang ada di perpustakaan dan toko-toko buku yang tentunya isinya sudah mengalami banyak interpretasi dari masing-masing penulis.

Tahap kedua adalah kritik sumber. Pada tahap ini dimaksudkan untuk mendapatkan data yang otentik dan kredibel setelah melalui proses kritik baik dari segi ekstern maupun intern. Keotentikan data berarti bahwa sumber tersebut benar-benar dikeluarkan oleh orang atau organisasi yang namanya tertera dalam

---

<sup>51</sup> Leo Suryadinata, *Tokoh Tionghoa & Identitas Indonesia. Dari Tjoe Bou San Sampai Yap Thiam Hien* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm.76.

<sup>52</sup>Louis Gotschalk, *Mengerti Sejarah*, terj. Nugroho Notosusanto, (Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1982), hlm. 18.

<sup>53</sup>Louis Gotschalk, *ibid.*, hlm. 19.

sumber itu sendiri, sedang kredibel berarti seberapa jauh isi yang terkandung di dalamnya sungguh-sungguh dapat dipercaya.<sup>54</sup> Tahap selanjutnya (tahap ketiga) adalah interpretasi. Pada tahap ini dilakukan penafsiran dengan menggunakan ilmu bantu dan teori sebagai alat analisis guna memperoleh pengertian dan pemahaman terhadap obyek penulisan sejarah yang dikaji. Proses penafsiran sumber-sumber sejarah dilakukan dengan menggunakan teori-teori yang sudah disepakati bertujuan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang meliputi: “apa, siapa, kapan, dimana, bagaimana, dan mengapa.” Hasil interpretasi kemudian dituangkan dalam bentuk tulisan (tahap historiografi) dengan menggunakan bahasa Indonesia ragam baku ilmiah, sehingga diperoleh bentuk penulisan sejarah yang deskriptif-analitis. Deskriptif analitis yang dimaksud di sini adalah penulisan yang cermat terhadap fenomena sosial tertentu yang disertai dengan analisis kritis, mengembangkan konsep dan menghimpun fakta, tetapi tidak melakukan pengujian hipotesa.<sup>55</sup>

### **1.8. Sistematika Penulisan**

Penulisan skripsi ini dibagi dalam empat bab. Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang meliputi latar belakang kajian, kemudian dilanjutkan dengan menjelaskan masalah-masalah yang hendak dikaji yang terangkum dalam perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian yang dilakukan, ruang lingkup kajian, tinjauan pustaka, pendekatan dan kerangka teori yang digunakan untuk mendekati masalah kajian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab kedua menguraikan dinamika kehidupan etnis Tionghoa peranakan di Surabaya. Bab ini diawali dengan menjelaskan kondisi geografis tempat tinggal mereka, yaitu Kota Surabaya yang menjadi wilayah hunian kaum Tionghoa peranakan. Menurut catatan sejarah, keberadaan etnis Tionghoa peranakan di Surabaya sudah ada sejak abad ke-16 dan mereka mendiami daerah sepanjang

---

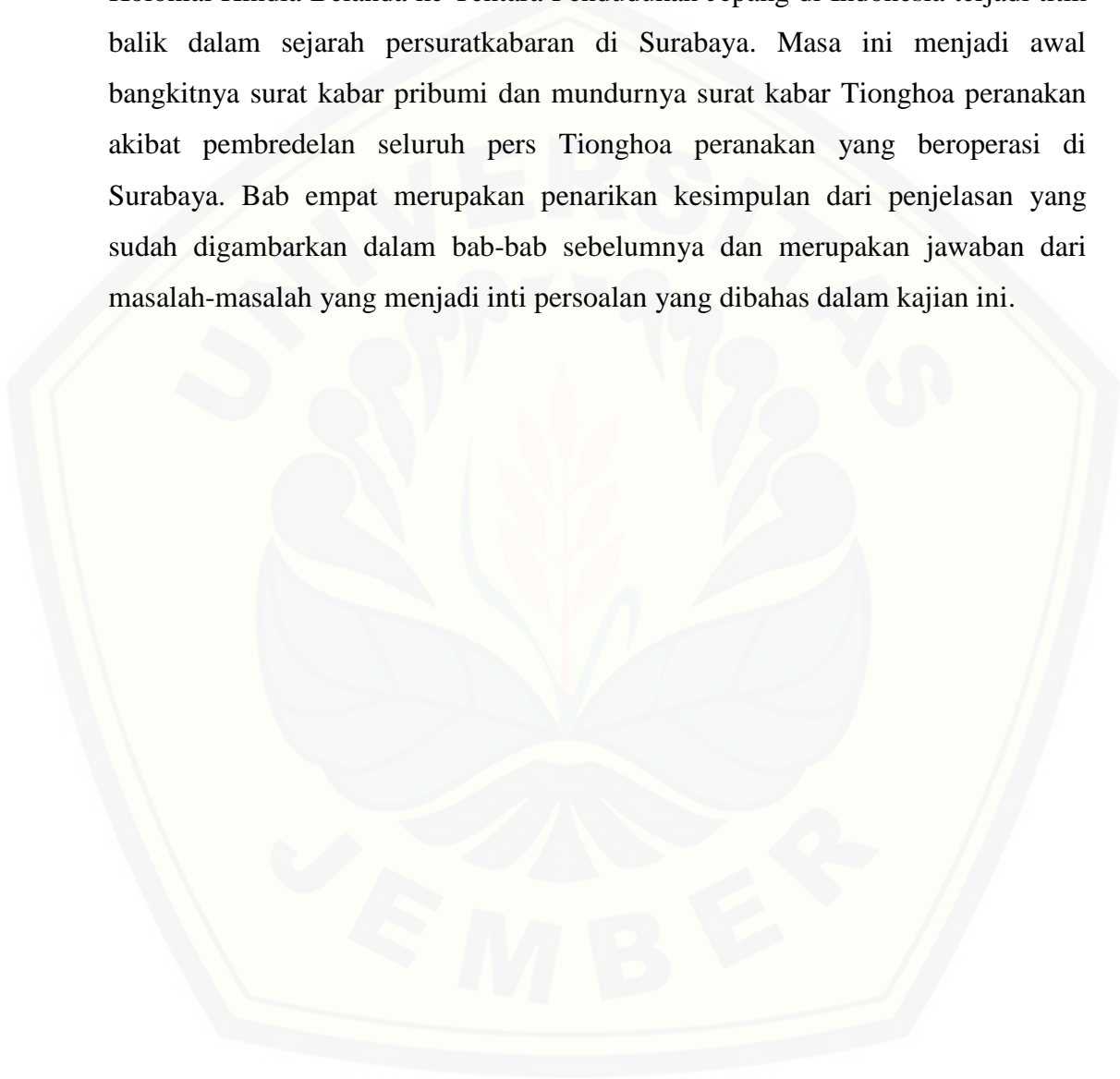
<sup>54</sup>Ibrahim Alfian, “Sejarah dan Permasalahan Masa Kini”, Pidato Pengukuhan Guru Besar Fakultas Sastra UGM, tanggal 12 Agustus 1985, hlm. 7.

<sup>55</sup>Singarimbun Masri, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: LP3ES, 1983) hlm. 4.

aliran Sungai Kalimas. Tempat hunian kaum Tionghoa peranakan ini lambat laun dikenal dengan kampung pecinan. Sejalan dengan perbaikan administrasi Kota Surabaya, kaum Tionghoa peranakan lebih banyak menghuni sebelah timur Sungai Kalimas, sedangkan sebelah barat kebanyakan dihuni oleh para pegawai pemerintahan Kota Surabaya. Sejak kedatangan mereka di Surabaya kaum Tionghoa peranakan lebih memfokuskan diri pada perekonomian perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang melarang kaum Tionghoa memiliki tanah garapan. Keadaan sosial ekonomi etnis Tionghoa peranakan ini kemudian mempengaruhi corak kehidupan pers Tionghoa peranakan. Kehidupan Pers di Surabaya sebelum munculnya kesadaran identitas etnis Tionghoa peranakan terpecah menjadi tiga kelompok yang masing-masing kelompok didasarkan pada ras. Pada masa Kolonial Hindia Belanda masyarakat Surabaya terbagi dalam tiga kelas berdasarkan ras, yaitu kelas Eropa, timur asing, dan pribumi. Perbedaan ras dalam kelas sosial di Surabaya ini berpengaruh dalam pendirian lembaga pers, yaitu pers yang Eropa, pers Tionghoa, dan pers pribumi. Kehidupan pers dengan karakteristik berdasarkan ras masing-masing ini menjadi penutup dalam bab 2.

Memasuki bab 3 akan diuraikan tentang kehidupan pers Tionghoa peranakan dalam masyarakat Surabaya yang diawali dengan munculnya gerakan nasionalisme kaum Tionghoa peranakan pada awal abad ke-20 yang kemudian diikuti oleh munculnya pers Tionghoa peranakan yang dikelola oleh orang Tionghoa peranakan sendiri. Bab ini dilanjutkan dengan menjelaskan arah berita pers Tionghoa peranakan dari perdagangan ke politik. Melalui pers yang lebih condong pada penyadaran identitas etnis, kaum Tionghoa peranakan terseret dalam arus politik dan kemudian terlibat dalam gerakan nasionalisme. Corak pers Tionghoa peranakan yang lebih dekat dengan pergerakan nasional kaum pribumi ini disuarakan oleh Lien Koen Hian dengan menurunkan berita-berita yang berisi gagasan tentang kebangsaan Indonesia. Gagasan kebangsaan Indonesia ini kemudian menjadi topik utama dalam berita-berita surat kabar Tionghoa peranakan dan dalam kalangan masyarakat Hindia Belanda. Munculnya gagasan kebangsaan yang diberitakan oleh surat kabar Tionghoa peranakan ini secara tidak

langsung mempengaruhi kaum nasionalis pribumi dalam penyadaran akan identitas mereka. Dampak adanya berita-berita yang bertopik gagasan kebangsaan dari surat kabar Tionghoa peranakan ini menjadi bahasan terakhir dalam bab tiga. Bersamaan dengan masuknya militer Jepang dan pergantian kekuasaan dari Kolonial Hindia Belanda ke Tentara Pendudukan Jepang di Indonesia terjadi titik balik dalam sejarah persuratkabaran di Surabaya. Masa ini menjadi awal bangkitnya surat kabar pribumi dan mundurnya surat kabar Tionghoa peranakan akibat pembredelan seluruh pers Tionghoa peranakan yang beroperasi di Surabaya. Bab empat merupakan penarikan kesimpulan dari penjelasan yang sudah digambarkan dalam bab-bab sebelumnya dan merupakan jawaban dari masalah-masalah yang menjadi inti persoalan yang dibahas dalam kajian ini.



## BAB 2

### DINAMIKA KEHIDUPAN ETNIS TIONGHOA PERANAKAN DI SURABAYA MASA KOLONIAL HINDIA BELANDA

#### 2.1 Kondisi Geografis Kota Surabaya Masa Kolonial Hindia Belanda

Surabaya merupakan salah satu kota tua di Indonesia. Bukti sejarah menunjukkan bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum orang-orang Eropa datang ke Indonesia. Bukti tersebut terdapat dalam Prasasti Trowulan I berangka tahun Saka 1280 (1358 M) sebagai nama desa yang termasuk dalam kelompok desa di tepi aliran sungai.<sup>1</sup> Ketika Surabaya berada di bawah kekuasaan Belanda, kota ini mengalami perkembangan pesat dan tumbuh menjadi kota modern. Surabaya berperan sebagai kota dagang, kota industri, dan kota pelabuhan yang dari waktu ke waktu berkembang pesat karena ditunjang oleh letak yang strategis di sepanjang aliran Sungai Brantas.<sup>2</sup>

Secara astronomi, Surabaya terletak antara  $07^{\circ}12'$ -  $07^{\circ}21'$  Lintang Selatan dan  $112^{\circ}36'$ -  $112^{\circ}54'$  Bujur Timur dengan dataran rendah yang mempunyai ketinggian 3-6 meter di atas permukaan air laut, kecuali di sebelah selatan membujur dari barat ke timur dua bukit landai yaitu Bukit Lidah dan

---

<sup>1</sup> Heru Sukardi, *Dari Hujunggaluh ke Churabhaya; Menggali Tanggal Lahir Kota Surabaya*, (Laporan Ilmiah Anggota Tim Penelitian Hari Jadi Kota Surabaya, 1977), hlm. 9.

<sup>2</sup> Sejarah mencatat bahwa hampir seluruh kegiatan penting berpusat di tepi sungai Brantas, mulai dari kerajaan Kanjuruhan, Kahuripan, Kediri, Singosari sampai Majapahit. Lihat, *Encyclopedi van Naderlandsche Indie* Vol. 4, (s'Gravenhage: Martinus Neihjoff, 1905), hlm. 297.

Gayungan dengan ketinggian 25-50 meter di atas permukaan laut. Secara administrasi, wilayah Surabaya dibatasi dengan wilayah-wilayah sebagai berikut: sebelah utara dibatasi dengan Selat Madura demikian pula dengan sebelah timur, di sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Sidoarjo, dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Gresik. Luas wilayah Kotapraja Surabaya tercatat 327,41 km<sup>2</sup>.<sup>3</sup>

Menurut hasil penelitian para ahli gambaran geografis wilayah Surabaya dapat dibagi menjadi dua, yaitu daerah pedalaman dan daerah pesisir. Daerah pedalaman dengan tanah vulkanisnya yang subur sangat berpotensi untuk lahan pertanian.<sup>4</sup> Keadaan ini didukung dengan adanya aliran sungai yang membelah wilayah Surabaya, yaitu Sungai Kalimas dan Sungai Pegirian. Daerah tepi kedua aliran sungai yang bermuara sampai ke Selat Madura di utara ini banyak dijadikan sebagai tempat tinggal masyarakat yang datang ke Surabaya. Sementara, daerah pesisir merupakan tempat pertemuan para pedagang yang datang dari berbagai wilayah di luar Kotapraja Surabaya, seperti Semarang, Gresik, Bali, Bugis, Kalimantan, Sumatera, dan daerah-daerah Indonesia lainnya.<sup>5</sup>

Perbedaan wilayah pesisir dan pedalaman tersebut pada perkembangan selanjutnya mempengaruhi dalam pembentukan karakteristik masyarakat. Daerah pesisir yang menjadi tempat aktivitas perdagangan merupakan tempat berkumpulnya orang-orang yang berbeda dalam etnis dan kebudayaan, sehingga dalam pola tempat tinggal mereka mengelompok berdasarkan kesamaan etnis dan kebudayaan. Kondisi yang demikian memunculkan perkampungan-perkampungan baru berdasarkan kesamaan etnis dan kebudayaan, seperti perkampungan Pecinan, Arab, Madura, dan Jawa. Perkampungan ini banyak didirikan di sepanjang aliran Sungai Kalimas dan Sungai Pegirian, seperti daerah Pegirian, Kapasan, Jembatan

---

<sup>3</sup> *Statistische Berichten der Gemeente Soerabaja Jaarnummer 1931*, (Soerabaja: Bureau van Statistiek, 1932), hlm. 1-2.

<sup>4</sup> Fransiscus Assisi Sutjipto Tjiptoatmodjo, "Kota-Kota Pantai Di Selat Madura; Abad XVII Sampai Medio Abad XIX", *Disertasi* tidak dipublikasikan (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1983), hlm. 243.

<sup>5</sup> *Ibid.*, hlm. 246.

Merah, Ampel, dan Perak. Pada akhirnya masyarakatnya berkembang menjadi masyarakat yang heterogen. Sementara, daerah pedalaman yang berfungsi sebagai daerah pertanian banyak terdapat di Surabaya bagian selatan membentuk masyarakat yang bersifat homogen yang dipengaruhi oleh sistem perekonomian sawah.<sup>6</sup>

Tempat tinggal untuk pejabat pemerintah Hindia Belanda dibangun secara permanen di sebelah barat sungai Kalimas. Sungai ini merupakan jalur transportasi air bagi para pedagang dari daerah pedalaman. Bahkan disebutkan sungai ini dapat dilewati kapal milik pedagang Tionghoa peranakan dengan tonase 50 ton menuju ke perkampungan Tionghoa peranakan di sebelah timur Sungai Kalimas.<sup>7</sup> Lebih lanjut dicatat wilayah Surabaya pada masa pemerintah kolonial Hindia Belanda dibagi menjadi tiga bagian, yaitu perkampungan Eropa, Tionghoa peranakan, dan Melayu, sementara perkampungan pribumi letaknya terpencar di sekitar sungai Kalimas.<sup>8</sup> Perkampungan Eropa terletak sisi barat sungai Kalimas dari selatan ke utara. Bagian baratnya berbatasan dengan perkampungan penduduk pribumi, seperti kampung Pekalongan, Gatotan, Krembangan, Kramat Ujung, Pesapen, Kalisasak, Dapuan, Tambak, Gringsing, Kebalen, dan Petukangan. Perkampungan Tionghoa peranakan, Melayu, dan Madura terletak di sepanjang sisi timur sungai Kalimas. Perkampungan Tionghoa peranakan berhadap-hadapan dengan perkampungan Eropa yang hanya dipisahkan oleh sungai Kalimas dan di sebelah timur berbatasan dengan perkampungan Jawa, seperti kampung Slompretan, Belakan Kidul, Wonokusumo, Belakan Lor, Pecantian, dan Gili. Kampung Melayu terletak di sebelah utara perkampungan Tionghoa peranakan. Kedua perkampungan ini sebelah timur dan utara berbatasan dengan perkampungan pribumi.<sup>9</sup>

---

<sup>6</sup> *Ibid.*, hlm. 249.

<sup>7</sup> *Ibid.*, hlm. 243.

<sup>8</sup> *Ibid.*, hlm. 244.

<sup>9</sup> *Ibid.*, hlm. 251.

Sementara itu, perkampungan pribumi yang menyebar kebanyakan mendiami daerah sungai Pegirian yang merupakan cabang dari sungai Kalimas sebelah utara. Perkampungan pribumi ini dibagi menjadi dua bagian yang dibatasi oleh aliran sungai Pegirian. Perkampungan pribumi di sisi barat sungai Pegirian berturut-turut dari selatan ke utara adalah Pasar Paseban, Pesawahan Baru, Ketapan, Ngampel, Kapuran, Pencarian, Nyamplungan, dan Girian. Semua perkampungan tersebut menjadi pembatas sebelah timur perkampungan Melayu, sedang perkampungan di sebelah timur sungai Pegirian adalah kampung Pandean, Sawahan, Srenganan, Kebon Topaten, Bata Putih, dan Kebon Dalam.<sup>10</sup>

Pada tahun 1906, wilayah Surabaya ditetapkan menjadi kotapraja yang diatur dalam Peraturan Negara No. 149 tanggal 1 Maret 1906. Dalam lembaran negara tersebut antara lain ditetapkan ibu kota pemerintahan dan batas-batas wilayahnya. Perkembangan wilayah Surabaya sebagai pusat pemerintahan wilayah Jawa Timur dipengaruhi oleh keberadaan Tanjung Perak sebagai tempat perhentian para pedagang. Kedekatannya dengan pelabuhan Tanjung Perak yang menjadi penghubung jalan laut menuju ke berbagai daerah di luar Jawa, memudahkan pihak pemerintah untuk berhubungan langsung dengan daerah-daerah di luar Surabaya. Di samping itu, pelabuhan Tanjung Perak sejak dahulu sudah menjadi salah satu bandar internasional perdagangan yang sarat didatangi oleh pedagang-pedagang asing.

## **2.2 Keberadaan Etnis Tionghoa Peranakan di Surabaya**

Orang Tionghoa peranakan secara umum diketahui sudah sejak lama mengenal bumi Nusantara. Berbagai sumber menerangkan bahwa mereka sudah sering melakukan hubungan perdagangan dengan penduduk pribumi nusantara,

---

<sup>10</sup> *Ibid.*, hlm. 252.



bahkan mereka melakukannya jauh sebelum kedatangan bangsa Barat.<sup>11</sup> Beberapa generasi kemudian, keturunan mereka melakukan hubungan perkawinan dengan penduduk pribumi dan menetap di berbagai wilayah Indonesia. Para imigran Tionghoa yang datang ke Indonesia ini berasal dari dua provinsi; yaitu provinsi Fukian dan Kwantung, sedangkan bahasa yang dipakai di Indonesia ada empat; yaitu bahasa Hokkien, Teo-Chiu, Hakka dan Kanton, sesuai dengan bahasa ibu (daerah) masing-masing. Imigrasi terbesar dimulai pada abad ke-16 sampai pertengahan abad ke-19. Imigran dari Hokkien, daerah propinsi Fukien bagian selatan, keturunannya banyak menempati Indonesia Timur, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Pantai Barat Sumatra. Mereka mempunyai keahlian dalam bidang perdagangan. Imigran lainnya berasal dari daerah pedalaman Provinsi Kwantung, yaitu Hakka (Khek) dan Teo-Chiu berasal dari pantai selatan Cina. Berdasarkan kondisi geografis daerah asal suku Hakka dan Teo-Chiu, pada umumnya berupa tanah kapur, sehingga suku ini lebih banyak mempunyai keahlian sebagai kuli (perkebunan).<sup>12</sup> Pada awal kedatangannya di Indonesia mereka ini banyak menempati daerah-daerah Indonesia bagian barat; seperti Sumatra Timur, Bangka dan Biliton serta distrik-distrik Kalimantan Barat. Semenjak dibukannya perkebunan di daerah Priangan tahun 1850-1930 dan daerah Jawa Barat lainnya serta perkembangan kota Jakarta, para imigran Hakka banyak yang pindah dan menetap di Jakarta dan Jawa Barat, sedangkan suku-bangsa Tionghoa peranan lain, yaitu dari Kanton (Kwang Fu), daerah administratif Kwantung, banyak menyebar di seluruh daerah-daerah Indonesia, tetapi sedikit sekali yang

---

<sup>11</sup> Benny G. Setiono, *Tionghoa Peranakan Dalam Pusaran Politik*, (Jakarta: Elkasa, 2002), hlm. 17-39. Dari hasil penelitian para ahli diketahui bahwa etnis Tionghoa peranakan yang ada berdomisili di Indonesia berasal dari empat suku bangsa. Empat suku bangsa Tiongkok itu mempunyai keahlian khusus masing-masing dan mendiami wilayah-wilayah di Indonesia antara lain: Hokkien yang mempunyai kepandaian berdagang, Teo Cu suku yang mempunyai kepandaian dalam bercocok tanam, Hakka yang mempunyai kepandaian dalam bidang pertambangan dan Kanton yang ahli dalam bidang pertukangan. Hidayat Z.M, *Masyarakat dan Kebudayaan Cina Indonesia*, (Bandung: Penerbit Tarsito, 1984), hlm. 75.

<sup>12</sup> Peter Carey, *Orang Jawa dan Masyarakat Cina 1755-1825*, (Jakarta: Pustaka Azet, 1986), hlm. 23; P. Hariyono, *Kultur Cina dan Jawa, Pemahaman menuju Asimilasi Kultural*, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1993).

berdomisili di Jawa Barat, Jawa Timur, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur, Bangka, dan Sumatera Tengah. Mereka mempunyai keahlian dalam bidang pertukangan (bangunan), pemilik toko-toko besi, dan industri kecil.

Keturunan mereka, yang lebih dikenal dengan Tionghoa peranakan,<sup>13</sup> kebanyakan berasal dari suku-bangsa Hokkien. Hal ini karena mereka sudah lama berdomisili di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka merupakan angkatan pertama yang bermigrasi ke Indonesia, yang kebanyakan di antaranya terdiri dari kaum laki-laki, dan kemudian melangsungkan perkawinan dengan perempuan-perempuan pribumi (penduduk lokal). Para imigran yang datang kemudian, yaitu ketika terjadi pergolakan politik di Tiongkok tahun 1920-1930, banyak yang masih membawa kebudayaan asli mereka sehingga sulit untuk berakulturasi dengan penduduk lokal. Mereka ini yang lebih dikenal dengan Tionghoa totok.

Perbedaan antara Tionghoa peranakan dengan Tionghoa totok sepintas lalu memang sangat sulit, jika diperhatikan secara seksama akan terlihat bedanya, perbedaan itu terlihat pada lafal atau ucapan yang agak kaku dalam berbahasa Indonesia, kehidupan sosial budaya dalam corak pendidikan serta dalam adat istiadat lainnya.<sup>14</sup> Mengenai identitas, mengambil konsep Skinner tentang identifikasi diri, banyak Tionghoa peranakan yang tidak mau disebut Cina, tetapi menyebut mereka dengan istilah peranakan yang lahir di luar daratan Tiongkok.<sup>15</sup> Istilah totok dalam arti sempit digunakan untuk menyebut kaum imigran yang

---

<sup>13</sup> Istilah Tionghoa “Peranakan” ini menunjukkan golongan atau orang yang berasal dari keturunan campuran yang biasanya lahir dari ayah Cina dan ibu pribumi. Untuk lebih jelasnya lihat Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa 1917-1942*, terj. F.S. Hardoyo, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, cet, ke-2, 1994), hlm. 24. Selanjutnya disingkat “Politik Tionghoa”.

<sup>14</sup> Hidayat Z. M, *op. cit.*, hlm. 101.

<sup>15</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa peranakan*, (Jakarta: Grafiti Pers, 1984), hlm., xviii. Guna membedakan dengan sumber yang sama selanjutnya disingkat Suryadinata, *Dilema...*

dilahirkan diluar wilayah Indonesia, tetapi dalam arti luas adalah meliputi keturunan imigran yang berorientasi ke negara aslinya.<sup>16</sup>

Tionghoa totok menurut Skinner adalah mereka yang orientasi kebudayaan masih berintikan kebudayaan asli Tionghoa.<sup>17</sup> Mereka sering menggunakan Bahasa Tiongkok dalam berkomunikasi dengan sesama Tionghoa, kepercayaan terhadap leluhur sangat kuat dan dalam bahasa setempat mereka tidak menguasai sehingga menyulitkan untuk berintegrasi dengan masyarakat setempat (pribumi). Lain dengan Tionghoa peranakan yang sudah tidak terlalu berorientasi dengan negeri leluhur, mereka dalam pergaulan tidak segan-segan untuk menjadi orang Jawa.<sup>18</sup> Orientasi kebudayaan Tionghoa peranakan berintikan kebudayaan dimana mereka dilahirkan dan dibesarkan, yaitu menggunakan bahasa daerah setempat dalam berkomunikasi sehari-hari. Berdasarkan pola kehidupan orang Tionghoa totok lebih rajin dan hemat dalam membelanjakan hartanya karena Tionghoa totok dalam segala macam pekerjaan dilakukan sendiri atau dikerjakan dengan kerabat keluarganya sendiri.

Tionghoa peranakan merupakan hasil keturunan campuran antara ayah Tionghoa dan ibu pribumi. Tionghoa peranakan ini dalam orientasi hidup mengikuti kebudayaan ibu, berbahasa dan berperilaku seperti adat kebiasaannya ibu-ibu mereka, hanya dalam menghormati leluhur mereka mengikuti jejak ayah mereka. Keturunan Tionghoa peranakan dari hasil perkawinan campuran ini menjadikan mereka tidak jelas dalam identitas diri, dan terus berlanjut sampai pada masa kemerdekaan dan berimbas pada masalah politik yang selalu

---

<sup>16</sup> Dengan kata lain istilah "Totok" menunjukkan golongan orang Tionghoa yang di lahirkan di daratan Tiongkok dan dalam orientasinya lebih condong ke daratan Tiongkok. Golongan ini lebih banyak datang ke Indonesia sebagai imigran sesudah abad ke-20. Satu-satunya tanda kebudayaan yang dapat dipercaya dari pernyataan diri sebagai orang Tionghoa dan penyatuan diri ke dalam sistem sosial Tionghoa adalah pemakaian, setidaknya-tidaknya dalam beberapa bentuk dan keadaan, nama keluarga Tionghoa. Suryadinata, "Politik Tionghoa", *ibid*, hlm. 25.

<sup>17</sup> Mely G. Tan. *Golongan Etnis Tionghoa peranakan di Indonesia*, (Jakarta: Leknas LIPI, 1981), hlm. 11.

<sup>18</sup> Onghokam. *Rakyat dan Negara*, (Jakarta : Penerbit Sinar Harapan, 1983), hlm. 29.

memojokkan Tionghoa peranakan yang ada di Indonesia. Kesenjangan ekonomi yang menonjol pada etnis Tionghoa peranakan atas orang pribumi, mereka dipaksa dengan halus untuk melakukan pembauran dengan masyarakat Jawa dan Madura. Selain itu orang-orang Tionghoa peranakan tidak diizinkan lagi bernegosiasi selain untuk keperluan olah raga, keagamaan atau kematian. Tionghoa peranakan dilarang merayakan peristiwa budaya yang bersifat rasialis, yaitu merayakan tahun baru imlek, berorganisasi atau perayaan lainnya. Tentu saja proses itu menyakitkan bagi Tionghoa peranakan.

Mereka pada umumnya membuka toko dan banyak pula yang menjadi pedagang kelontong yang masuk daerah pedesaan dengan cara mengkreditkan barang-barang pada masyarakat dengan harga yang tinggi. Pekerjaan yang dilakukan golongan ini oleh penduduk setempat disebut *minding*. Pada masa Kolonial Hindia Belanda orang Tionghoa peranakan sangat diuntungkan dengan pembagian kelas berdasarkan kesukuan. Mereka dimasukkan dalam kelas Timur Asing, yaitu suatu kelas di tengah-tengah kelas Eropa dan kelas Pribumi. Keadaan ini memudahkan orang Tionghoa peranakan dalam melakukan interaksi dengan kedua kelas tersebut, sehingga mereka dapat melayani kebutuhan ekonomi orang-orang Eropa dan penduduk lokal tanpa kesulitan. Dengan adanya kebijakan pemerintah Belanda yang melarang orang Tionghoa peranakan untuk bergelut pada perekonomian di luar perdagangan menjadikan mereka lebih leluasa dalam menjalankan aktivitas perdagangan. Lambat laun mereka mulai menguasai sektor-sektor perdagangan seperti kebutuhan sehari-hari.<sup>19</sup>

Awal kedatangan etnis Tionghoa di Surabaya dapat diketahui dari riwayat keluarga yang tercatat dalam kelenteng yang berdiri di daerah Kapasan. Menurut riwayat keluarga Tjoa etnis Tionghoa datang ke Surabaya sejak abad ke-17. Pada waktu itu mereka sudah melakukan hubungan dengan kaum pribumi. Hubungan ini kemudian berlanjut sampai pada perkawinan dengan wanita pribumi dan membuka lahan tempat pemukiman baru di daerah pinggir aliran sungai

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 113 .

Kalimas.<sup>20</sup> Kasus ini terjadi pada keluarga Tjoa yang pertama kali datang ke Surabaya pada tahun 1753 dan kemudian menikah dengan saudara perempuan Bupati Surabaya.<sup>21</sup> Usaha perdagangan beras merupakan jenis usaha turunan keluarga yang banyak dikelola oleh Tionghoa peranakan Surabaya. Salah satu keluarga yang menggeluti jenis usaha ini sejak lama adalah keluarga Tjoa. Keturunan Tjoa dari garis ibu merupakan keturunan bupati Surabaya, karena Tjoa Kwie Soe menikah dengan Nyai Roro Kindjeng (saudara perempuan Bupati Surabaya Raden Adipati Tjondro Negoro) atau putri Kiai Tumengung Onggo Djoyo (Bupati Pasuruan). Keluarga Tjoa ini menempati daerah Pecinan Kulon, yaitu di Jl. Bibis yang dekat dengan pusat perdagangan beras di dekat Kantor Bupati Surabaya. Kedekatannya dengan penguasa dan pusat perdagangan beras menjadikan keluarga Tjoa mendirikan usaha penggilingan padi.<sup>22</sup>

Keturunan keluarga Tjoa ini secara tidak langsung menurunkan darah pribumi dari garis ibu, dan ini menjadikan mereka semakin dekat dengan kaum pribumi.<sup>23</sup> Jalinan hubungan kedekatan antara Tionghoa peranakan dengan kaum pribumi ini berlangsung hingga awal abad ke-20. Ketika terjadi gerakan nasionalisme kaum Tionghoa peranakan, daerah Surabaya juga tidak luput dari imbas gerakan nasionalisme tersebut, namun pengaruh gerakan nasionalisme di daerah Surabaya tidak begitu besar, karena kebanyakan kaum Tionghoa peranakan daerah ini merupakan keturunan campuran antara bapak Tionghoa peranakan dengan ibu pribumi. Dengan demikian terdapat kedekatan emosional

---

<sup>20</sup> Tan Beng Kok, *Memoar Ang Yan Goan 1894-1984; Tokoh Pers yang Peduli Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: kerjasama Yayasan Nabil dengan Hasta Mitra, 2009), hlm. 155.

<sup>21</sup> Dukut Imam Widodo, *Soerabaia Tempo Doeloe Jilid II*, (Surabaya: Dinas Pariwisata, 2002), hlm. 271.

<sup>22</sup> *Ibid.*, hlm. 486-487.

<sup>23</sup> Salah satu keturunan Tjoa ini kemudian menjadi pemilik surat kabar yang dibeli dari orang Belanda di Surabaya, Tjoa Sik Ie. Tan Beng Kok, *Memoar Ang Yan Goan 1894-1984; Tokoh Pers yang Peduli Pembangunan Bangsa*, (Jakarta: kerjasama Yayasan Nabil dengan Hasta Mitra, 2009), hlm. 152.

antara orang Tionghoa peranakan dengan kaum pribumi yang sudah dianggap sebagai saudaranya.<sup>24</sup>

Memasuki abad ke-20, Kotapraja Surabaya berkembang menjadi kota perdagangan yang besar dan ramai. Perkembangan ini semakin tampak dari sifatnya sebagai kota dagang dan masyarakatnya yang semakin beragam. Sejak ditetapkannya Surabaya menjadi kotapraja pada tahun 1906, secara administratif terdapat dua lembaga pemerintahan lokal di Surabaya. *Pertama*, pemerintah kotapraja yang bertugas mengatur urusan-urusan yang berhubungan dengan kota serta masyarakat Eropa Timur dan Timur Asing. *Kedua*, pemerintah pamong praja yang mengatur urusan-urusan masyarakat pribumi.<sup>25</sup>

Saat itu jumlah penduduknya pun mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Kalau pada tahun 1920 jumlahnya hanya 193.492 jiwa, maka pada tahun 1930 menjadi 342.439 jiwa, sehingga terjadi peningkatan sebesar 76,97 % atau rata-rata 7,69 % per tahun. Sebagian besar pertambahan penduduk disebabkan oleh faktor migrasi yang masuk ke kota Surabaya. Jumlah migrasi masuk bagi orang asing diperkirakan mencapai 6,41 kali jumlah kelahiran, yaitu 11.263 jiwa. Sedangkan migrasi keluar hanya separuhnya, yaitu 5.899 jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk paling pesat terjadi pada kelompok orang Tionghoa peranakan. Bila dibandingkan dengan kelompok imigran lain, Arab dan India, masyarakat Tionghoa peranakan menempati jumlah terbesar. Hal ini dapat dilihat dari data pada tahun 1920, di mana penduduk Tionghoa peranakan di Surabaya berjumlah 18.020 orang, sedangkan Arab 2.539 orang, dan etnik Timur Asing lainnya 165 orang. Dengan demikian dapat dikatakan etnis Tionghoa

---

<sup>24</sup> Suryadinata, *op.cit.*, hlm. 90.

<sup>25</sup> Pada masa pemerintah Kolonial Belanda, struktur pemerintah di setiap daerah Indonesia dibagi menjadi dua sistem pemerintahan, *pertama* sistem pemerintahan Kotapraja yang dipimpin oleh seorang regent dan bertanggung jawab kepada Gubernur Jenderal di Batavia. Regent ini bertugas untuk mengatur masyarakat Eropa dan Timur Asing; *kedua* sistem pemerintahan Pamong Praja yang dipimpin oleh seorang Demang dan bertanggung jawab kepada Residen. Demang bertugas untuk mengatur masyarakat pribumi. Hadinoto, *Perkembangan Kota dan Arsitektur Kolonial Belanda di Surabaya 1870-1940*, (Yogyakarta: Andi Offset, 1996), hlm. 21.

peranakan mengalami peningkatan jumlah penduduk sampai 136,83% atau rata-rata 13,68% per tahun.

Kecenderungan peningkatan penduduk ini diperkuat dengan adanya pembangunan industri dan perusahaan-perusahaan besar lainnya. Sebagai kota satelit di wilayah Jawa Timur, Surabaya menjadi pusat urbanisasi masyarakat dari daerah lain dan menjadi tempat tujuan untuk menempati dan mendiami wilayah ini. Keberadaan pembangunan industri, telah menjadi daya tarik tersendiri bagi penduduk di daerah sekitar Surabaya untuk mencari lahan pekerjaan, sehingga dalam jangka waktu sepuluh tahun terakhir masa pemerintahan Kolonial Belanda, secara keseluruhan mulai tahun 1930 sampai tahun 1940 terjadi peningkatan jumlah penduduk yang begitu pesat. Peningkatan jumlah penduduk di Surabaya tersebut dapat dilihat dalam tabel berikut.

**Tabel 2.1: Jumlah Penduduk Kotapraja Surabaya Tahun 1930-1940**

Tahun	Eropa	Tionghoa	Arab	Vr. Ost	Pribumi	Total
1930	26.502	42.678	4.994	1.303	265.872	342.439
1931	27.628	43.288	5.298	1.384	270.000	351.598
1932	26.411	40.781	5.643	1.444	274.000	352.129
1933	26.882	39.792	5.227	1.521	280.000	357.362
1934	27.297	40.792	5.175	1.519	286.000	365.524
1935	27.599	41.749	5.209	1.152	290.000	370.709
1936	28.548	43.650	4.998	900	294.000	377.096
1937	29.783	46.219	4.961	890	294.000	380.853
1938	30.687	43.779	4.921	929	294.000	390.989
1939	32.601	45.767	5.148	968	300.000	390.984
1940	34.576	47.884	5.242	1.027	308.000	396.720
%	30,46%	12,19%	4,96%	-21,18%	15,84%	15,85%
Rata-Rata / Tahun	3,04%	1,21%	0,49%	-2,11%	1,58%	1,58%

Sumber: Anjarwati Noordjaah, *Komunitas Tionghoa peranakan di Surabaya, 1900-1946*, (Semarang: Mesias, 2004), hlm., 9.

Berdasarkan tabel di atas, dalam jangka sepuluh tahun, jumlah penduduk Surabaya meningkat 15,85% atau rata-rata 1,58% per tahun. Seperti yang sudah disebutkan di atas pesatnya peningkatan jumlah penduduk Surabaya dalam

sepuluh tahun terakhir dari tahun 1930 sampai 1940 ini dipengaruhi urbanisasi masyarakat dari daerah lain ke Surabaya dalam rangka mencari kerja. Sebagai pusat industrialisasi Surabaya menjadi tempat tujuan bagi masyarakat daerah lain. Hal ini diperlihatkan oleh tabel di atas, di mana masyarakat pribumi mengalami peningkatan pesat, yaitu mulai tahun 1930 tercatat 265.872 jiwa menjadi 308.000 jiwa pada tahun 1940, sehingga dapat dikatakan peningkatan jumlah penduduk pribumi mencapai 15,84% atau rata-rata per tahun 1,58%.

Jumlah peningkatan penduduk pribumi di Surabaya tidak sebanyak jumlah peningkatan penduduk Eropa yang dalam sepuluh tahun mencapai 30,45% atau rata-rata 3,04% per tahun. Peningkatan di kelompok masyarakat Eropa ini dipengaruhi oleh kedatangan para pegawai administrasi yang mengurus masalah pemerintahan kota Surabaya. Sejak Surabaya dijadikan Kotapraja pada tahun 1906 secara administratif pemerintah membutuhkan banyak tenaga ahli yang dapat mengurus pemerintahan Kota Surabaya. Kedatangan orang-orang Eropa ini biasanya diiringi dengan keluarga mereka, sehingga tidak mengherankan kelompok masyarakat Eropa mengalami peningkatan yang begitu pesat selama sepuluh tahun terakhir. Hal ini juga diiringi oleh berdirinya lembaga pendidikan, industri, dan lembaga persuratkabaran yang semuanya cenderung ditangani oleh orang-orang Eropa.<sup>26</sup>

Sementara itu, masyarakat Tionghoa menduduki peringkat ketiga dalam jumlah penduduk yang pada tahun 1930 tercatat 42.678 jiwa menjadi 47.884 jiwa pada tahun 1940. Secara prosentase peningkatan jumlah penduduk masyarakat Tionghoa mencapai 12,19% selama sepuluh tahun atau 1,21% per tahun.

---

<sup>26</sup> Akhir abad ke-19 pemerintah Kolonial Hindia Belanda mendirikan pendidikan formal sebagai manifestasi dari Kebijakan Etis (*Ethische Politiek*) yang memberikan kesempatan bagi masyarakat Hindia Belanda untuk mendapatkan pendidikan dengan mengikuti pola pendidikan yang diterapkan di negara induk (Belanda). Pendirian sekolah-sekolah ini secara otomatis membutuhkan tenaga pengajar dari orang-orang Eropa. Lihat John Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan; Peranan Kelompok Sjahrir*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1993), hlm., 57. Bersamaan dengan itu berdiri juga lembaga persuratkabaran dan industri yang semuanya ditangani oleh orang-orang Eropa. Untuk permasalahan ini lihat Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 45.



Peningkatan jumlah penduduk Tionghoa ini dipengaruhi oleh kedatangan imigrasi dari daratan Tionghoa pada akhir abad ke-19. Perkembangan jumlah penduduk pada masyarakat Arab dan Indo-Eropa (Vr. Ost) justru mengalami pasang surut. Pada masyarakat Arab, selama tiga tahun pertengahan, yaitu mulai tahun 1936 sampai 1938 mengalami perkembangan yang lambat. Ketidakstabilan perkembangan jumlah penduduk pada masyarakat Arab dan Indo-Eropa dimungkinkan karena banyak diantara masyarakat Arab yang kembali ke tanah airnya untuk melakukan ritual keagamaan, yaitu ibadah haji ke Makkah, dan di antara masyarakat Indo-Eropa banyak yang mengikuti orang tuanya kembali ke negaranya.<sup>27</sup> Secara garis besar, komposisi penduduk Surabaya dari tahun 1930-1940 dapat dibedakan menjadi lima golongan sebagai berikut: (1) Golongan Penduduk Eropa; (2) Golongan Penduduk Tionghoa; (3) Golongan Penduduk Arab; (4) Golongan Penduduk Indo-Eropa (Vr. Ost); dan (5) Golongan Penduduk Pribumi. Sementara penduduk pribumi yang mendominasi wilayah Surabaya bisa dikatakan terdiri dari suku Jawa dan suku Madura.<sup>28</sup>

### **2.3 Kondisi Sosial Ekonomi Etnis Tionghoa Peranakan Masa Kolonial Hindia Belanda**

Secara umum, etnis terbesar dari penduduk kota Surabaya adalah orang Jawa. Pemerintah kolonial tidak pernah menggolongkan orang Jawa sebagai golongan etnis tersendiri, tetapi menjadi satu kesatuan dari golongan penduduk yang disebut *Inheemschan* dan secara politis dijuluki sebagai *Inlander* (Pribumi). Sebutan tersebut kurang lazim dan cenderung merendahkan (*pejorative*). *Inheemschan* atau *Inlander* tidak mengacu kepada salah satu etnis atau suku di Hindia Belanda, tetapi merupakan sebutan umum untuk membedakan dengan orang-orang Eropa, Tionghoa, Arab, atau Timur Asing. Dengan demikian, maka yang disebut dengan

---

<sup>27</sup> Fransiscus Assisi, *op.cit.*, hlm. 260.

<sup>28</sup> Andjarwati Noordjaah, *Komunitas Tionghoa peranakan di Surabaya, 1900-1946*, (Semarang: Mesias, 2004), hlm., 11.

*Inheemschan* atau *Inlander* di kota Surabaya mengacu kepada orang Jawa, serta pendatang dari Madura, Bali, Lombok, Maluku, Sulawesi, dan Sumatera.

Mayoritas penduduk di kota Surabaya secara kultural merupakan orang Jawa dan sebagian orang Madura. Golongan etnis lain adalah minoritas. Mereka terdiri dari orang-orang yang lahir di kota tersebut serta para pendatang dari berbagai kabupaten di sekitar kota Surabaya. Para pendatang datang ke kota Surabaya dengan berbagai alasan, namun rata-rata alasan utama mereka adalah untuk mencari penghidupan yang lebih baik. Pendatang dari Madura, terutama dari Bangkalan, jumlahnya sangat banyak. Menurut Kuntowijoyo, tradisi merantau orang Madura sudah berlangsung sejak lama. Kondisi pulau Madura yang tandus membuat kehidupan di pulau tersebut cukup sulit, sehingga sebagian besar penduduknya memilih merantau ke tempat lain. Mereka yang memilih merantau ke kota Surabaya, sebagian besar memilih menjadi kuli angkut di pelabuhan.<sup>29</sup> Menurut John Ingleson, sekitar 10.000 pekerja di pelabuhan Surabaya pada tahun 1920-an, berasal dari Madura.<sup>30</sup> Oleh karena jumlahnya yang cukup banyak di kota Surabaya, budaya dan perilaku orang Madura cukup mempengaruhi budaya dan perilaku masyarakat kota Surabaya. Mereka terkenal pemberani, agak berangasan dan cenderung *ugal-ugalan*, serta apa adanya (terus terang/tidak ada yang disembunyikan). Logat dan bahasa orang-orang Madura mempengaruhi logat dan bahasa masyarakat kota Surabaya pada umumnya.<sup>31</sup>

Asal-susul orang Bali dan Lombok di kota Surabaya kemungkinan besar berkaitan dengan perdagangan budak yang terjadi pada abad ke-18 sampai awal abad ke-19. Pada tahun 1839, di kota Surabaya terdapat 1.506 budak yang dipekerjakan di keluarga-keluarga Eropa. Keluarga-keluarga tersebut

---

<sup>29</sup> Kuntowijoyo, *Perubahan Sosial dalam Masyarakat Agraris: Madura 1850-1940*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2002), hlm., 75-82.

<sup>30</sup> John Ingleson, *Tangan dan Kaki Terikat: Dinamika Buruh, Sarekat Kerja dan Perkotaan Masa Kolonial*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2004), hlm., 4.

<sup>31</sup> Mien Ahmad Rifai, *Manusia Madura: Pembawaan, Perilaku, Etos Kerja, Penampilan, dan Pandangan Hidupnya seperti Dicitrakan Perubahannya*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2007), hlm., 55.

mendapatkan budak dari pelelangan. Pada tahun 1850-an perdagangan budak di kota Surabaya dilarang. Sebagian besar bekas budak kemudian menjadi orang bebas di kota tersebut.<sup>32</sup> Keberadaan orang-orang Maluku/Ambon di kota Surabaya, sebagian besar adalah orang-orang yang direkrut menjadi tentara KNIL oleh pemerintah kolonial Belanda, dan sebagian kecil adalah orang-orang bebas yang merantau ke kota Surabaya atas kemauan sendiri. Secara sosial dan kultural, orang Ambon diposisikan cukup istimewa oleh pemerintah kolonial Belanda, dan kadang tidak dianggap sebagai bagian dari kelompok masyarakat Bumiputra (*Inlander*), tetapi dikelompokkan tersendiri. Mereka memperoleh prioritas dan hak istimewa yang tidak dimiliki oleh etnis Bumiputra lainnya. Tidak ada data yang pasti, berapa jumlah orang Ambon di kota Surabaya pada masa kolonial. Pada tahun 1920, jumlah orang Ambon yang direkrut menjadi tentara KNIL berjumlah 8.881 orang, yang tersebar di seluruh Indonesia.<sup>33</sup>

Orang-orang dari Sumatera banyak juga yang menetap di kota Surabaya. Keberadaan pemukiman orang-orang Melayu (*Maleische Kamp*) di kota ini menunjukkan bahwa eksistensi orang dari Sumatera cukup diakui. Salah satu tokoh masyarakat Sumatera di kota ini, yaitu Radjamin Nasution Kemala Pontas, menjadi wakil walikota pada masa penjajahan Jepang, dan diangkat menjadi walikota pada awal kemerdekaan. Orang-orang Sumatera di kota Surabaya sebagian besar berprofesi sebagai pedagang. Tidak ada data yang menunjukkan jumlah mereka secara jelas. Orang-orang Sulawesi juga banyak yang menetap di kota Surabaya. Sebagian dari mereka adalah orang-orang kapal yang kemudian memilih menetap di kota Surabaya dan orang-orang yang sengaja merantau ke kota ini untuk mencari penghidupan, sebagian lagi adalah orang-orang yang menuntut ilmu di kota ini tapi setelah selesai tidak mau kembali ke daerah asalnya. Beberapa pelajar yang belajar di kota Surabaya dan akhirnya menetap di

---

<sup>32</sup> G.H. von Faber, *Oud Soerabaia & Nieuw Soerabaia*, (Soerabaia, NV. Boekhandel en Drukkery H. van Ingen Busum, 1931), hlm., 63-64.

<sup>33</sup> Eni Sugiarti, *Orang-orang Ambon di Surabaya 1930-1945*. (Yogyakarta: Eja Publisher, 2009), hlm., 75.

kota ini adalah J.K. Lengkong, S. Ngion, dan F.L.S. Ratulangi, yang pada awal tahun 1930 diangkat sebagai anggota Gemeenteraad Surabaya.<sup>34</sup>

Orang-orang Tionghoa di kota Surabaya merupakan perantau yang sudah sangat lama tinggal di kota ini. Orang-orang Eropa yang paling awal datang di kota Surabaya sudah melihat orang-orang Tionghoa di kota ini. Umumnya mereka datang dari Fukkian (Hokkian) dan dari Kwantung (Kanton). Profesi mereka sangat beragam, mulai dari pedagang, tukang kayu, tukang logam, pengelola penggilingan beras, pengelola tanah pertanian, bandar candu, dan lain-lain.<sup>35</sup> Pada awal abad ke-20, terjadi kenaikan penduduk Tionghoa di kota Surabaya. Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh faktor eksternal. Pada tahun 1920-an di daratan Tiongkok terjadi kekacauan politik. Para pendukung Kuomintang ditangkapi oleh pemerintah Ch'iang Kai Sek. Akibatnya, ribuan pendukung Kuomintang melarikan diri ke luar negeri, dan sebagian dari mereka menuju ke kota Surabaya.<sup>36</sup> Krisis ekonomi tahun 1930 juga menjadi pemicu kenaikan penduduk golongan etnis Tionghoa di Surabaya. Banyak orang Tionghoa yang bekerja di perkebunan di Sumatera dan Kalimantan menjadi korban pemutusan kerja akibat krisis ekonomi. Sebagian dari mereka kemudian merantau ke kota-kota di Jawa, salah satunya ke kota Surabaya.

Berdasarkan kebijakan pemerintah Kolonial Belanda yang tercantum dalam *Regerings Reglement* (Peraturan Pemerintah) 1854, masyarakat Surabaya dapat dibagi dalam tiga lapisan. Lapisan pertama ditempati oleh orang-orang Belanda dan Eropa lainnya, lapisan kedua ditempati oleh orang-orang Timur Asing, dan lapisan ketiga ditempati oleh kaum pribumi (*inlander*). sebagaimana diungkapkan oleh J.E. Albrecht:

---

<sup>34</sup> Sjamsu Koesmen dan Pangestu B.W, *Buku Petunjuk Kota Besar Surabaya*, (Surabaya: Djawatan Penerangan Kota Besar Surabaya, 1957), hlm., 119-120.

<sup>35</sup> von Faber, *op. cit.*, hlm., 76-80.

<sup>36</sup> Puspa Vasanty, "Kebudayaan Orang Tionghoa di Indonesia," dalam Koentjaraningrat (ed.). *Manusia dan Kebudayaan di Indonesia*. Jakarta: Djambatan, 1997), hlm., 357.

“Menoeroet soerat Staatsblad tahun 1866 no.57 maka dibri idzin kepada orang-orang asing jang di bawah angin aken doedoek di tempat tempat, di mana soedah di tetapkan kempoeng-kampoeng bagi bangsanja, oleh Sri Padoeka jang di Pertoean Besar. Tempatnja di dalam kampoeng, jang aken didoedoeki, di atoeer oleh kepala pemarentahan negri (Staatsblad tahun 1871 no.145).”<sup>37</sup>

Aturan di atas telah menyebabkan di kota Surabaya terdapat tiga kelompok pemukiman khusus yang di dasarkan atas perbedaan etnis, yaitu pemukiman orang-orang Tionghoa, pemukiman orang-orang Arab, dan pemukiman orang-orang Eropa. Sedangkan pemukiman orang-orang pribumi menyebar di banyak tempat karena tidak diatur secara khusus untuk tinggal di kawasan tertentu.

Latar belakang yang demikian dalam kehidupan sosial di Surabaya mempengaruhi sistem sosial lainnya. Seperti dalam bidang ekonomi seakan-akan terjadi pemisahan dalam profesi yang digeluti. Pemisahan jenis pekerjaan ini tidak serta merta terjadi. Ada kesinambungan antara profesi pekerjaan yang digeluti lapisan masyarakat Hindia Belanda dengan perubahan sosial akibat kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Misalnya, etnis Tionghoa peranakan lebih banyak berprofesi sebagai pedagang perantara yang menghubungkan masyarakat pribumi dengan orang-orang Eropa. Jenis profesi ini sudah sejak lama digeluti oleh etnis Tionghoa peranakan, yaitu sejak kedatangan mereka di Indonesia sebagai pedagang di pantai-pantai utara Pulau Jawa. Sementara itu, orang Timur Asing lainnya seperti, orang India, Jepang, dan Arab terpilah-pilah jenis pekerjaaanya sebagai pedagang perantara, buruh, dan pekerja bebas lainnya. Orang-orang Belanda dan Eropa lebih banyak menguasai perekonomian yang penting sebagai pemilik perusahaan, industri, perkebunan, dan pemilik modal. Penduduk pribumi kebanyakan bekerja sebagai tenaga buruh kasar, tukang becak, kuli pelabuhan, dan buruh pabrik.<sup>38</sup>

Kebijakan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda yang mengharuskan setiap golongan ras tinggal di pemukiman tersendiri atau yang biasa disebut

---

<sup>37</sup> J.E. Albrecht, *Soerat Ketrangan dari pada Hal Keadaan bangsa Tjina di Negri Hindia Olanda*, (Batavia: Albrecht & Rusche, 1890), hlm., 6.

<sup>38</sup> Fransiscus Assisi, *op.cit.*, hlm. 263.

*wijkenstelsel* menjadikan wilayah pemukiman kaum Tionghoa peranakan di Surabaya terpisah dengan wilayah pemukiman kaum pribumi. Wilayah pemukiman kaum Tionghoa peranakan ini kemudian lebih dikenal dengan perkampungan Tionghoa. Di kawasan ini orang-orang Tionghoa peranakan diwajibkan memelihara adat-istiadat leluhurnya, dan diberi kebebasan membangun pusat perdagangan. Pemerintah Kolonial Belanda mengangkat pemuka masyarakatnya yang disebut mayor, kapten maupun letnan. Di Surabaya, tempat yang ditunjuk sebagai wilayah pemukiman orang Tionghoa peranakan adalah di sebelah timur Jembatan Merah, daerah di sepanjang aliran Sungai Mas, seperti Kapasan, Kembang Jepun, Panggoeng, Songoyudan, Bibis, dan Bongkaran. Wilayah Pecinan ini tepat berada di depan kantor Residen Surabaya. Nama kawasan pecinan ini dulu juga mempunyai embel-embel Tionghoa-nya. Seperti *Chinesche Voorstraat* (Pecinan Koelon) yang sekarang menjadi Jl. Pahlawan, *Chinesche Tempelstraat* sekarang Jl. Gula, *Chinesche Breestraat* yang sekarang jadi Jl. Slompretan, *Chinesche Heerenstraat* (Jl. Bongkaran), *Tjai Postraat*, *Hongkongstraat*, *Hankowstraat*, *Kantonstraat*, *Nankingstraat*, dan *Wuchangstraat*.

Orang-orang Eropa dan Belanda menempati pemukiman wilayah yang memiliki fasilitas lengkap; seperti daerah pusat kota yang terkonsentrasi di wilayah Darmo, dan di daerah Simpang menjadi tempat para pegawai pemerintah. Pemukiman tentara Belanda berpusat di depan Jembatan Kalimas (Jembatan Merah). Daerah Kalimas ini juga dibangun Kantor Dinas Residen Surabaya yang menjadi pusat kegiatan pemerintah Kolonial Belanda. Sepanjang aliran Sungai Kalimas yang menjadi pusat perdagangan dan kegiatan ekonomi, menjadi tempat tinggal orang-orang Timur Asing yang hidup mengelompok, sehingga daerah sepanjang aliran Sungai Kalimas banyak berdiri perkampungan, seperti Cina, Arab, dan India. Sementara, penduduk pribumi lebih banyak membangun pemukiman di daerah-daerah pinggiran Kota Surabaya, seperti daerah Waru, Wonokromo, dan Gunung Sari.<sup>39</sup>

---

<sup>39</sup> Fransiscus Assisi, *ibid.*, hlm. 264.

Perubahan sistem pemerintah Kolonial Hindia Belanda secara tidak langsung berpengaruh dalam monopoli perekonomian kaum Tionghoa peranakan. Masuknya modal asing sejak 1870 menandai pelaksanaan perekonomian liberal di Hindia Belanda, khususnya di Jawa. Pengusaha asing menanamkan modalnya di bidang industri dan perkebunan yang menuntut tersedianya lahan yang luas dan fasilitas infrastruktur yang memadai seperti komunikasi dan jaringan jalan. Kesempatan kerjapun terbuka bagi berbagai etnis seperti Arab, Tionghoa peranakan, Eropa, dan Timur Asing lainnya. Di tengah liberalisasi ekonomi ini, Surabaya telah berkembang sebagai kota industri dan perdagangan bagi bahan baku industri. Ini kemudian memberikan peluang bagi berkembangnya aktivitas perekonomian orang-orang Tionghoa peranakan. Kalangan Tionghoa peranakan sangat diuntungkan dengan adanya UU Agraria pada tahun 1870 yang antara lain berisi ketentuan yang hanya membolehkan orang-orang Tionghoa peranakan dan Eropa sebagai pedagang besar. Para pedagang besar Tionghoa peranakan ini lalu menjadi perantara antara pedagang Eropa dengan pedagang pribumi. Kaum Tionghoa peranakan yang bermodal kecil membuka toko atau menjadi pedagang kelontong keliling. Mereka menjangkau konsumen akhir hingga ke desa-desa.

Peluang yang diberikan pemerintahan Kolonial Hindia Belanda, menyebabkan para pedagang Tionghoa peranakan akhirnya menguasai perdagangan ekspor-impor melalui pelabuhan Surabaya. Orang-orang Tionghoa peranakan juga mengelola perkebunan-perkebunan tebu dan diperbolehkan untuk mendirikan pabrik gula. Berbagai hak monopoli telah mereka kuasai. Di antaranya pajak pasar, pemborong kayu jati, pemborong rumah gadai dan rumah judi serta kongsi dagang yang sifatnya sangat rahasia yaitu kongsi bandar opium. Tapi hak monopoli ini tidak gratis, orang-orang Tionghoa peranakan harus membelinya dari pemerintahan kolonial lewat lelang. Ini terjadi ketika pemerintahan kolonial mengalami kesulitan keuangan. Praktis sejak tahun 1880 perdagangan di Surabaya dikuasai oleh kaum Tionghoa peranakan. Mereka puas dengan untung sedikit dan bermain dalam jumlah. Para pedagang ini memutar modal orang lain apakah dari importir tempat mereka mendapatkan bahan-bahan dan di sisi lain menjual dengan pola kredit atau angsuran ke konsumen. Salah satu produk yang mereka impor

saat itu adalah beras bermutu rendah dari Siam dan France Indo-China. Selain itu mereka juga memasok babi ke Bali dan berdagang kayu.

Kaum pedagang Tionghoa peranakan kemudian meluaskan jangkauan perdagangan mereka dengan diversifikasi ke penggilingan beras, pengrajin batik, pabrik rokok, pengrajin rotan, membuat mebel dan yang kelas kakap ke industri gula. Seorang residen dari Surabaya pada abad ke-19 mengeluhkan fenomena keberhasilan kaum Tionghoa peranakan ini. Ia cemas dengan makin banyaknya penduduk pribumi yang termakan untuk membeli barang-barang secara angsuran dari kaum Tionghoa peranakan. Barang-barang yang bisa dibeli dengan cara mengangsur antara lain batik murahan, pakaian putih dan pakaian rumah. Untuk satu Gulden, angsuran perharinya hanya 4 sen selama sebulan. Penduduk pribumi senang membeli barang dengan cara mencicil karena hitungannya sederhana, mudah dan cicilannya sangat ringan.

Seperti yang telah disinggung di atas, dalam sistem perekonomian Tionghoa peranakan berperan besar diluar bidang pertanian, terutama perdagangan. Hal ini dipengaruhi oleh adanya peraturan pemerintah yang melarang etnis Tionghoa peranakan memiliki tanah pribadi, sehingga dalam sistem perekonomian etnis Tionghoa peranakan kurang berperan dalam bidang pertanian, namun dominan dalam perdagangan, keuangan, pasar properti, dan industri. Jenis-jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan etnis Tionghoa peranakan; perdagangan seperti pedagang eceran, penjaja keliling, perdagangan grosir, serta ekspor-import hasil pertanian dan perkebunan; pasar keuangan dan properti seperti peminjaman uang di tingkat bawah dan pegadaian; dan industri yang dominan dijalankan etnis Tionghoa peranakan adalah usaha penggilingan padi, pengolahan pangan berskala kecil, pabrik es, pabrik rokok, tekstil dan batik.<sup>40</sup>

Jaringan perekonomian kaum Tionghoa peranakan dimulai dengan kegiatan pasar. Keadaan pasar di Surabaya mulai muncul dan berkembang sepanjang Kali Pegirian dan Surabaya. Pasar menjadi tempat bagi bertemunya

---

<sup>40</sup> Lukas S. Musianto, "Peran Orang Tionghoa peranakan dalam Perdagangan dan Hidup Perekonomian dalam Masyarakat", dalam *Jurnal Ekonomi* Universitas Kristen Petra, (tanpa nama kota, penerbit, dan angka tahun), hlm. 197-198.



antara pembeli dan penjual, sehingga pasar mempunyai peran ganda disamping berfungsi sebagai tempat melakukan transaksi, juga mempunyai peran sebagai tempat untuk melakukan komunikasi. Pasar yang terletak di tengah kota, seperti Pasar Turi, Pasar Atum, dan Pasar Pabean peranannya lebih besar dalam kegiatan interaksi antara kaum Tionghoa peranakan dengan kaum pribumi, di banding pasar yang khusus menjajakan barang tertentu atau pasar di pinggir-pinggir kota.<sup>41</sup>

Perindustrian rakyat dan pertukangan, kurang terlihat kaitannya dengan interaksi Tionghoa dan Bumi Putera. Von Faber menekankan bahwa Surabaya telah sejak dahulu kala memiliki kerajinan tangan, suatu kelompok pertukangan Bumi Putera yang dikelola langsung oleh raja yang memiliki tukang-tukang yang dipekerjakan berbulan-bulan dalam menyelesaikan suatu obyek keseniannya. Dalam tahun 1857 Residen Surabaya menyebutkan bahwa orang Bumi Putera telah mahir membuat barang-barang dari gading dan tulang, kura-kura, dan sebagainya untuk dijadikan aneka hiasan dan alat rumah tangga. Von Faber mengutip laporan J. Hageman dalam bulan Desember 1859, tentang daftar pengrajin atau tukang dan tenaga lain-lain dalam aneka keahliannya, dalam perbandingan jumlah antara orang Bumi Putera, Tionghoa, Eropa, dan lain-lain.<sup>42</sup>

Setelah memasuki abad kedua puluh, maka nampaklah peran kaum Tionghoa peranakan makin luas (*ekstensif*) dan makin mendalam (*intensif*) di tengah-tengah masyarakat Surabaya. Mereka yang mempunyai peranan sebagai pedagang tidak selalu identik dengan orang kaya, namun banyaklah dari mereka menjadi kaya dan menduduki posisi menengah ke atas dalam strata masyarakat. Von Faber menyebutkan jenis-jenis fungsi pedagang mereka sebagai kelompok-kelompok sebagai berikut:

1. Pedagang perantara, baik pedagang besar ataupun pedagang kecil, di hampir seluruh jenis perdagangan.
2. Pedagang kelontong (tekstil) mulai dari pemilik toko-toko, dan jumlah yang terbesar ialah sebagai penjaja keliling.

---

<sup>41</sup> Rudililanda, "Transformasi Pasar Tradisional Perkotaan di Surabaya", *Skripsi*, (Surabaya, Fakultas Teknik, Universitas Kristen Petra Surabaya, 1996), hlm., 55.

<sup>42</sup> von Faber, *op. cit.*, hlm., 184.

3 Pedagang *grosir* (partai besar), terutama dalam bidang-bidang palawija, gula, batik, beras, rokok, rotan dan mebel.

4. Pedagang legal ataupun ilegal dalam jenis-jenis candu (opium), rumah gadai dan pengutang keliling.<sup>43</sup>

Keadaan sosial ekonomi yang demikian ini nantinya akan berpengaruh terhadap perkembangan persuratkabaran di Surabaya, dimana surat kabar tersegmen-segmen. Terdapat perbedaan dalam penyebaran pers Tionghoa antara Tionghoa totok dengan Tionghoa peranakan. Hal ini nantinya sangat berpengaruh dalam penyebaran gagasan tentang identitas dan kedudukan mereka di mata masyarakat pribumi.

#### **2.4. Kehidupan Pers di Surabaya Sebelum Munculnya Kesadaran Identitas Tionghoa Peranakan**

Berbicara tentang pers di Surabaya pada awal kemunculannya hanya bertujuan untuk memberitakan masalah periklanan, perekonomian dan lelang barang-barang produksi. Seiring dengan perkembangan politik pemerintah Hindia Belanda pers beralih fungsi menjadi corong bagi pemerintah untuk mensosialisasikan kebijakan yang berkaitan dengan masyarakat. Model pemberitaan pers semakin cenderung pada masalah yang bersifat sosial politik. Namun dalam masalah ini yang dibicarakan adalah model kebijakan pemerintah yang menyangkut peraturan ketentuan-ketentuan dalam pers. Bagaimana pemerintah Kolonial Belanda mengawasi dan menyensor berita-berita yang dianggap membahayakan bagi stabilitas pemerintah.

Kekhawatiran terganggunya kekuasaan pemerintah dan kekhawatiran terjadinya perubahan dalam masyarakat akibat pengaruh pers, menjadi salah satu sebab dihalang-halangi dan dibatasinya kemerdekaan pers oleh pemerintah Kolonial Belanda.<sup>44</sup> Cara yang ditempuh pihak pemerintah Kolonial Belanda untuk mengekang kemerdekaan pers atau membatasi kebebasan pers bisa berbeda-

---

<sup>43</sup> *Ibid.*, hlm., 76-84

<sup>44</sup> Mirjam Maters, *op. cit.*, hlm. 11.

beda sifat dan tingkatnya. Namun ada skala sarana-sarana yang dapat digunakan pihak pemerintah. Sarana-sarana yang digunakan oleh pihak pemerintah pada pokoknya terbagi dalam empat kategori:

1. Sarana yuridis, seperti sensor preventif, ketentuan-ketentuan pidana yang represif, dan kewajiban tutup mulut bagi pegawai pemerintah;
2. Sarana administratif, seperti sistem perizinan untuk mendirikan percetakan, sistem uang agunan, dan larangan publikasi dari pemerintah;
3. Sarana ekonomi, seperti pemungutan pajak untuk kertas, iklan dan langganan, dan pemberian subsidi;
4. Sarana sosial, seperti pemberian peringatan, propaganda penerangan, dan penerapan sensor diri.<sup>45</sup>

Perkembangan pers etnis Tionghoa Peranakan di Surabaya, selain dipengaruhi oleh adanya “kapitalisme cetak”<sup>46</sup> dan penerbitan Belanda, juga dipengaruhi oleh munculnya kelas baru dalam masyarakat Tionghoa peranakan, yaitu kelas yang banyak mendapat pendidikan gaya Barat (Belanda) yang memerlukan media komunikasi massa. Lahir dan tumbuhnya pers Tionghoa peranakan di Surabaya sebagai pers politik yang menyuarakan identitas etnis Tionghoa didorong oleh adanya pers kolonial yang sering menurunkan berita-berita berkaitan dengan aturan-aturan kebijakan pemerintah Kolonial Belanda dalam mengatur masyarakat Tionghoa peranakan. Pers Tionghoa peranakan di Surabaya sebagai pers politik diwarnai oleh aktivitas pemimpin-pemimpin mereka dalam memperjuangkan kedudukan etnis Tionghoa peranakan di tengah-tengah masyarakat Hindia Belanda. Melalui media cetak sebagai sarana para tokoh-tokoh pergerakan nasionalis etnis Tionghoa menuangkan beberapa gagasan-gagasan pemikiran tentang identitas dan kedudukan masyarakat etnis Tionghoa.

---

<sup>45</sup> Lebih jelasnya lihat kajian Maters, *ibid*, hlm. 51-73.

<sup>46</sup> Saya menggunakan istilah “kapitalisme cetak” untuk menunjukkan pengertian bahwa sejak ditemukannya mesin cetak, surat kabar masa Kolonial Hindia Belanda banyak dijadikan alat kaum bermodal (kapitalis) sebagai kepanjangan tangan dalam menyuarakan paham liberalisme. Pengertian ini bukan berarti menafikan surat kabar yang lahir dari perjuangan rakyat.

Sebelum itu akan dijelaskan perkembangan pers di Surabaya yang tersegmen-segmen berdasarkan ras. Perkembangan pers di Surabaya mencerminkan struktur sosial masyarakat kolonial yang terpecah-pecah menurut ras. Masyarakat Kolonial Hindia Belanda mengenal pembagian antara kelompok-kelompok penduduk yang sebagian besar bertepatan dengan kelompok-kelompok ras. Asal usul etnis biasanya menentukan posisi kemasyarakatan dan pilihan profesi. Ada pembagian atas tiga kelompok penduduk, yaitu golongan orang-orang Belanda dan Eropa, golongan orang-orang Timur Asing, dan golongan penduduk pribumi (orang Indonesia). Perbedaan struktur sosial masyarakat semacam itu mempengaruhi dalam corak penerbitan pers di Surabaya yang hidup pada masa pemerintah kolonial. Pers di Surabaya terpecah dalam segmen Eropa, Tionghoa, dan Indonesia. Ketiga segmen ini mempunyai sejarahnya masing-masing.

Pers Eropa abad ke-19 berkembang dari lembaran lelang dan iklan ke surat kabar mingguan dan harian yang sebenarnya. Pemberlakuan peraturan tentang barang cetakan tahun 1856 dan perdebatan yang timbul karena tindakan berwajib, mendorong timbulnya pemberitaan yang kritis, sehingga pers berkembang berbau politik. Selain itu, sejumlah inovasi teknik telah memungkinkan dilaksanakannya pemberitaan yang lebih akurat dan cepat. Mulai digunakannya telegraf pada tahun 1856, pembangunan jalan kereta api, dan penyusunan jaringan hubungan pelayaran di wilayah Nusantara sejak 1888 akibat pembukaan Terusan Suez pada tahun 1869, membuat dunia semakin kecil.<sup>47</sup>

Pers Eropa adalah yang tertua. Lahir dan berkembangnya surat kabar Eropa di Surabaya tidak terlepas dari pengaruh semakin meningkatnya jumlah penduduk Eropa di Surabaya. Sejarah lahirnya pers Eropa di Surabaya dimulai dengan terbitnya surat kabar mingguan, *Soerabajasch Advertentieblad* pada tahun 1836. Pada awal terbitnya surat kabar ini dalam pemberitaan hanya berisi iklan barang-barang konsumsi, kelahiran, perkawinan, kedatangan dan keberangkatan kapal dan sebagainya, yang ada di Surabaya. Seperti berita iklan tentang haji:

---

<sup>47</sup> Mirjam Maters, *op, cit*, hlm. 39.

Rotterdanske Lioid  
Soerabaija-Djeddah

“Orang-orang njang maoe pergi ke Meka boleh menoempang sama kapal api “Batavia” Kapitein G.J. Boon njang berangkat dari Soerabaija boelan Rabingoelakhir teroes pigi di Djeddah. Sewahnja satoe orang f. 95 boewat pigi saja. Kalao pigi sama poelang f. 170.

Keterangan lebih djaoeh boleh dapat sama agennja “Internationale Crediet & Handelsvereegeneging” Rotterdam”.<sup>48</sup>

Setelah satu tahun terbit, C.F Smith pemilik surat kabar ini, pada bulan Maret 1837 mengajukan permohonan kepada pemerintah Kolonial Belanda untuk bisa menurunkan artikel. Meskipun ia berjanji tidak akan menurunkan tulisan-tulisan yang berbau politik, pihak pemerintah Kolonial Belanda tetap menolak permohonan pengajuannya, dan malahan pada tahun 1841, Kepala Tata Usaha dan Sekretaris Distrik Pengadilan Surabaya, C. van Raalten, mengambil penerbitan surat kabar ini. Sejak itu surat kabar *Soerabajasch Advertentieblad* berada di bawah pengawasan Residen Surabaya dan hanya menurunkan tulisan yang bermanfaat bagi pemerintah Kolonial Belanda. Beberapa tahun kemudian, yaitu tahun 1853 surat kabar ini berubah nama menjadi *Soerabajasch Nieuws Advertentieblad* dan isinya menunjukkan perubahan, tidak hanya iklan yang diturunkan, tapi juga artikel-artikel yang diawasi langsung oleh residen, dan tahun 1858 mengubah nama lagi menjadi *Soerabajasche Courant*.<sup>49</sup> Perubahan nama surat kabar dan corak penulisan yang tidak hanya menurunkan berita iklan, tetapi juga artikel ini lebih banyak dipengaruhi oleh kondisi sosial politik, di mana pada tahun 1850-an aliran-aliran ideologi yang tumbuh di Eropa banyak yang masuk ke Hindia Belanda melalui pelajar-pelajar lulusan universitas yang datang ke tanah Hindia Belanda.

Pada tahun 1853 muncul surat kabar mingguan *De Oostpost*, yang dicetak oleh percetakan E. Fuhri. Di bawah pimpinan M. van Geuns yang dikenal sebagai penganut kelompok konservatif, pada tahun 1870 surat kabar ini berubah nama

---

<sup>48</sup> Serikat Penerbit Surat Kabar Cabang Jawa Timur, *Sejarah Pers di Jawa Timur*, (Surabaya: SPS, tanpa tahun), hlm. 21.

<sup>49</sup> SPS, *ibid.*, hlm. 14.

menjadi *Soerabaiasch Handelsblad* dan menjadi corong para pengusaha pabrik gula Jawa Timur. Melalui surat kabar ini van Geuns mengkampanyekan perlunya memajukan dan memakmurkan Hindia Belanda melalui pengembangan perkebunan besar yang menghasilkan komoditas ekspor.<sup>50</sup>

Selama kurun waktu sampai tahun 1900 perkembangan surat-surat kabar yang terbit semakin pesat. Pada periode ini surat-surat kabar yang terbit cenderung berubah, yaitu dalam corak berita yang diturunkan. Surat kabar-surat kabar selama pertengahan abad ke-19 sampai tahun 1900-an cenderung menurunkan berita artikel-artikel yang sedikit banyak berbau politik. Kecenderungan ini yang mendorong pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan undang-undang tentang peraturan penerbitan barang cetak yang tertuang dalam *Reglemnen Op de Drukkeren in Nederlandsch-Indie* atau istilah yang lazim *Drukkers Reglement*. Isi undang-undang cetak ini antara lain;

“Semua karya cetak sebelum diterbitkan, satu eksemplar harus dikirimkan dahulu kepada kepala pemerintah setempat, pejabat justisi, dan algemeene secretarie. Pengiriman ini harus dilakukan oleh pihak pencetak dan penerbitnya dengan ditandatangani. Kalau ketentuan ini tidak dipatuhi, karya cetak tersebut disita. Tindakan ini bisa disertai dengan penyegelan percetakan atau tempat penyimpanan barang-barang percetakan tersebut”.<sup>51</sup>

Surat kabar di Surabaya yang pertama kali terkena *Drukkers Reglemen* adalah surat kabar *Newsbode* edisi 3 September 1864.<sup>52</sup> Surat kabar ini terbit pertama kali tahun 1861 di bawah pimpinan J.J. Nosse. Surat kabar ini terbit dua kali seminggu dan dalam pemberitaan lebih banyak menurunkan berita yang berhubungan dengan peristiwa-pristiwa penting, seperti pemberontakan yang sering terjadi di daerah-daerah, seperti pemberontakan yang terjadi di Banten pada tahun 1888.

---

<sup>50</sup> C. Smith, *Sejarah Pembredelan Pers di Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pres, 1997) hlm. 32.

<sup>51</sup> Stamblad No. 74, tahun 1856.

<sup>52</sup> SPS, *op, cit*, hlm. 17.

Surat kabar-surat kabar tersebut merupakan surat kabar konservatif<sup>53</sup> yang lebih banyak membela kepentingan pemerintah Kolonial Belanda daripada membela kepentingan masyarakat pribumi, tetapi kecaman mereka tidak ditujukan langsung kepada para pejuang melainkan kepada gubernemen, yang diutarakan dengan istilah-istilah kasar atau *Maters* mengistilahkan kritikan gaya “tropika”.<sup>54</sup> Gaya “tropika” yang ditandai dengan kritik tajam terhadap ketimpangan-ketimpangan dan serangan-serangan pribadi sampai tahun 20-an abad ke-20 merupakan ciri khas pers Eropa. Gaya tropika ini lekat dengan nama-nama orang tertentu. Sosok redaktur kepala menjadi penentu warna surat kabarnya. Wakil-wakil gaya tropika yang ditakuti pada masa-masa ini, seperti misalnya H.C. Zentgraaff yang menjadi redaktur kepala surat kabar *Soerabaiasch Handelsblad*.<sup>55</sup>

Tingkat periode terbit yang lebih sering dibandingkan surat kabar lainnya, merangsang surat kabar *Soerabajasch Nieuws Advertentieblad* dan *De Oostpost*, untuk meningkatkan periode terbit yang awalnya satu minggu sekali menjadi dua kali seminggu dan tiga kali seminggu. Surat kabar-surat kabar lain berbahasa Belanda yang terbit di Surabaya sebelum tahun 1900 adalah: *Soerabajasch Weekblad*, *Militarie Courant*, *Indische Spectater*, *Insulinde*, *Indische Kinder Courant*, dan *Thieme's Nieuws Advertentieblad*. Mengenai tiras, surat kabar Eropa sangat bervariasi dalam penjualannya dari beberapa ratus sampai beberapa ribu eksemplar sehari. Surat kabar-surat kabar yang besar, seperti *Soerabaiasch Handesblad*, di tahun 1830-an dan 1840-an mempunyai pelanggan 6.000-9.000 orang.<sup>56</sup>

---

<sup>53</sup> Surat kabar konservatif yang dimaksudkan di sini adalah surat kabar yang membela kepentingan pemerintah dalam mempertahankan status quo. Tipe surat kabar ini menjadi lawan surat kabar yang menentang kebijakan pemerintah yang hanya menguntungkan surat kabar konservatif.

<sup>54</sup> Penyebutan istilah gaya “tropika” di sini untuk menggambarkan arti posisi pers sebagai orang yang berseru di tengah padang pasir, iklim yang memanaskan jiwa, dan pertimbangan-pertimbangan persaingan. *Maters, op, cit*, hlm. 41.

<sup>55</sup> *Matters, op, cit*, hlm.

<sup>56</sup> *Matters, op, cit*, hlm. 42.

Pers bumi putera secara keseluruhan merupakan pers yang lahir sesudah pers Tionghoa. Keterlambatan lahirnya pers bumi putera merupakan konsekuensi dari buruknya situasi keuangan, akibat melemahnya posisi ekonomi kaum bumi putera. Orang bumi putera seringkali tidak mampu menerbitkan surat kabar. Hal ini karena, di samping buta huruf, lambatnya kedatangan proses kesadaran nasionalisme, dan semakin populernya surat kabar-surat kabar Eropa di kalangan para terpelajar bumi putera, juga kemampuan finansial yang tidak mencukupi menjadi penyebab lain dari keterlambatan kelahiran pers bumi putera. Munculnya surat kabar-surat kabar bumi putera pada masa-masa awal kelahirannya secara umum mempunyai ciri-ciri khusus, sesuai dengan keadaan masyarakat, kebudayaan, dan politik. Sifat kedaerahan (lokalitas) dalam pola kehidupan masyarakat pribumi, mempengaruhi dalam penerbitan pers, sehingga pers pribumi yang terbit sebelum merdeka mempunyai corak dan bahasa yang berbeda-beda.

Lahir dan tumbuhnya pers bumi putera secara umum dipengaruhi oleh beberapa faktor. Sebagian mendapat dorongan kuat dari munculnya perhimpunan-perhimpunan yang bercorak nasionalis. Sekitar tahun 1908, lewat saling pengaruh dengan organisasi-organisasi nasionalis seperti Boedi Oetomo dan Sarekat Islam (SI/1912) lahir pers yang bercorak nasionalis. Sebagian lainnya dipengaruhi oleh semakin meluasnya sistem pendidikan yang diterapkan pemerintah kolonial. Anak-anak bumi putera yang belajar di sekolah-sekolah pemerintah, terjalin rasa senasib dan setia kawan di antara mereka akibat perlakuan rasisme pemerintah kolonial. Perasaan ini ditunjang juga dengan timbulnya gagasan nasionalisme yang sebagian hasil dari pembacaan ideologi-ideologi Barat. Gagasan-gagasan ini menumbuhkan keinginan kaum terpelajar untuk menuangkan ide-ide mereka, dan untuk mewujudkannya diperlukan adanya sarana atau wadah yaitu berupa pers (surat kabar). Kaum terpelajar yang disebut juga priyayi baru ini kebanyakan dari tingkat lebih rendah daripada kaum elit gubernemen lama. Mereka menekankan perlunya kemajuan dan modernisasi tanpa mengingkari latar belakang kebangsaannya.<sup>57</sup>

---

<sup>57</sup> Lihat kajian J.D. Legge, *Kaum Intelektual dan Perjuangan Kemerdekaan*, (Jakarta: Grafiti, 2003), hlm. 23-66.



Terjalannya rasa persatuan yang lahir di kalangan para pelajar yang menamakan dirinya “Kaoem Moeda” dan ditambah lagi dengan realitas sosial yang menimpa bangsanya yang banyak mengalami kehinaan akibat rendahnya tingkat pendidikan, menjadi daya tarik para pelajar bumi putera untuk mewujudkan angan-angannya dalam meningkatkan pendidikan dan mengentaskan bangsanya dari kehinaan. Melalui wadah surat-kabar, Kaoem Moeda menyalurkan aspirasi untuk mengeluarkan kekecewaan atas kebijakan pemerintah kolonial yang dianggap menyengsarakan rakyat. Seperti yang dilakukan Ki Hajar Dewantara dalam usahanya melakukan penyadaran politik melalui peningkatan pendidikan.

Surat kabar bumi putera yang lahir di Surabaya pertama kali adalah *Oetoesan Hindia*. *Oetoesan Hindia* diterbitkan oleh Hendelmij Setija Oesaha dan berafiliasi dengan Sarekat Islam. Terbit pertama kali setelah Kongres I Sarekat Islam di Surabaya pada 26 Januari 1913. Pimpinan surat kabar ini adalah Haji Oemar Said Tjokroaminoto selaku redaktur. Surat kabar ini terbit dua hari sekali. Mengenai isinya kebanyakan berita tentang pergerakan dunia, politik, perekonomian, dan perburuan. Tirtodonejo, salah seorang wartawan dan kolumnis surat kabar ini, yang memiliki nama samaran T.D. Sandinama, sering menulis artikel-artikel yang menunjukkan ketimpangan-ketimpangan dan melontarkan kritik kepada pemerintah kolonial. Ia memiliki motto; “berani karena benar”. Tulisan-tulisannya yang amat tajam dan seringnya mengkritik pemerintah Kolonial Belanda, membuat Tirtodonejo dikenal dalam kalangan luas sebagai “Raja Pers Delict”.<sup>58</sup>

Pada 1916-1919, *Oetoesan Hindia* banyak diminati masyarakat luas. Surat kabar ini menjadi rebutan ketika menurunkan berita tentang perlawanan di Jambi yang terjadi pada bulan Agustus dan September 1916 dan menewaskan seorang kontrolir Belanda bernama Walter serta beberapa pegawai pamong praja. Kejadian ini diturunkan oleh *Oetoesan Hindia* sebagai berita utama. Pada tahun 1919 terjadi lagi pergolakan di Toli-Toli Sulawesi Selatan yang mengakibatkan terbunuhnya kontrolir de Kat Angelino dan sejumlah pegawai pamong praja. Pada

---

<sup>58</sup> SPS, *op. cit.* hlm. 26.

tahun yang sama di Cimareme Garut, terjadi perlawanan Haji Hasan akibat kebijakan pemerintah dalam persoalan pembelian padi yang amat merugikan rakyat. Kedua peristiwa ini oleh *Oetoesan Hindia* diturunkan menjadi berita utama.

Sejak beberapa dekade tahun 1900, surat kabar-surat kabar yang lahir di Surabaya semakin gencar memberitakan perlawanan dan kerusuhan akibat kebijakan pemerintah yang merugikan petani, terutama kerusuhan di sekitar daerah-daerah perkebunan Jawa Timur. Seperti pemberitaan surat kabar *Oetoesan Hindia* tentang insiden Kiai Kasan Mukmin Gedangan Sidoarjo pada tahun 1904, yang menentang kebijakan pemerintah dalam penarikan pajak. Akibat radikalnya tulisan-tulisan yang diberitakan surat kabar mengundang sikap kebencian pemerintah kolonial, sehingga banyak redaktur di tahan dengan berbagai dalih. Salah satunya kasus redaktur *Pewartas Soerabaia*, Sosrokardono, ayah Rudjito salah seorang pelaku peristiwa 10 November di Surabaya, yang dituduh menentang pemerintah dengan mengadakan gerakan politik. Ia dijatuhi hukuman penjara selama empat tahun. Menyusul HOS Tjokroaminoto yang lebih dikenal “Kyaine” ditangkap dan dijatuhi hukuman satu tahun penjara, dengan tuduhan memberikan keterangan palsu tentang kasus Sosrokardono. Akibat penangkapan HOS Tjokroaminoto, surat kabar *Oetoesan Hindia* tidak terurus lagi dan tahun 1923 berhenti terbit.

Memasuki tahun 1926 terbit surat kabar *Kemajoean Hindia* yang merupakan kelanjutan dari *Oetoesan Hindia* yang telah berhenti terbit akibat persoalan klasik, yaitu masalah modal. Terbitnya surat kabar ini dapat diketahui dari tulisan R.M. Bintarti;

“....Berhubung dengan matinya ‘Oetoesan Hindia’ di tahun 1923, saya dan Ong Lin Giok membentuk suatu perusahaan untuk menerbitkan harian. Semula harian itu saya terbitkan di Mojokerto, kemudian dipindahkan ke Surabaya dengan percetakan milik Ong Lin Giok sendiri. Harian itu adalah Kemajoean Hindia dengan R.P. Soeroso, Wardikoen dan Koesmadi sebagai redaktur. Sebagai pembantu tetap dipekerjakan seorang ahli pendidikan terkenal, ialah almarhum Soeparnadi.<sup>59</sup>

---

<sup>59</sup> Dalam Memori R.M Bintarti, hlm. 12.

Pada masa-masa terakhir pemerintahan Kolonial Belanda, surat kabar-surat kabar yang terbit di Surabaya terjadi perubahan dalam corak penulisannya. Berita-berita yang diturunkan, terutama artikelnya, cenderung terjadi perang opini atau *bergaya tropika*. Kecenderungan terjadinya perang opini ini banyak dipengaruhi oleh politik aliran yang dianut para pemimpin akibat semakin banyak ideologi-ideologi yang masuk ke tanah Hindia Belanda, sehingga yang terjadi adalah perbedaan cara pandang dalam menafsirkan nasionalisme bagaimana baiknya. Hal ini dapat dilihat dalam tulisan harian *Djenggala* dan *Express*. *Djenggala* merupakan surat kabar yang terbit menggunakan bahasa Jawa dengan di bawah pimpinan redaktur, yaitu Ayat Djajaningrat cucu Bupati Ngawi yang lulus dari sekolah Osvia Madioen. Setiap kali terbit surat kabar ini selalu menghantam group Bubutan yang dipimpin dr. Soetomo dan tokoh-tokoh Persatuan Buruh Indonesia (yang kemudian berubah nama menjadi Perindra), seperti Husni Thamrin, Mr. Isqaq, Soekardjo Wirjopranoto, dan sebagainya. Tulisan artikel itu dapat dibaca pada terbitan edisi 19 Juli 1939: “Pemerintah dewe wis ngerti yen Thamrin, Soekardjo, Roeslan nindaake kianat ....”<sup>60</sup>

Sementara group bubutan membalas serangan surat kabar *Djenggala* dengan menurunkan artikel pada harian *Express* yang diredakturi dr. Soetomo dalam edisi membalas dengan 20 Juli 1939: “He, opo kowe nate weruh ana pimpinan redaksi sing diantemi letterzettere, polahe hubredaktur mau ndhemeni bojone letterzettere? Yen durung weruh, coba ngadeg’o njang ngarep pengilon....”<sup>61</sup> Kekasaran gaya Ayat yang memimpin harian *Djenggala* dalam menurunkan artikel untuk menyerang lawan-lawannya, mengakibatkan beberapa redaktur surat kabar *Express* mengundurkan diri, misalnya Heroe Soekarto, Soenarjo Prawiroadiwirjo, dan Isbandi.

Menginjak tahun 1931 merupakan masa yang paling subur dalam sejarah pers di Surabaya pada masa Kolonial Belanda. Ada beberapa surat kabar yang

---

<sup>60</sup> Dalam SPS, *op. cit.*, hlm. 51.

<sup>61</sup> SPS, *ibid.*, hlm. 52.

terbit pada masa ini, dan yang paling menonjol surat kabar *Soeara Oemoem*. Surat kabar ini diterbitkan oleh Soeloeh Ra'jat Indonesia dengan pimpinan redaksinya Taher Tjindarboemi. Kemenonjolan surat kabar ini akibat penurunan berita dalam tajuk rencana yang ditulis Tjindarboemi tentang pemberontakan kapal Zeven Provincien dalam edisi 6 Januari 1933 yang berjudul Pemberontakan di Zeven Provincien;

Dilain bagian dalam soeratkabar ini hari, ada terseboet kabar berita pemberontakan di atas kapal perang Sommandementschip dari Indische Marine "De Zeven Provincien", jaitoe kapal perang jang baroe-baroe ini dikawatkan oleh Aneta ada berlaboeh di Olehleh (Aceh).

Kedjadian itu adalah kedjadian jang terpenting sekali di dalam keroesoehan Marine selama ini dan dalam hakekatnja bertambah soelit lagi oentoek dibicarakan dengan setjara jang seobyektif-obyektifnja oleh seboeah Soeratkabar harian, teristimewa oleh soeratkabar seperti "Soeara Oemoem" ini.<sup>62</sup>

Perkembangan pers Tionghoa peranakan pada periode awal munculnya pada tahun 1850-an sampai 1900-an lebih banyak dipimpin oleh orang-orang Indo-Eropa,<sup>63</sup> sehingga belum bisa dikatakan pers Tionghoa peranakan sudah berdiri sendiri. Pada perkembangan selanjutnya, yaitu awal abad 20 pers tersebut baru dipimpin oleh kelompoknya sendiri-sendiri, dan biasanya pemimpin ini mendapatkan pendidikan gaya Barat. Semakin berkembangnya pers Tionghoa, muncul juga penerbit surat kabar berkebangsaan Tionghoa. Mereka mempekerjakan orang-orang mereka sendiri dan berorientasi kepada kelompoknya.

Mengenai pers Tionghoa, sebelum abad ke-20 pers Tionghoa sebenarnya belum muncul, dan yang lebih populer adalah pers dengan bahasa Melayu-Tionghoa. Pers Melayu-Tionghoa adalah pers yang dikelola oleh orang Tionghoa peranakan. Sedangkan pers berbahasa Tionghoa baru tampil ke depan pada tahun 1900-an, akibat meningkatnya nasionalisme dan bertambahnya jumlah penduduk Tionghoa "totok". Namun begitu, wartawan-wartawan peranakan dalam menulis

---

<sup>62</sup> Dalam SPS, *op, cit*, hlm. 53.

<sup>63</sup> Golongan Indo-Eropa merupakan keturunan dari pasangan, biasanya pihak ayah dari Eropa dan pihak ibu dari penduduk pribumi.

berita umumnya menggunakan bahasa Melayu rendah atau Melayu pasar, yaitu bahasa pergaulan umum antar berbagai kelompok penduduk di Hindia Belanda. Sekalipun diterima sebagai *lingua franca* (bahasa komunikasi) dalam kehidupan sehari-hari, pihak berwenang lebih menyukai bentuk yang lebih halus, yaitu bahasa Melayu tinggi sebagai bahasa resmi. H.J.M. Maier menganggap perbedaan dalam bahasa Melayu rendah dan tinggi sebagai bentuk sensor, karena perbedaan itu membedakan orang Tionghoa dari orang Indonesia berpendidikan yang menggunakan bahasa Melayu Tinggi.<sup>64</sup>

Surat kabar pertama berbahasa Melayu yang terbit di Surabaya adalah *Soerat Kabar Bahasa Melajoe* yang terbit pertama kali pada 12 Januari 1856. Kehadiran surat kabar ini justru diketahui publik dari surat kabar *Oostpost*. Dalam edisi pertama ditulis ;

“Harganja langganan ini Soerat Kabar Bahasa Melajoe dalam satoe tahoen moesti dibajar lebih dahoeloe kepada jang kloewaran ini soerat. Harganja kabaran jang 10 perkataan f. 1- rec. selainnja zegel. Dan boleh dapat dari E. Fuhri di Soerabaja”.<sup>65</sup>

Tujuan diterbitkannya surat kabar ini dijelaskan pula pada penerbitan pertamanya sebagai berikut ;

“Bermoelanja kita mengloearkan kepada orang-orang njang soeka batja ini Soerat Kabar , njang bergoena soedah terseboet di dalam Soerat Kabar Oostpost jaini Soerat Kabar Bahasa Melajoe sangat didjadikan pertoeloengannja orang berdagang di negrie Djawa seblah timor. Mangka segala orang berdagang njang soeka taroeh satoe kabar dagang atawa belajar, berseangkat, datang dari penjoewalan barang, harga atawa dari lain-lain kabar, ija boleh kirim di kantor citakan ini soerat di kota Soerabaja”.<sup>66</sup>

Sembilan tahun kemudian atau tahun 1865 surat kabar *Bientang Timoer* terbit untuk pertama kalinya dan dicetak oleh Gimberg & Co. Edisi pertama terbit hari Rabu 4 Januari 1865. Pada halaman kiri atas edisi pertama itu diturunkan penjelasan penerbit ;

---

<sup>64</sup> Dalam Maters, *op, cit*, hlm. 43.

<sup>65</sup> SPS, *op, cit.*, hlm. 19.

<sup>66</sup> SPS, *ibid.*, hlm. 24.

“Siapa-siapa jang bisa trima soerat kabar bernama Bintang Timoer, soeka diteroeskan ini taoon 1865, dikasi taoe njang oewangnja itoe soerat kabar harganja f. 15, bole lekas dikirimkan sama jang kloewarkan itoe soerat kabar. Lagi dikasih inget nyang di sembarang kota dapet post wissel njang bolee di toetoepp franco dalam soerat, dengan dikirimken sama Gebr. Gimberg & Co di Soerabaiyas njang kloewaran Soerat Kabar Bintang Timoer....”<sup>67</sup>

Beberapa surat kabar berbahasa Melayu lainnya yang terbit sebelum tahun 1900 adalah *Bintang Soerabaia*, *Tjahaya Moelia* dan *Betara Indra*.<sup>68</sup>

Lahirnya kesadaran nasional akan identitas golongan etnis Tionghoa peranakan mengilhami orang-orang Tionghoa untuk menerbitkan surat kabar dengan tujuan untuk menyebarkan gagasan-gagasan mereka tentang rasa kebanggaan sebagai bangsa pedagang dan rasa ketidakadilan yang selama ini mereka terima akibat banyaknya peraturan pemerintah Kolonial Belanda melalui apa yang dinamakan sistem surat pas dan sistem kampung,<sup>69</sup> yang sangat membatasi ruang gerak kebebasan mereka. Nasionalisme yang timbul di kalangan orang Tionghoa itu merupakan reaksi terhadap tindakan-tindakan Pemerintah Hindia Belanda untuk mengendalikan mereka sebagai kelompok, dan juga sebagai akibat datangnya gagasan-gagasan nasionalisme dari Tiongkok.<sup>70</sup>

Tindakan pemerintah kolonial terhadap mereka itu ternyata telah memainkan peranan penting dalam mengembangkan kesadaran nasionalisme di

---

<sup>67</sup> SPS, *ibid.*, hlm. 27.

<sup>68</sup> SPS, *ibid.*, hlm. 20-21.

<sup>69</sup> Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial yang dikeluarkan dan diterapkan khusus untuk orang-orang Tionghoa antara lain; (a). Sistem Opsir. Sebenarnya ini bukan sistem, namun pemerintah memerlukan seorang wakil yang dianggap mampu menangani kaum Tionghoa dengan cara menunjuk salah satu di antara mereka yang terkaya. Sistem ini dikembangkan secara lambat-laun antara tahun 1619 dan 1837. (b). Sistem pemukiman (*Wijkenstelsel*), mula-mula diterapkan tahun 1835, kemudian diubah tahun 1866. (c). Sistem pas jalan (*Passenstelsel*), sistem surat jalan ini resmi dijalankan tahun 1863. Lihat Leo Suryadinata, *Negara dan Etnis Tionghoa; Kasus Indonesia*, (Jakarta: LP3ES, 2002), hlm. 73-76. Selanjutnya diringkas “Negara dan Etnis”. James R. Rush, *Opium to Java, Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), hlm. 187-189.

<sup>70</sup> Leo Suryadinata, “Negara dan Etnis”, *ibid.*, hlm. 7.

kalangan orang-orang Tionghoa pada awal abad ke-20. Satu lambang dan sarana kesadaran nasional yang sedang tumbuh itu adalah didirikannya Kamar Dagang Tionghoa (Sianghwee) pada tahun 1908, yang dapat berperan sebagai perwakilan kepentingan dagang orang-orang Tionghoa.<sup>71</sup> Di samping itu, semakin banyak anak-anak Tionghoa lulusan pendidikan Barat, sangat dirasakan perlunya mempunyai surat kabar sendiri.

Surat kabar yang terbit di Surabaya pada awal abad ke-20 yang mencerminkan politik nasionalisme adalah *Sia Hwee Po* dan *Pewartar Soerabaia*. *Sia Hwee Po* pada awalnya terbit tengah bulanan, yaitu tahun 1914 diterbitkan oleh Kwa Kiauw Bian Hap Hwee. Tulisan-tulisan yang diturunkan dalam surat kabar ini kebanyakan pengetahuan mengenai Tiongkok berupa ulasan dan cerita. Tujuan surat kabar ini dalam memberitakan pengetahuan tentang Tiongkok adalah untuk membangkitkan para pembacanya yang kebanyakan terdiri dari kaum Tionghoa terhadap asal-usul keturunan. Sedangkan *Pewartar Soerabaia* yang didirikan oleh Tjan Kiem Bie dan The Ping Oen dengan motto “*Maleisch Nieuws Advertentieblad voor Nederland Indie*” menjadikan surat kabar ini lebih condong ke Hindia Belanda. Salah satu wartawan dari surat kabar ini oleh pemerintah Indonesia kemudian mendapat penghargaan sebagai perintis Pers Indonesia adalah R.M. Bintarti.<sup>72</sup>

---

<sup>71</sup> Leo Suryadinata, “Politik Tionghoa”, *op, cit.*, hlm. 23.

<sup>72</sup> SPS, *op, cit.*, hlm. 30.

### BAB 3

#### KEHIDUPAN PERS TIONGHOA PERANAKAN DI SURABAYA

Pada masa Kolonial Belanda tugas dan tanggung jawab politisi dan jurnalis sulit untuk dibedakan. Para politisi berjuang bagi kebebasan rakyat melalui diplomatik, perundingan dengan bangsa Belanda, sementara wartawan berjuang bagi kebebasan rakyat dari penjajahan Belanda melalui surat kabar dengan menjual berita agar diketahui publik. Namun yang jelas, pada masa kolonial corak perjuangan pers, meminjam istilah Takashi, masih dalam tataran “bersuara”.<sup>1</sup>

Perbedaan memang muncul dalam cara perjuangan antara kaum politisi dengan para wartawan, akan tetapi dalam tingkatan tertentu keduanya mempunyai sifat kesamaan, yaitu sama-sama berasal dari golongan kelas menengah terdidik yang baru muncul ketika lembaga-lembaga pendidikan Barat banyak didirikan pada akhir abad ke-19. Dengan kata lain, kedua golongan ini sama-sama mempunyai dasar intelektual akibat pengaruh pendidikan Barat yang diperoleh pada masa Kolonial Hindia Belanda melalui lembaga-lembaga pendidikan. Bagaimana dinamika kehidupan pers kaum Tionghoa peranakan yang ada di Surabaya yang merupakan pengejawantahan dari nasionalisme kebangsaan kaum Tionghoa peranakan yang berkembang ke arah yang berbeda yang kemudian mempengaruhi perkembangan nasionalisme kaum pribumi? Di bawah ini akan

---

<sup>1</sup> Istilah “bersuara” menunjukkan arti pada penyaluran aspirasi kaum terpelajar melalui media cetak. Lebih jelasnya lihat Takashi Shiraishi, *Zaman Bergerak; Radikalisme Rakyat di Jawa 1912-1926*, terj., (Jakarta: Pustaka Grafiti, 1997), hlm. 27.



diulas kehidupan pers kaum Tionghoa peranakan di Surabaya yang mempunyai corak nasionalisme tersendiri.

### 3.1 Munculnya Gerakan Nasionalisme Kaum Tionghoa Peranakan

Seperti yang sudah dijelaskan pada bab 2 bahwa orang Tionghoa sudah sejak lama bermigrasi ke wilayah Hindia Belanda. Salah satu wilayah yang dijadikan tempat hunian oleh imigran Tionghoa adalah Surabaya. Akan tetapi, ada perbedaan besar antara imigran gelombang pertama dengan imigran gelombang kedua yang datang ke Surabaya yang kemudian mempengaruhi dalam pola hunian mereka di wilayah Surabaya. Perbedaan ini terletak pada kepercayaan yang dianut. Orang-orang Tionghoa yang datang pada gelombang pertama banyak berasal dari daerah Yunan dan Swatow, pada umumnya telah memeluk agama Islam beraliran Hanafi. Walaupun tidak menutup kemungkinan bahwa di antaranya sejumlah kecil ada yang beragama Kong Hu Chu, Budha, dan Taoisme atau sinkretisme dari ketiganya yang disebut dengan nama Sam Kao (Tri Dharma), sedangkan orang-orang yang Tionghoa yang datang pada gelombang kedua pada umumnya menganut Khong Hu Chu, Tao, dan Budha. Hal tersebut menyebabkan adanya perbedaan tempat tinggal setelah mereka tiba di Surabaya<sup>2</sup>

Di Surabaya para imigran gelombang kedua menempati daerah sepanjang Kali Mas dan Kali Pegirikan, lebih ke arah selatan dari pemukiman pendatang pertama. Pemukiman tersebut selanjutnya lebih dikenal dengan nama Pecinan. Daerah tersebut meliputi kawasan Jalan Coklat yang dulu disebut dengan Topekong Straat dan berkembang sampai ke jalan Karet, Slompretan, Kembang Jepun, dan akhirnya seiring dengan semakin banyaknya imigran Tionghoa yang tinggal di Surabaya, Pecinan meluas sampai ke jalan Kapasan. Pemusatan pemukiman orang-orang Tionghoa peranakan memang pada awalnya terjadi karena kebiasaan mereka untuk selalu menempati daerah-daerah strategis sepanjang aliran sungai yang menjadi pusat perdagangan, tetapi selanjutnya

---

<sup>2</sup> Puspa Vasanty, *Kebudayaan Orang Tionghoa Di Indonesia*. (Jakarta: Jambatan, 2004), hlm. 127.

pemukiman tersebut menjadi semakin khusus ketika pada tahun 1866 pemerintah Hindia Belanda mengeluarkan peraturan yang disebut dengan *Wijkenstelsel*.<sup>3</sup>

Kondisi yang semakin menguntungkan bagi orang-orang Tionghoa peranan sebagai pedagang perantara, menyebabkan pemerintah Kolonial Hindia Belanda membuat kebijakan baru berdasarkan gagasan politik etis dari Pieter Brooshooft, seorang jurnalis “Memorie”. Gerakan etis ini didukung para pemimpin partai Neo-Calvinis dan Katholik di Negeri Belanda yang mengutuk kebijakan liberal tidak adil dan non Kristiani. Akhirnya menjelang akhir abad ke-19 sistem pajak yang menguntungkan orang-orang Tionghoa peranan dihapuskan. Selain itu monopoli orang Tionghoa peranan atas perusahaan rumah gadai dan rumah jagal berlisensi dicabut. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberlakukan politik yang disebut sistem *apartheid*.<sup>4</sup> Dalam *Regering Reglement* tahun 1854 penduduk Indonesia dibagi dalam tiga golongan besar, yaitu golongan orang Eropa (*Europeanen*), Timur Asing (*Vreemde Oosterlingen*), dan Pribumi (*Inlanders*). Setiap golongan tersebut dibedakan hak dan kedudukannya dalam masyarakat. Orang-orang Tionghoa peranan masuk dalam kelompok Timur Asing bersama orang India, Arab, dan Melayu.<sup>5</sup>

Sistem *apartheid* ini diterapkan di suatu masyarakat yang mengisolasi setiap golongan penduduk yang satu dari golongan penduduk yang lain secara fisik. Sistem ini mengharuskan penduduk tinggal di kampung-kampung tersendiri. Kebijakan inilah yang dinamakan *wijkenstelsel* (sistem perkampungan). Peraturan kampung Tionghoa peranan pada awalnya diberlakukan untuk melindungi orang-orang Tionghoa peranan dari sentimen-sentimen anti Tionghoa dan pemberontakan orang-orang Tionghoa peranan terhadap pemerintah Kolonial

---

<sup>3</sup> R. Supomo, *Sistem Hukum di Indonesia Sebelum Perang Dunia II*, (Jakarta: Noordhoff-Kolff N.V, 1954), hlm. 198.

<sup>4</sup> Onghokham, “Etnis Cina di Indonesia: Sebuah Catatan Sejarah,” *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*, ed. Wasmi Alhaziri (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 3.

<sup>5</sup> Andjarwati Noordjanah, *Komunitas Tionghoa di Surabaya* (Semarang: Mesiass, 2004), hlm. 82.

Hindia Belanda.<sup>6</sup> Peristiwa pembantaian orang-orang Tionghoa peranakan di Batavia tahun 1740 dan Perang Cina tahun 1742 mendorong pemerintah Kolonial Hindia Belanda membuat peraturan tersebut. Namun *wijkenstelsel* pada abad ke-19 memiliki alasan yang berbeda. Dalam *Staatsblad* tahun 1835 No. 37 dinyatakan bahwa sebab pertama adalah untuk menghindari tercampurnya (*almagatie*) berbagai bangsa di Jawa.

Alasan lain yang membuat pemerintah memperketat pelaksanaan peraturan tersebut adalah kekhawatiran pemerintah Hindia Belanda bahwa orang-orang Tionghoa peranakan dan pribumi akan bersatu menentang pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kekhawatiran tersebut memang berdasar. Terbukti dalam kerjasama antara seorang Tionghoa peranakan bernama Boen Seng dengan Raden Prawira Sentana, yang membahayakan keamanan Yogyakarta. Mulai tahun 1835, pelaksanaan peraturan kampung Tionghoa diperketat. Peraturan mengenai kampung Tionghoa juga dicantumkan dalam berbagai peraturan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, yakni dalam peraturan tahun 1818, 1827, dan 1854. Orang-orang Tionghoa peranakan dikumpulkan dalam kampung-kampung mereka sendiri dan diperintah oleh kepala-kepala mereka sendiri.<sup>7</sup> Sejak awal abad ke-19 hingga akhir masa kolonial, orang-orang Tionghoa dipimpin oleh opsir yang tingkatannya secara berurutan digolongkan sebagai *Majoor*, *Kapitein*, *Luitenant*, dan *Wijkmeester*. Di kota-kota besar seperti Surabaya, para opsir bersama-sama membentuk sebuah Dewan Tionghoa atau *Kongkoan*.<sup>8</sup>

Untuk mengadakan perjalanan dari kampung Tionghoa ke kampung Tionghoa yang lain atau ke kampung etnis lain, diperlukan surat pas jalan. Kebijakan ini dinamakan *passenstelsel* dan diberlakukan sejak 1816.

---

<sup>6</sup> Mona Lohanda, *Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2007), hlm. 243.

<sup>7</sup> Onghokham, "Terjadinya Suatu Minoritas," *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, ed. J. J. Rizal (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 41.

<sup>8</sup> Onghokham, "Keluarga-Keluarga Opsir Peranakan di Jawa," *Anti Cina, Kapitalisme Cina, Gerakan Cina*, ed. Wasmi Alhaziri (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 171.

*Passenstelsel* sangat merepotkan orang Tionghoa peranakan karena prosedur untuk mendapatkan sehelai kartu pas sulit dan membutuhkan waktu yang panjang, hanya untuk mendapatkan stempel mereka harus menunggu berjam-jam. Walau niat pemerintah Kolonial Hindia Belanda adalah untuk mengawasi gerak langkah penduduk, tetapi tersembunyi pula niat untuk mencegah hubungan komunikasi yang intens antara warga Tionghoa peranakan dengan penduduk setempat.<sup>9</sup>

Selain itu dalam hal penampilan fisik juga harus berbeda. Sebagai kelompok masyarakat asing, orang-orang Tionghoa peranakan dilarang menghilangkan ciri khas dan tanda fisik yang melekat pada dirinya. Kunci panjang (*thauwcang*) yang dikepang rapi dan dililit dengan pita merah harus tetap dipelihara, dan pakaian yang dikenakan adalah pakaian khas Tionghoa. Merupakan pelanggaran kriminal apabila mereka tampil di depan umum dengan menggunakan pakaian lain.<sup>10</sup> Pada tahun 1851 seorang pengelana Jerman yang bernama Gerstacker mencatat bahwa orang-orang Tionghoa peranakan telah mencoba untuk mengubah penampilan mereka, namun mereka dilarang melakukan hal tersebut oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda.<sup>11</sup>

Menjelang akhir abad ke-19, *wijkenstelsel* dan *passenstelsel* tak demikian terasa oleh para pemegang dan pegawai *pacht*,<sup>12</sup> karena sebagai pemegang atau pegawai *pacht* seseorang dapat bergerak dengan agak bebas atau tinggal di pedalaman, yang memungkinkan mereka berdagang, dapat menjadi perantara

---

<sup>9</sup> Onghokham, "Gerakan Cina," *Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina*, ed. Wasmi Alhaziri (Jakarta, 2008), hlm. 110.

<sup>10</sup> Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 82.

<sup>11</sup> Kees van Dijk, "Sarung, Jubah, dan Celana: Penampilan sebagai Sarana Pembedaan dan Diskriminasi," *Outward Appearances: Trend, Identitas, Kepentingan*, ed. Henk Schulte Nordholt (Yogyakarta: LKiS, 2005), hlm. 68.

<sup>12</sup> *Pachter* merupakan sistem perpajakan yang diberikan kepada para penguasa Jawa. Sistem perpajakan ini meliputi usaha yang dikerjakan oleh seseorang, di antaranya seperti pajak tanah, pajak rumah gadai, pajak candu, dan pajak pasar. James R. Rush, *Opium to Java, Jawa dalam Cengkeraman Bandar-Bandar Opium Cina, Indonesia Kolonial 1860-1910*, (Yogyakarta: Mata Bangsa, 2000), hlm., 34.

antara produsen dan konsumen.<sup>13</sup> Sistem *pacht* (sistem pajak) memang merupakan sumber pendapatan penting bagi orang-orang Tionghoa. Perdagangan candu misalnya merupakan sumber kehidupan orang-orang Tionghoa waktu itu.<sup>14</sup>

Sebelum dihapusannya sistem *pacht* orang-orang Tionghoa peranakan kurang memperhatikan dan enggan turut campur dalam persoalan politik. Selain itu, orang-orang Tionghoa peranakan juga kurang memberikan perhatian terhadap pelestarian budaya mereka, sehingga pada pertengahan abad ke-19 belum muncul perkumpulan-perkumpulan yang bertujuan untuk melestarikan budaya Tionghoa. Sedangkan perkumpulan yang bersifat politik dan bertujuan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan yang menyangkut posisi masyarakat Tionghoa peranakan baru muncul pada awal abad ke-20.<sup>15</sup>

Menjelang akhir abad ke-19, golongan peranakan dari suku Hokkian mendirikan perkumpulan Hokkian Kong Tik Soe, yang artinya perkumpulan orang-orang Tionghoa dari Hokkian. Perkumpulan tersebut bertujuan mengembangkan nasionalisme Tiongkok dengan cara melestarikan adat istiadat Tionghoa. Perkumpulan tersebut diresmikan secara sah oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda pada tanggal 9 Januari 1864, berdasarkan akte notaris dengan perantara notaris Meester Thomas Amre Klinkhamer. Perkumpulan tersebut diketuai oleh The Boen Hie yang bergelar Yang Thay Kong dengan wakil The Boen Keh, yang bergelar Tik Thay Kong dan Tjoa Djien Sing yang bergelar Tjee Tjhwan Kong. Tetapi siapa sebenarnya pendiri perkumpulan tersebut hingga saat ini belum diketahui. Latar belakang berdirinya perkumpulan tersebut adalah disebabkan banyak orang-orang Tionghoa peranakan yang meninggalkan tradisi leluhur dan mulai terpengaruh oleh budaya dan kepercayaan yang dianut oleh orang pribumi. Lunturnya budaya Tionghoa di lingkungan golongan Tionghoa

---

<sup>13</sup> Onghokham, "Chung Hwa Hui, PTI dan Indonesia Merdeka," *Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*, ed. J. J. Rizal (Jakarta: Komunitas Bambu, 2005), hlm. 126.

<sup>14</sup> Rush, *op. cit.*, hlm., 54.

<sup>15</sup> Leo Suryadinata, *Kebudayaan Minoritas Tionghoa di Indonesia*, terj: Dede Oetomo, (Jakarta: Gramedia, 1988), hlm., 55.

peranakan, bagi para pendiri Hokkian Kong Tik Soe menunjukkan lunturnya identitas ke-Tionghoa-an golongan peranakan.<sup>16</sup>

Lunturnya budaya Tionghoa di kalangan Tionghoa peranakan juga disebabkan oleh kebijakan pemerintah Hindia Belanda yang menekan orang-orang Tionghoa yang tidak beragama Kristen. Tekanan terhadap orang-orang Tionghoa peranakan yang tidak beragama Kristen adalah berupa pembedaan golongan-golongan rakyat yang ditetapkan dalam pasal 6-10 dari *Algemene Bepalingen van Wetgeving* pada tahun 1848. Peraturan tersebut membedakan rakyat Hindia Belanda ke dalam dua golongan yaitu Eropa dan Bumiputera. Untuk menentukan golongan tersebut, agama digunakan sebagai ukuran. Mereka yang beragama Kristen dimasukkan ke dalam golongan Eropa, termasuk orang pribumi yang beragama Kristen dimasukkan dalam golongan yang “dipersamakan” dengan orang Eropa, dan semua orang yang tidak beragama Kristen “dipersamakan” dengan orang Bumiputera. Hal itu mengakibatkan jumlah orang-orang Tionghoa yang meninggalkan agama Tionghoa menjadi semakin meningkat demi mendapatkan status Eropa. Pada awalnya untuk melestarikan budaya Tionghoa, perkumpulan Hokkian Kong Tik Soe membangun rumah ibadah bagi masyarakat Tionghoa. Rumah ibadah yang dinamakan Klenteng Hok An Kiong tersebut dibangun di Topekong Straat atau sekarang menjadi jalan Coklat pada tahun 1830 dan merupakan klenteng tertua di Surabaya. Selain membangun klenteng, perkumpulan Hokkian Kong Tik Soe juga menyusun peraturan-peraturan tentang perilaku sopan santun untuk orang-orang Tionghoa peranakan yang tinggal di Surabaya.<sup>17</sup>

Tujuan lain dari perkumpulan ini adalah memberikan bantuan untuk biaya pernikahan, kematian untuk umum, memenuhi keperluan ibadah agama dan perayaan-perayaan agama. Gerakan Hokkian Kong Tik Soe untuk melestarikan adat istiadat Tionghoa mendapat dukungan dari golongan peranakan maupun

---

<sup>16</sup> M. F. Somers, *Peranakan Chinese Politics in Indonesia*, (Ithaca: Modern Indonesia Project Cornell University, 1964), hlm., 34.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 56.

totok, sehingga dalam kurun waktu yang tidak lama perkumpulan tersebut berkembang menjadi perkumpulan terbesar dan terkaya di Surabaya. Perkumpulan tersebut tidak hanya berjasa dalam melestarikan adat istiadat Tionghoa, namun juga merangsang muncul dan berkembangnya berbagai perkumpulan Tionghoa peranakan di Surabaya. Pada awalnya Hokkian Kong Tik Soe hanya bersifat sosial dan tidak turut campur dalam masalah politik di Hindia Belanda, namun kebijakan politik pemerintah Hindia Belanda yang bersifat diskriminatif serta pengaruh situasi di Tiongkok akhirnya mendorong mereka untuk meninjau kembali identitas mereka sebagai orang Tionghoa serta turut aktif dalam gerakan nasionalisme Tiongkok.

Ada beberapa peristiwa yang mendorong timbulnya pergerakan nasionalis Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Pada akhir abad ke-19 pemerintah Kolonial Hindia Belanda memberlakukan Politik Etis yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan golongan pribumi. Pemerintah Kolonial Hindia Belanda memandang bahwa kegiatan dagang orang-orang Tionghoa di daerah-daerah pedesaan yang dihuni penduduk pribumi harus dibatasi secara ketat untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk pribumi, sebab orang-orang Tionghoa dianggap memiskinkan rakyat bumi putra melalui penjualan candu, usaha rumah gadai, dan kredit.<sup>18</sup> Oleh karena itu, sistem *pacht* dihapuskan, sedangkan sistem *Wijkenstelsel* dan *passenstelsel* tetap diterapkan dengan ketat.<sup>19</sup>

Dihapuskannya *pacht* pada akhir abad ke-19 mempersempit lahan pekerjaan di bidang perdagangan bagi orang-orang Tionghoa peranakan, padahal perdagangan adalah lapangan pekerjaan utama mereka.<sup>20</sup> Lapangan pertanian tertutup bagi orang-orang Tionghoa dengan adanya Undang-Undang Agraria

---

<sup>18</sup>P.H. Fronberg bahkan menggambarkan dominasi warga asing dengan mencatat, “orang Jawa membajak dan menanam, orang-orang Cina memanen, dan orang-orang Eropa membawanya pergi.” Dalam James R. Rush, *op. cit.*, hlm. 43.

<sup>19</sup> Leo Suryadinata, *Politik Tionghoa Peranakan di Jawa*, (Jakarta: Sinar Harapan, 1994), hlm. 22.

<sup>20</sup> Onghokham, “Chung Hwa Hui.... *loc. cit.*, hlm. 126.

1870.<sup>21</sup> Mereka juga tidak dapat menjadi *ambtenaar* karena sektor birokrasi pemerintahan tertutup bagi golongan Tionghoa peranakan.<sup>22</sup> Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda ini semakin menekan kehidupan orang-orang Tionghoa peranakan. Pada kondisi yang demikian ini nasionalisme Tiongkok menyebar di seluruh Asia Tenggara. Sebuah kelompok pembaharu di Tiongkok yang gagal dalam usahanya menjadikan Tiongkok sebagai suatu kerajaan konstitusional mencari perlindungan di berbagai negeri Asia Tenggara, dan menggunakan Singapura sebagai pangkalan baru bagi kegiatannya. Pengaruh paham mereka menyebar hingga ke Jawa yang letaknya berdekatan dengan Singapura.<sup>23</sup> Di saat yang sama ketika pemerintah Kolonial Hindia Belanda menekan orang-orang Tionghoa dengan berbagai peraturan, negeri Tiongkok mulai menaruh perhatian kepada orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Pada 1892 kaisar Tiongkok membicarakan soal emansipasi orang-orang Tionghoa di Hindia Belanda dengan pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Perhatian lainnya terlihat dari pengiriman kapal-kapal perang Tiongkok dengan seorang duta, inspektur-inspektur pengajaran, dan kemungkinan-kemungkinan untuk belajar di Negeri Tiongkok.<sup>24</sup> Satu identifikasi baru dengan Kebangsaan Tiongkok timbul dan mulai tumbuh di kalangan orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda.

Satu kejadian lain yang juga mendorong munculnya gerakan nasionalisme Tionghoa peranakan dan memperkuat nasionalisme Tiongkok di kalangan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda adalah ketika pada 1899 status orang-orang Jepang di Hindia Belanda dipersamakan dengan golongan Eropa.

---

<sup>21</sup> Dalam Undang-Undang Pertanian 1870 terdapat larangan untuk memindahkan hak milik sawah dari petani bumiputra kepada orang asing, lihat Clifford Geertz, *Involusi Pertanian: Proses Perubahan Ekologi di Indonesia* (Jakarta: Bhatara Karya Aksara, 1983), hlm. 88.

<sup>22</sup> Mely G. Tan, "Chinese Business in Indonesia," *Etnis Tionghoa di Indonesia* (Jakarta: Yayasan Obor, 2008), hlm. 117.

<sup>23</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 128.

<sup>24</sup> Onghokham, "Chung Hwa Hui.... *loc. cit.*, hlm. 129.



Pengangkatan status orang Jepang yang dipersamakan dengan golongan Eropa terjadi karena pemerintah Kolonial Hindia Belanda memandang bangsa Jepang merupakan satu-satunya bangsa di Asia Tenggara yang kuat akibat restorasi Meiji yang dilakukan kekaisaran Jepang untuk memodernisasi bangsanya.<sup>25</sup> Hal ini membuat orang-orang Tionghoa peranakan percaya jika negara Tiongkok kuat dan modern maka kedudukan mereka akan terangkat.

Memuncaknya ketidakpuasan terhadap pemerintah Kolonial Hindia Belanda dan menguatnya nasionalisme Tiongkok dalam masyarakat Tionghoa peranakan di Hindia Belanda melahirkan organisasi-organisasi pergerakan yang memperjuangkan nasib orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Organisasi pergerakan Tionghoa peranakan yang pertama kali lahir adalah Tionghoa Hwee Kwan (THHK – Perhimpunan Tionghoa) pada tahun 1900.<sup>26</sup> Salah satu program organisasi ini adalah mendirikan sekolah-sekolah berbahasa pengantar Tionghoa (Tionghoa Hak Tong) di seluruh Jawa.<sup>27</sup> Pembentukan THHK disusul dengan munculnya surat-surat kabar Tionghoa peranakan dalam bahasa Melayu Tionghoa, misalnya *Li Po* (1901 di Sukabumi), *Kabar Perniagaan* (1903 di Batavia), *Pewartu Soerabaia* (1902 di Surabaya), dan *Djawa Tengah* (1909 di Semarang). Setelah pemunculannya maka organisasi dan surat-surat kabar tersebut mendorong lebih lanjut rasa nasionalisme serta memperkuat perkembangan gerakan Tiongkok Raya, yaitu mempersatukan orang Tionghoa perantauan di Hindia Belanda dan mengarahkan orientasinya secara kultural dan politik ke negeri Tiongkok.<sup>28</sup>

Gerakan Tiongkok Raya semakin berkembang pesat di Hindia Belanda dengan terbentuknya *T'ung-meng Hui* (“himpunan yang disumpah bersama” – partai revolusioner dr. Sun Yat Sen) membentuk cabang di Batavia pada tahun 1907. Cabang ini segera mengubah namanya menjadi *Chi-nan She* (Klub

---

<sup>25</sup> Onghokham, “Chung Hwa Hui... *Ibid.*, hlm. 130.

<sup>26</sup> Gamal Komandoko, *Boedi Oetomo* (Jakarta: Media Pressindo, 2008), hlm. 23.

<sup>27</sup> Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 89.

<sup>28</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 23.

Pengembara Nanyang) dan mulai membangun taman-taman bacaan atau *Soe Po Sia* (Shu-pao She) di Hindia Belanda, yang bertujuan untuk menyebarkan doktrin-doktrin revolusioner. Sebelum pembentukan Republik Tiongkok, terdapat 52 taman bacaan di Hindia Belanda, diantaranya hanya 6 di Jawa. Taman-taman bacaan itu tidak hanya menyediakan bacaan, yang sebagian besar dalam bahasa Tionghoa, tetapi juga menyelenggarakan ceramah dan diskusi dengan menggunakan bahasa Tionghoa (dialek Hakka atau Kanton) sebagai bahasa perantara. Penggunaan bahasa Tionghoa sebagai bahasa pengantar dalam setiap diskusi menjadikan acara ini kurang menarik bagi kaum Tionghoa peranakan, karena banyak di antara mereka yang kurang menguasai bahasa leluhur mereka.<sup>29</sup>

Pembentukan THHK dan taman-taman bacaan ini semakin menyadarkan para pedagang Tionghoa peranakan bahwa kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda selama ini dirasakan sangat mendiskriminasikan golongan mereka. Apalagi dengan status orang-orang Jepang di Hindia Belanda yang dipersamakan dengan golongan Eropa menjadikan para pedagang Tionghoa semakin khawatir dengan kedudukan mereka sebagai pedagang perantara. Oleh karena itu, pada tahun 1907 *Siang Hwee* (Kamar Dagang Tionghoa) dibentuk di berbagai kota di Jawa yang bertujuan untuk memperkuat kedudukan para pedagang Tionghoa peranakan.<sup>30</sup>

*Sin Po* pada awalnya adalah surat kabar mingguan Tionghoa peranakan yang diterbitkan pada tahun 1910 di Batavia. Nama surat kabar ini kemudian diidentikan dengan golongan yang mendukung nasionalisme Tiongkok.<sup>31</sup> Tidak lama sesudah lahirnya Republik Tiongkok pada 1912, *Sin Po* berkembang menjadi surat kabar harian yang besar. *Sin Po* menjadi lawan utama *Kabar Pertiagaan*, yang dikuasai oleh opsir-opSir Tionghoa peranakan (juga dikenal sebagai Kapitan Cina) dan berpendirian konservatif. *Sin Po* di bawah pimpinan

---

<sup>29</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 24.

<sup>30</sup> R. N. Bayu Aji, *Tionghoa Surabaya dalam Sepak Bola* (Yogyakarta: Ombak, 2010), hlm. 22.

<sup>31</sup> Bayu Aji, *Ibid.*, hlm. 38.

Kwee Hing Tjiat (1916-1918) mulai bergerak memimpin masyarakat Tionghoa peranakan dalam hal-hal politik. Pengaruh *Sin Po* sebagai suatu kekuatan politik menjadi meluas sesudah Konferensi Semarang 1917.<sup>32</sup>

Menjelang pembentukan *Volksraad* (Dewan Rakyat) yang bersamaan dengan berlangsungnya Perang Dunia I muncul masalah *Indie Weerbar* (Pertahanan Hindia Belanda). Oleh karena merasa terancam oleh Jepang, beberapa orang yang tertarik pada masalah ini membentuk *Comite Indie Weerbar*<sup>33</sup> (Panitia Pertahanan Hindia Belanda) pada Juli 1916 dan mengajukan suatu usul untuk menerapkan wajib militer (milisi) bagi kawula Belanda.<sup>34</sup> Hampir bersamaan dengan itu, pada pertengahan 1917, dikeluarkan suatu peraturan mengenai keanggotaan *Volksraad*, yang menetapkan bahwa orang Belanda dan mereka yang berstatus Eropa (yaitu beberapa orang pribumi dan beberapa orang Tionghoa) mempunyai hak pilih. Ini berarti bahwa para anggota dewan daerah dari golongan Tionghoa yang berstatus Eropa mempunyai hak untuk memilih calon anggota *Volksraad*. Mula-mula tidak jelas berapa banyak orang Tionghoa akan diwakili dalam *Volksraad*.<sup>35</sup> Kedua isu penting ini mendorong diselenggarakannya konferensi yang mengundang berbagai organisasi Tionghoa peranakan untuk mendiskusikan masalah-masalah tersebut.

Konferensi organisasi-organisasi Tionghoa peranakan untuk membahas keikutsertaan golongan Tionghoa peranakan dalam *Volksraad* akhirnya diselenggarakan di Semarang pada tanggal 4 November 1917. Konferensi ini merupakan pertemuan terbesar yang pernah diselenggarakan oleh orang-orang

---

<sup>32</sup> Leo Suryadinata, "Tjoe Bou San: Nasionalis Tionghoa yang Mati Muda," dalam Ainin Dita Z (ed.), *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 3.

<sup>33</sup> Komite ini terdiri dari orang Eropa dan Indonesia. Orang-orang Indonesia dalam komite tersebut merupakan wakil-wakil dari Sarekat Islam, Budi Utomo, Persatuan Bupati, dan Persatuan Pangeran, lihat Robert Van Niel, *Elite Modern Indonesia* (Jakarta: Pustaka Jaya, 2010), hlm. 191-192.

<sup>34</sup> Gamal Komandoko, *op. cit.*, hlm. 115.

<sup>35</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa.... op. cit.*, hlm. 28.

Tionghoa peranakan sejak timbulnya gerakan Tiongkok Raya.<sup>36</sup> *Sin Po* yang berada di bawah pimpinan Kwee Hing Tjiat dan didukung oleh organisasi Tionghoa peranakan lainnya menolak usul Kan Hok Hoei, seorang Tionghoa peranakan yang pro Belanda, untuk ikut serta dalam politik lokal dengan alasan bahwa orang Tionghoa peranakan adalah warga negara Tiongkok. Penolakan itu ada hubungannya dengan rencana pemerintah Hindia Belanda mengadakan *Indie Weerbar* dimana kawula Hindia Belanda diwajibkan menjadi milisi. Hal ini merupakan salah satu sebab Tionghoa peranakan tidak mau dianggap kawula Hindia Belanda.<sup>37</sup>

Sementara mereka yang mendukung pandangan-pandangan *Sin Po* mulai dianggap sebagai suatu kelompok tertentu, yang dikenal sebagai kelompok *Sin Po*. Kelompok ini menganjurkan persatuan antara kaum Tionghoa peranakan dan Tionghoa totok, mendorong anak-anak kaum Tionghoa peranakan untuk mendapatkan pendidikan Tiongkok dan mendukung keikutsertaan orang Tionghoa peranakan dalam dunia politik negeri Tiongkok. Golongan *Sin Po* menolak untuk ambil bagian dalam masalah politik setempat, sebab mereka percaya bahwa hal itu dapat memecah belah golongan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Negeri Tiongkok adalah pelindung bagi orang-orang Tionghoa peranakan perantauan, dan kaum Tionghoa peranakan dapat mempertahankan hidupnya kalau mereka terikat dengan Tiongkok. Tidak jelas bagaimana Tiongkok dapat melindungi mereka, tetapi mereka mengisyaratkan bahwa ada kemungkinan untuk mencapai hal ini lewat saluran diplomasi. Oleh karena itu, *Sin Po* mengutuk opsir-opsir Tionghoa peranakan dan para pemimpin Tionghoa peranakan yang dalam pandangan mereka yang bermaksud memimpin golongan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda ke arah yang salah.<sup>38</sup>

Pada 1918 *Sin Po* yang ketika itu dipimpin Tjoe Bou San mulai menggerakkan orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda untuk memberantas

---

<sup>36</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa.... Ibid.*, hlm. 29.

<sup>37</sup> Suryadinata, "Tjoe Bou San.... *loc. cit.*", hlm. 3-4.

<sup>38</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa....op. cit.*, hlm. 38-39.

undang-undang tentang Kawula Negara Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*, selanjutnya disebut WNO) yang menyatakan bahwa semua orang Tionghoa Hindia Belanda adalah kawula Belanda.<sup>39</sup> Perlu disebutkan di sini bahwa sebelum Revolusi 1911, Kekaisaran Tiongkok sudah mengumumkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kekaisaran (pada 1909) dimana ditegaskan bahwa semua orang yang berdarah Tionghoa dianggap berkewarganegaraan Tiongkok. Setahun sesudah itu, pemerintah Belanda juga mengumumkan bahwa penduduk yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Belanda (*Nederlands Onderdanen*), dan secara otomatis Tionghoa peranakan menjadi kawula Belanda.<sup>40</sup>

Sikap dan pandangan politik kelompok *Sin Po* ini dapat dilihat dari tulisan Tjoe Bou San, pemimpin redaksi *Sin Po*, yang menulis sebuah artikel berjudul “Fromberg dan Pergerakan Tionghoa” dalam harian *Sin Po* untuk mengampanyekan penentangan terhadap WNO. Artikel ini ditulis untuk mengkritik P.H. Fromberg Sr, seorang ahli hukum Belanda yang bersimpati pada golongan Tionghoa peranakan dan menganjurkan Tionghoa peranakan untuk menerima WNO. Dalam artikel tersebut Tjoe Bou San berargumen bahwa orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda adalah orang asing yang berbeda kepentingan dengan golongan lain di Hindia Belanda sehingga harus menolak WNO melalui pernyataannya sebagai berikut:

Tanda paling terutama yang orang ada jadi rakyat dari suatu negeri bukan yang orang mesthi menanggung kewajiban milisi, seperti rupanya hendak dibikin orang percaya oleh itu propagandis-propagandis, dengan membilang yang Hindia Belanda satu hari satu malam bisa terancam dengan bahaya lantaran serangan dari luar – tapi yang orang ada punya hak atas tanah di itu negeri, satu hak yang tiada didapat oleh orang asing. Sebaliknya keadaan orang Tionghoa kurang lebih sudah jadi orang asing, sebab mereka tidak ada hak atas tanah, yang menjadi tanda rakyat dari Hindia Belanda. Yang mempunyai itu hak melainkan orang Bumiputera. Maka orang Bumiputera bolehlah merasa senang akan tanggung kewajiban milisi, kalau mereka memang merasa senang akan tanggung kewajiban milisi, kalau mereka memang merasa dengan terampasnya Hindia oleh lain

---

<sup>39</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa....ibid.*, hlm. 43.

<sup>40</sup> Suryadinata, “Tjoe Bou San.... *loc. cit.*”, hlm. 4.

bangsa mereka punya kemajuan yang telah didapat sekarang akan jadi mundur kembali. Juga orang Belanda boleh merasa senang tanggung kewajiban milisi buat belakan mereka punya hak dipertuan di ini Hindia. Tapi orang Tionghoa, apakah yang mereka mau belakan, hingga mereka mesti merasa senang angkat senjata buat lindungi Hindia dari serangan luar?<sup>41</sup>

Tjoe Bou San berpendapat bahwa pemerintah Hindia Belanda mendiskriminasi, merendahkan orang-orang Tionghoa peranakan, dan tidak akan menjamin kepentingan orang-orang Tionghoa peranakan. Untuk menjamin kepentingan serta meningkatkan status tersebut, Bou San menganjurkan orang-orang Tionghoa peranakan harus membantu negeri Tiongkok agar menjadi kuat sehingga bisa melindungi orang-orang Tionghoa perantauan. Dalam pandangannya, pemerintah Hindia Belanda tidak berhak untuk menuntut kewajiban menjadi milisi kepada golongan Tionghoa peranakan, sebab golongan Tionghoa peranakan tidak diperlakukan sebagai warga negara oleh pemerintah Hindia Belanda, melainkan diperlakukan sebagai orang asing dengan peraturan yang melarang golongan Tionghoa peranakan memiliki tanah di Hindia Belanda. Oleh karena itu golongan Tionghoa peranakan sebagai orang asing tidak berkepentingan untuk turut serta membela negara Hindia Belanda.

Kampanye menentang WNO sebenarnya terjadi delapan tahun setelah diumumkannya WNO. Kampanye itu terjadi ketika milisi akan dikenakan pada kaum Tionghoa peranakan. Kelompok *Sin Po* berhasil melancarkan kampanye ketika milisi diusulkan dalam *Volksraad*. Tujuan jangka pendek kampanye ini adalah untuk menghapuskan usul tentang milisi. Namun demikian, itu bukanlah satu-satunya tujuan. Oleh karena tidak puas dengan status golongan Tionghoa peranakan yang lebih rendah, kelompok *Sin Po* berusaha memperoleh status Eropa untuk golongan Tionghoa peranakan. Mereka tidak memperjuangkan persamaan semua ras yang ada di Hindia Belanda, tetapi hanya antara orang Tionghoa peranakan dan Belanda. Dalam pengertian ini, kampanye tersebut

---

<sup>41</sup> Tjoe Bou San, "Fromberg dan Pergerakan Tionghoa", dalam Leo Suryadinata, (ed.) *Pemikiran Politik Etnis Tionghoa Indonesia 1900 – 2002*, (Jakarta: LP3ES, 2005), hlm. 45-46.

merupakan suatu ungkapan ultranasionalisme Tiongkok sebab bagi golongan *Sin Po* orang-orang Tionghoa peranakan memiliki kedudukan yang lebih tinggi daripada orang-orang pribumi.<sup>42</sup>

Usaha menentang WNO mengalami kegagalan, dalam arti bahwa orang Tionghoa Hindia Belanda tidak memperoleh baik hak *repudiasi* (penolakan) maupun status Eropa. Dibatalkannya usul milisi menyebabkan kampanye kehilangan daya geraknya. Banyak kaum Tionghoa peranakan dan kaum pengusaha kaya yang tidak menyokong kampanye karena mereka mempunyai kepentingan-kepentingan yang sudah mantap di Hindia Belanda. Akhirnya, yang paling penting, reaksi Pemerintah Tiongkok terhadap kampanye itu tidak membantu. Pemerintah Tiongkok mengalami kesukaran dalam menuntut kaum Tionghoa peranakan di Hindia sebagai warga negaranya. Perjanjian Konsuler akhirnya diperbarui dan ini secara langsung memadamkan kampanye menentang WNO.<sup>43</sup>

Kekecewan-kekecewaan yang diterima oleh kaum Tionghoa peranakan menjadikan pemerintah Hindia Belanda membuat kebijakan-kebijakan baru untuk mengatasi ketidakpuasan di kalangan Tionghoa peranakan dan meredam gerakan-gerakan yang menyebarkan nasionalisme Tiongkok. Dengan undang-undang tahun 1907 orang-orang Tionghoa peranakan dapat memperoleh status Eropa dengan persyaratan khusus. Pada 1908 *Hollandsch Chineesche School* (HCS) atau sekolah dasar berbahasa Belanda khusus anak-anak Tionghoa dibuka untuk mengimbangi sekolah THHK. Praktik-praktik anti diskriminasi terhadap penduduk Tionghoa peranakan benar-benar dihapus pada 1918 yang ditandai dengan penghapusan *passenstelsel*.<sup>44</sup>

Dalam pertengahan tahun 1920-an, banyak kaum terpelajar Tionghoa peranakan yang pulang ke Hindia Belanda setelah menempuh pendidikan di Negeri Belanda; dan diantara mereka bermaksud untuk melibatkan diri dalam

---

<sup>42</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa.... op. cit.*, hlm. 49.

<sup>43</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa.... ibid.*, hlm. 49-50.

<sup>44</sup> Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 87.

politik setempat guna memperbaiki posisinya. Berbeda dengan kelompok *Sin Po* yang mengharapkan perlindungan dari Negeri Tiongkok dan ingin bekerja di luar lembaga-lembaga kolonial, para cendekiawan Tionghoa peranakan didikan Belanda ini tidak melihat Tiongkok sebagai suatu sumber perlindungan. Lebih benar, mereka melakukan usaha sendiri untuk bekerja di dalam kerangka kolonial yang ada. Pada bulan Agustus 1926 mereka membentuk satu perhimpunan bernama *Chung Hwa Club*, yang mengambil prakarsa dalam membuat persiapan bagi kongres untuk membentuk satu organisasi Tionghoa baru.<sup>45</sup>

Kongres *Chung Hwa Club* pertama diselenggarakan pada 19-20 April 1927. Kaum Tionghoa peranakan berpendidikan Belanda dan para pengusaha Tionghoa peranakan paling aktif mensponsori kongres tersebut. Kongres yang diselenggarakan di Semarang itu, pusat dari sejumlah Tionghoa peranakan yang kaya, dihadiri oleh kira-kira 300 orang. Peserta kongres ini mencakup lebih banyak kaum Tionghoa peranakan terpelajar dan sangat sedikit kaum Tionghoa totok. Kongres ini menghasilkan keputusan untuk mendirikan organisasi politik, dan panitia persiapan kongres diberi tanggung jawab untuk menyusun anggaran dasar organisasi itu. Setahun kemudian, bulan April 1928, diadakan Kongres *Chung Hwa* kedua di Semarang. Dalam kongres ini *Chung Hwa Hui* (Perhimpunan Tionghoa, selanjutnya disebut CHH) secara resmi lahir pada tanggal 8 April 1928, HH Kan terpilih menjadi ketuanya.<sup>46</sup>

Tujuan CHH menurut Anggaran Dasarnya adalah “bekerja untuk perbaikan orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda dalam arti luas dengan menggunakan sarana yang benar dan menurut hukum”.<sup>47</sup> CHH menerima kedudukan kawula Belanda dan menganggap hubungan orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda dengan negeri Tiongkok hanya sebatas hubungan kebudayaan, sedangkan untuk persoalan sosial dan politik tidak ada sangkut

---

<sup>45</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa.... op. cit.*, hlm. 56-57.

<sup>46</sup> Suryadinata *Ibid.*, hlm. 62-70.

<sup>47</sup> Suryadinata *Ibid.* hlm. 70.



pautnya dengan soal-soal ketatanegaraan negeri Tiongkok.<sup>48</sup> CHH mendapatkan dukungan terutama dari orang-orang Tionghoa peranakan kaya seperti opsir, tuan tanah, pengusaha besar, dan kaum cendekiawan. Kelompok ini bersikap loyal kepada rezim Kolonial Hindia Belanda, karena mereka merasa lebih aman di bawah kekuasaan Kolonial Hindia Belanda. Salah satu bukti keberpihakan CHH adalah penggunaan bahasa Belanda sebagai bahasa pengantar dalam rapat-rapat yang diselenggarakan.<sup>49</sup> Mereka agak jauh dari kaum Tionghoa peranakan jelata. Tionghoa peranakan jelata sering menyebut CHH sebagai golongan borjuis karena sikap elitis CHH.<sup>50</sup> Bertentangan dengan golongan *Sin Po*, CHH menganjurkan agar WNO diterima, demikian juga agar orang Tionghoa peranakan berpartisipasi dalam dewan-dewan lokal dan *Volksraad*.<sup>51</sup> Kehadiran CHH merupakan bentuk tumbuhnya orientasi politik baru yang berkiblat pada Hindia Belanda.

Para pemimpin CHH yang paling terkemuka adalah HH Kan dan Phoa Liong Gie. Persepsi mereka mengenai kedudukan orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda patut mendapat perhatian. Kan beranggapan bahwa kepentingan kaum Tionghoa peranakan akan terjamin baik di bawah pemerintahan Kolonial Hindia Belanda dan karena itu dalam orientasi politiknya ia menjadi sangat pro-Belanda. Pada tahun 1918 ia memasukkan laporan yang mendukung *status quo*.<sup>52</sup> Sampai tahun 1941 Kan masih selalu mendukung pemerintahan Belanda. Pada bulan November 1941, Kan menyatakan dengan jelas bahwa ia menentang setiap pembaruan politik di Hindia Belanda.<sup>53</sup>

Pemimpin lainnya, Phoa Liong Gie, seorang pengacara muda yang menjadi anggota Badan Pimpinan Pusat CHH, berpendapat agak berbeda. Seperti

---

<sup>48</sup> Onghokham, "Chung Hwa Hui.... *op. cit.*, hlm. 136.

<sup>49</sup> Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 93.

<sup>50</sup> Onghokham, "Chung Hwa Hui... *loc. cit.*, hlm. 136.

<sup>51</sup> Leo Suryadinata, *Dilema Minoritas Tionghoa* (Jakarta: Grafitipers, 1984), hlm. 50.

<sup>52</sup> van Niel, *op. cit.*, hlm. 271.

<sup>53</sup> Suryadinata, *Dilema Minoritas... op. cit.*, hlm. 51-52.

halnya HH Kan, Phoa juga mendukung WNO. Walaupun demikian ia berpendapat tidak ada seorang pun yang berhak mendesak kelompok minoritas Tionghoa peranakan ini ke salah satu pihak dalam pertentangan antara orang Belanda dan orang pribumi. Selanjutnya Phoa mengatakan bahwa orang Tionghoa peranakan harus bersikap netral dalam pertentangan tersebut (tidak pro-Belanda tetapi juga tidak mendukung pribumi) serta tetap melayani kelompok yang sedang berkuasa, baik itu Belanda maupun pribumi.<sup>54</sup> Pemikiran Phoa Liong Gie ini membuat CHH dianggap sebagai oportunist oleh kaum nasionalis pribumi.<sup>55</sup>

Sesudah terjadinya pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) pada November 1926, rezim Kolonial Hindia Belanda bersikap semakin reaksioner terhadap pergerakan nasional pribumi. Pada periode antara 1927 hingga 1942, Hindia Belanda telah berubah menjadi *Politie Staat*.<sup>56</sup> Pengawasan sedemikian rupa, dan larangan-larangan terhadap pers maupun gerakan-gerakan lainnya demikian keras, sehingga banyak orang beranggapan bahwa sejak itu pemerintah Hindia Belanda sudah menjadi sistem diktatur yang terselubung.<sup>57</sup> Semua harapan bagi terjalinnya kerjasama dengan pemerintah Hindia Belanda benar-benar sudah hancur. Satu-satunya taktik yang dimungkinkan untuk masa mendatang hanyalah perlawanan terhadap Kolonial Hindia Belanda.<sup>58</sup> Antagonisme rasial yang semakin meningkat antara Belanda dan Pribumi ini membuat nasionalisme pribumi semakin berkembang. Kehancuran PKI dan semakin tidak aktifnya Sarekat Islam memberikan jalan lapang bagi pergerakan nasional yang berhaluan nasionalisme sekuler. Perserikatan Nasional Indonesia yang berdiri pada 4 Juli

---

<sup>54</sup> Suryadinata, *Dilema Minoritas... Ibid.*, hlm. 52.

<sup>55</sup> Bayu Aji, *op. cit.*, hlm. 26.

<sup>56</sup> Pengawasan ketat terhadap para aktivis dan organisasi pergerakan nasional oleh *Politieke Inlichtingen Dienst* (PID) menyebabkan munculnya anggapan ini. Lihat Onghokham, *Runtuhnya Hindia Belanda* (Jakarta: Gramedia, 1989), hlm. 54.

<sup>57</sup> R.Z. Leirissa, *Sejarah Masyarakat Indonesia 1900-1950* (Jakarta: Akademika Pressindo, 1985), hlm. 69.

<sup>58</sup> M. C. Ricklefs, *Sejarah Indonesia Modern* (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 2005), hlm. 274.

1927 segera menjadi perhatian utama dan mengambil alih tempat utama dalam pergerakan nasional.

Pada tahun 1930-an telah nampak adanya suatu masyarakat baru, yang dapat dinamakan masyarakat Indonesia. Masyarakat baru ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang sudah sanggup membedakan antara identitas suku dan kepentingan nasional. Ciri-ciri masyarakat baru ini nampak dalam alam pikiran mereka yang tidak lagi terbatas pada alam pikiran tradisional. Cita-cita mereka mengarah pada suatu satuan politik baru yang terlepas dari ikatan-ikatan tradisional maupun kolonial Belanda. Indonesia Merdeka adalah semboyan paling ekstrim dari cita-cita itu.<sup>59</sup>

Perkembangan nasionalisme Indonesia ini mendapat perhatian dari sebagian kalangan Tionghoa peranakan. Selain situasi politik tersebut, keadaan ekonomi pada masa tersebut juga memunculkan persepsi baru dalam masyarakat Tionghoa peranakan. Pasar saham dunia hancur dan 40 persen nilai saham hilang pada Oktober 1929, dunia mengalami kekacauan ekonomi yang kemudian dikenal dengan sebutan *Great Depretion*.<sup>60</sup> Depresi ekonomi dunia yang berdampak besar pada Hindia Belanda antara tahun 1929-1935 ini turut melahirkan kesadaran bagi Tionghoa peranakan bahwa nasib mereka berhubungan dengan nasib rakyat pribumi. Tidak demikian dengan golongan Tionghoa totok yang masih dapat meninggalkan Hindia Belanda untuk kembali ke Negeri Tiongkok. Di Tiongkok mereka mempunyai keluarga yang menampung, sementara Tionghoa peranakan tidak lagi mempunyai saudara di Negeri Tiongkok. Tionghoa peranakan, terutama yang bekerja sebagai buruh dan usaha-usaha kecil, harus menerima nasib yang sama seperti kaum pribumi pada umumnya. Ini menyadarkan mereka bahwa tanah air mereka adalah Indonesia, dan mereka menjadi salah satu bagiannya.<sup>61</sup>

---

<sup>59</sup> Leirissa, *op. cit.*, hlm., 68.

<sup>60</sup> Howard Cincotta, *ed.*, *Garis Besar Sejarah Amerika* (Jakarta: USIS, 2008), hlm. 285.

<sup>61</sup> Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 94-95.

Kelahiran Partai Tionghoa Indonesia (PTI) sebagai sebuah partai Tionghoa peranakan yang berhaluan nasionalis pribumi memang tepat pada saatnya. Munculnya PTI dalam kancah pergerakan nasional Indonesia diawali oleh sebuah peristiwa boikot pemberitaan sepakbola oleh para wartawan “kulit berwarna” di Surabaya pada Mei 1932. Kala itu Bekker, seorang wartawan Belanda yang juga pejabat dalam kepengurusan *Nederlandsch Indische Voetbal Bond* (NIVB/federasi sepakbola Hindia Belanda pada saat itu), melarang wartawan bangsa kulit berwarna (pribumi dan *Vreemde Oosterlingen*) datang meliput pertandingan. Alasan pelarangan peliputan tersebut adalah karena wartawan kulit berwarna sering menjelek-jelekkkan NIVB. Liem Koen Hian yang saat itu menjadi pemimpin redaksi surat kabar *Sin Tit Po* marah, kemudian menyerukan agar dilakukan pemboikotan pemberitaan dan tidak menonton pertandingan sepakbola yang diselenggarakan NIVB. Semua surat kabar milik orang kulit berwarna dan masyarakat Surabaya mengikuti boikot seruan Liem.<sup>62</sup> Liem kemudian ditangkap oleh PID namun tak lama kemudian dibebaskan karena protes dari pemimpin-pemimpin nasionalis Indonesia di *Volksraad*.

Beberapa bulan kemudian Liem Koen Hian, Ong Liang Kok, dan kaum peranakan lainnya di Surabaya mendirikan PTI pada 25 September 1932. Persatoean Bangsa Indonesia (PBI) dan kaum nasionalis Indonesia moderat lainnya, terutama dr. Soetomo dan Soeroso, ikut menyokong berdirinya PTI. Tujuan PTI adalah “membantu kemajuan ekonomi, sosial dan politik dari Indonesia sampai jadi satu negara (*staat*) dengan satu rupa hak dan kewajiban buat sekalian orang rakyatnya”.<sup>63</sup>

### **3.2 Pers Tionghoa Peranakan Surabaya dari Komersialisasi Menuju Konflik Politik**

Kuartal terakhir abad ke-19 menandai era baru sejarah pers di Hindia Belanda. Dalam periode ini mulai dikenal persaingan yang kadang-kadang berkembang

---

<sup>62</sup> Bayu Aji, *op. cit.*, hlm. 113-115

<sup>63</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa ... op. cit.*, hlm. 87.

menjadi suatu polemik di antara para editor dan di antara penerbit industri pers. Dalam periode ini juga mulai muncul tema-tema baru yang mulai muncul dalam kehidupan masyarakat Kolonial Hindia Belanda. Meningkatnya minat yang diperlihatkan oleh penerbit dan editor secara tiba-tiba merupakan suatu fenomena baru dalam dunia pers itu sendiri. Selama dua dasawarsa abad itu, hampir setiap tahun bisa dibaca pengumuman atau rencana peluncuran sebuah surat kabar baru di kota-kota penting di Jawa, dan dengan derajat yang lebih di luar Jawa. Pada dasawarsa ini mulai banyak orang bumiputera dan peranakan Tionghoa yang terjun ke dalam dunia jurnalistik, baik sebagai koresponden ataupun redaktur. Surat-surat pembaca yang ditujukan kepada redaksi, dan topik-topik yang dibahas di halaman-halaman surat kabar pada sepertiga terakhir abad ke-19 telah menunjukkan adanya suatu perubahan sosio-ekonomi di Hindia-Belanda yang sifatnya fundamental sebagaimana kelompok lain bergulat memasuki suasana transformasi.

Bagi kalangan percetakan, editor, dan penerbit bangsa Eropa, pers biasanya sebagai bentuk lain dari usaha ekonomi yang bisa dikembangkan oleh ekonomi kapitalis Belanda, landasan bagi perdagangan bebas yang ditegakkan oleh para tokoh liberal di Belanda. Kesuksesan penerbitan surat kabar pada sepanjang abad ke-19 ditentukan oleh para penerbit dan para editornya dalam mencari dukungan keuangan yang terus menerus dalam bentuk pemasangan iklan secara tetap dari perusahaan besar dan kelompok-kelompok usaha yang terkenal. Untuk beberapa usaha penerbitan yang besar, mereka menunjuk seorang agen yang mewakili pers di Eropa. Tugas agen ini adalah mencari pelanggan di kalangan bisnis dengan mendistribusikan surat kabar dan membujuk mereka untuk melakukan transaksi dengan Hindia-Belanda. Kelihatannya hal ini jugalah yang mendorong beberapa perusahaan Belanda menerbitkan surat kabar dengan bahasa Melayu di Belanda pada awal 1890-an. Bahkan para golongan misionaris mulai menyadari kegunaan media pers ini untuk penyebaran agama protestan di kalangan masyarakat pribumi dan Tionghoa peranakan.

Kompetisi antar surat kabar berlangsung dengan sangat seru. Semua penerbit secara sadar mengiklankan surat kabar mereka. Watak kompetitif bisnis

surat kabar akhirnya berubah menjadi persaingan pribadi di antara para editor. Kesuksesan para penerbit surat kabar berbahasa anak negeri pada abad ke-19 disebabkan oleh kecerdikan mereka dalam menggunakan bahasa Melayu yang paling umum digunakan, seperti Melayu rendah, bahasa kaum, Melayu sedang, dan Melayu Betawi, yang semuanya merujuk pada bentuk sederhana bahasa Melayu yang tidak perlu mengikuti aturan ketatabahasaan.

Kompetisi antar penerbit bukanlah satu-satunya hal yang dikhawatirkan, melainkan adanya ketakutan akan terjebak dalam UU Pers 1856. Sebagian besar pelanggaran yang dilakukan oleh editor adalah yang berkaitan dengan pencemaran nama baik bukanlah masalah politik. Sanksi terhadap pelanggaran oleh pers berbahasa Melayu rendah sangat keras. Seorang editor yang terkena delik pers akan dihukum dibuang dari Hindia Belanda dan terkadang terjadi penutupan perusahaan percetakan serta pembredelan surat kabar.<sup>64</sup>

Keterlibatan golongan Tionghoa peranakan secara tidak langsung di dalam perkembangan pers sudah lama terjadi. Bahkan dapat dikatakan bahwa kehidupan pers pada abad ke-19 tidak dapat dilepaskan dari keterlibatan golongan Tionghoa sebagai kelompok pelanggan yang kuat. Pers abad ke-19 sebagai media iklan sangat menarik para pedagang dan pemilik toko Tionghoa.<sup>65</sup> Oleh karena itu, tidaklah aneh apabila ciri khas pers abad ke-19 adalah berorientasi komersial dengan banyaknya halaman surat kabar yang diisi iklan. Bagi orang Tionghoa yang mengenyam pendidikan tertentu, ragam Melayu rendah dengan tulisan latin merupakan medium yang paling sederhana dan sarana komunikasi tertulis yang efektif.<sup>66</sup>

Selain memanfaatkan pers sebagai media penunjang usaha, orang-orang Tionghoa juga menjadikan pers sebagai alat untuk mengemukakan pendapat.

---

<sup>64</sup> Mirjam Maters, *Dari Perintah Halus ke Tindakan Keras: Pers Zaman Kolonial Antara Kebebasan dan Pemberangusan*, (Jakarta: Hasta Mitra, 2003), hlm. 54.

<sup>65</sup> Ahmat Adam, *Sejarah Awal Pers dan kebangkitan Kesadaran Ke-indonesiaan 1855-1913*, terj., Amaran Loebis dan Mien Joebhar, (Jakarta: Hasta Mitra, Pustaka Utan kayu, dan Perwakilan KITLV, 2003), hlm. 101.

<sup>66</sup> Adam, *ibid.*, hlm. 102.

Kebijakan-kebijakan pemerintah kolonial Belanda yang dianggap merugikan golongan Tionghoa diungkapkan lewat surat kabar-surat kabar berbahasa Melayu. Golongan Tionghoa telah menjadikan surat kabar sebagai sarana komunikasi yang sangat membantu. Selain faktor keuntungan ekonomi, kondisi di mana golongan Tionghoa memerlukan sarana untuk menyuarakan pendapatnya secara khusus merupakan pendorong bagi mereka untuk terjun di industri pers. Hal yang terakhir inilah yang menjadi motivasi utama golongan Tionghoa untuk menerbitkan sendiri surat kabarnya terutama pada dasawarsa pertama abad ke-20.

Pada 1886 keinginan untuk ikut terlibat sebagai aktor dalam industri pers di Surabaya terwujud. Seorang Tionghoa peranakan, Tjoa Tjoan Lok,<sup>67</sup> berhasil membeli salah satu perusahaan percetakan tertua di Surabaya, Gebroeders Gimberg & Co. sekaligus memperoleh hak untuk menerbitkan surat kabar berbahasa Melayu Bintang Timor. Bintang Timor adalah salah satu surat kabar Indo-Belanda tertua di Surabaya. Berdasarkan catatan yang masih dapat ditelusuri, Bintang Timor terbit pertama kali pada 1860 dengan nama Bientang Timoor,<sup>68</sup> di bawah arahan J.Z. van den Berg sebagai pemimpin redaksi. Surat kabar ini awalnya terbit dua kali dalam seminggu. Agen distribusinya ialah Morel di Semarang dan Lange & Co. di Batavia, Van Zadelhof dan Fabritius bertindak sebagai agen di Padang dan Sutherland di Makassar. Pada pertengahan 1886, Bintang Timor mengumumkan bahwa Gebroeders Gimberg & Co. mengalami kesulitan keuangan. A. Johannes, manajer bisnis perusahaan tersebut, mengumumkan bahwa Gebroeders Gimberg & Co. sudah bangkrut.<sup>69</sup>

---

<sup>67</sup> Tjoa Tjoan Lok adalah anggota dari salah satu keluarga elite Tionghoa peranakan di Surabaya. Menurut Ong Hok Ham terdapat tiga famili elite Tionghoa peranakan di Surabaya yang menguasai jabatan opsir Tionghoa yakni Han, Tjoa, dan The. Lihat Ong Hok Ham. "Han, Tjoa, dan The di Surabaya: Tiga Famili Elite Peranakan di Abad ke-19", dalam *Star Weekly*, No. 656, 26 Juli 1958, hlm. 6-8.

<sup>68</sup> Ejaan nama surat kabar ini berubah menjadi Bintang Timor pada edisi 11 Oktober 1865 (No. 81). Perubahan lainnya adalah ukuran surat kabar ini yang lebih besar dari sebelumnya, dan namanya berubah menjadi bintang Soerabaia. Adam, *op. cit.*, hlm. 103

<sup>69</sup> Adam, *ibid.*, hlm. 104.

Pada 20 Desember 1886, Bintang Timor memuat sebuah iklan yang menyebutkan bahwa perusahaan tersebut akan dilelang pada 24 Desember 1886 di kantor Weeskamer Surabaya. Pelelangan tersebut termasuk hak untuk menerbitkan Bintang Timor dan *Indische Opmerker* yang juga diterbitkan oleh perusahaan percetakan itu. Pada hari penjualan, Tjoa Tjoan Lok, tampil sebagai penawar tertinggi dengan harga 24.600 gulden.<sup>70</sup> Ia berhasil mendapatkan hak milik atas perusahaan tersebut sekaligus mendapatkan hak penerbitan Bintang Timor. Dengan pembelian ini, golongan Tionghoa secara langsung telah terlibat dalam industri pers di Hindia Belanda sebagai pemilik modal dan pengelola.

Meskipun bukan orang Tionghoa peranakan pertama yang memiliki percetakan di Hindia Belanda, Tjoa Tjoan Lok adalah orang pertama yang mewarisi koran yang memiliki nama besar. Sebelumnya, pada 1884 ada tiga orang Tionghoa di Batavia yang memiliki perusahaan percetakan sendiri, yaitu Oeij Tjai Hin, Goan Hong, dan Yap Goan Ho. Walaupun tidak menerbitkan surat kabar, mereka terjun ke bisnis penerbitan cerita-cerita legenda Tiongkok yang diterjemahkan ke dalam bahasa Melayu.<sup>71</sup> Setahun berikutnya, Liem Kim Hok membeli percetakan dari janda mendiang D.J. van der Linden, seorang misionaris Protestan dan editor Bintang Djohar. Iapun tidak menerbitkan surat kabar, hanya mencetak buku-buku untuk sekolah dan kebutuhan kantor.<sup>72</sup> Dengan begitu Tjoa Tjoan Lok merupakan orang Tionghoa peranakan pertama yang membeli perusahaan penerbitan yang digunakan untuk menerbitkan surat kabar.

Format perusahaan penerbitan yang tidak banyak berubah sejak pengambilalihan kepemilikan dan status awalnya dari pemilik pertama sebagai surat kabar milik Indo-Belanda oleh Tjoa Tjoan Lok mengakibatkan perdebatan di antara peneliti pers Tionghoa peranakan, apakah Bintang Soerabaia termasuk ke

---

<sup>70</sup> Kemenangan Tjoa Tjoan Lok dalam lelang tersebut dipengaruhi oleh adanya dukungan Tjoa Sien Hie, seorang letnan Tionghoa di Surabaya, ketika melakukan pembelian percetakan itu. Adam, *ibid.*, hlm. 111.

<sup>71</sup> Adam, *ibid.*, hlm. 116.

<sup>72</sup> Tio Ie Soei. "Pers Melaju-Betawi dan Wartawan", *Istimewa*, 1 Agustus, Surabaya, 1951), hlm. 49.



dalam surat kabar Tionghoa Peranakan atau tidak. Suryadinata adalah salah seorang yang menyangkalnya. Alasannya, surat kabar itu dikelola oleh peranakan Eropa (Indo-Belanda), meskipun Bintang Timor menggunakan bahasa Melayu yang mirip dengan bahasa yang digunakan oleh golongan Tionghoa.<sup>73</sup> Pendapat ini merupakan sanggahan dari pendapat Kwee Kek Beng yang mengatakan bahwa Bintang Timor adalah surat kabar Tionghoa peranakan tertua.<sup>74</sup>

Namun, perdebatan ini dapat dianggap selesai dengan menegaskan kembali kategori pers Tionghoa peranakan. Patokan utama suatu surat kabar digolongkan sebagai pers Tionghoa peranakan adalah pemilik surat kabar itu berasal dari golongan Tionghoa peranakan. Patokan ini diambil berdasarkan pertimbangan bahwa pemilik modal merupakan orang yang paling berkuasa di dalam usaha penerbitan surat kabar. Ia yang menentukan ke mana surat kabar miliknya akan dibawa. Penetapan orang yang dipilih untuk mengisi jabatan *hoofdredacteur*, yang notabene sangat menentukan isi dari surat kabar juga berada di tangan pemilik modal.

Sejak dibeli oleh Tjoa Tjoan Lok usaha penerbitan surat kabar ini diganti namanya menjadi Bintang Soerabaia, dan merupakan satu-satunya surat kabar Indo-Belanda yang dibeli hak penerbitannya sekaligus dengan percetakannya oleh orang Tionghoa peranakan. Bintang Soerabaia juga merupakan surat kabar Tionghoa peranakan yang pertama di Surabaya dan satu-satunya pada akhir abad ke-19. Perkembangan pers Tionghoa peranakan di Surabaya baru terjadi dengan pesat pada awal abad ke-20. Momentum ini terjadi ketika gerakan pan-Tionghoa mulai berkembang di Jawa.

Pada periode itu, pers tidak lagi diterbitkan untuk tujuan komersial semata, tetapi lebih kepada sarana untuk menyampaikan pendapat dan aspirasi golongan Tionghoa peranakan kepada penguasa. Selain itu, surat kabar pada periode 1900-1942 banyak yang diterbitkan oleh organisasi atau perkumpulan Tionghoa.

---

<sup>73</sup> Abdurrachman Surjomihardjo (et.al.), *Beberapa Segi Perkembangan Sejarah Pers di Indonesia*, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2004), hlm. 51

<sup>74</sup> Kwee Kek Beng, *Doea Poeloe Lima Taon Sabagi Wartawan 1922-1947*. (Batavia: Kuo, 1948), hlm. 207.

Dengan begitu otomatis surat kabar menjadi corong dari organisasi yang menerbitkannya. Selain itu, ada pula surat kabar yang mendukung organisasi tertentu, sehingga muncul istilah organ “setengah resmi”. *Bintang Soerabaia* mengalami kedua periode itu yakni pada masa surat kabar-surat kabar masih semata-mata berorientasi komersial (akhir abad ke-19) dan masa di mana surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan mulai berorientasi politik (awal abad ke-20). *Bintang Soerabaia* sendiri berhenti terbit pada 1924. Surat kabar ini dapat dikatakan tidak memihak pada salah satu haluan politik tertentu hingga tahun terakhir penerbitannya.

Seperti yang sudah dijelaskan di atas menjelang akhir abad ke-19, kebijakan pemerintah kolonial Hindia Belanda mengalami reorientasi dengan diberlakukannya Politik Etis. Hal ini mengakibatkan perubahan yang signifikan bagi perekonomian golongan Tionghoa. Salah satu kebijakan yang cukup memberatkan dan membatasi gerak golongan Tionghoa adalah diperketatnya *passenstelsel* (sistem pas jalan) dan *wijkenstelsel* (sistem pemukiman) serta dihapuskannya sistem sewa pajak (*pacht*). Selain itu, beredar kabar bahwa pemerintah kolonial ingin membuka bank-bank desa untuk menanggulangi para pedagang eceran Tionghoa peranakan yang banyak menguasai di daerah pedesaan. Isu kebijakan ini secara tidak langsung akan bertentangan dengan kepentingan orang Tionghoa yang membungakan uang. Pada saat yang sama isu nasionalisme Tiongkok mulai menyebar di Asia Tenggara, terutama di Jawa melalui Singapura, sehingga banyak orang-rang Tionghoa peranakan yang tertekan oleh permasalahan kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda berharap banyak terhadap ide-ide nasionalisme Tiongkok sebagai jalan keluar bagi permasalahan politik mereka.<sup>75</sup>

Peristiwa ini mendorong orang Tionghoa peranakan di Jawa yang telah berakulturasi ke dalam masyarakat setempat dan mempunyai hubungan yang tipis

---

<sup>75</sup> Satu kelompok pembaru yang gagal dalam usahanya untuk menjadikan Cina sebagai kerajaan konstitusional telah mencari perlindungan di berbagai wilayah Asia Tenggara dan menggunakan Singapura sebagai pangkalan baru bagi kegiatannya. Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 22.

dengan negeri Tiongkok untuk meninjau kembali identitasnya. Satu identifikasi baru dengan Tiongkok muncul dan nasionalisme mulai tumbuh sebagai suatu sentimen yang kuat dalam masyarakat Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Nasionalisme Tiongkok di Jawa pada dasawarsa pertama abad ke-20 diwujudkan dengan cara mendirikan organisasi-organisasi pan-Tionghoa. Pelopor dari organisasi pan-Tionghoa itu adalah Tiong Hoa Hwee Koan (THHK). Organisasi ini didirikan pada 17 Maret 1900 di Batavia oleh sekelompok pedagang dan jurnalis Tionghoa peranakan, yakni Phoa Keng Hek, Khouw Im An, Khouw Lam Tjiang, dan Tan Kim San.<sup>76</sup> Kegiatan THHK banyak bergerak di bidang pendidikan. Organisasi ini mendirikan sekolah-sekolah bagi golongan Tionghoa. THHK juga mendorong para anggotanya mempraktikkan adat istiadat yang didasarkan pada ajaran Konghucu. Kehadiran THHK tidak hanya menandai bangkitnya nasionalisme orang-orang Tionghoa peranakan di Jawa.

Dalam konteks perkembangan pers di Hindia Belanda, kehadiran organisasi itu mempercepat perkembangan “organ” atau corong organisasi. Contohnya pada 1902 Lo Swie Tek menerbitkan *Loen Boen* di Surabaya dan menyatakan bahwa surat kabar itu adalah organ THHK.<sup>77</sup> Setelah 1902, tidak ditemukan surat kabar atau sumber tertulis lainnya yang menyinggung keberadaan Loen Boen. Kemungkinan keberadaan surat kabar tersebut tidaklah lama.

Kecenderungan bahwa pers menjadi semacam “alat publikasi setengah resmi” suatu organisasi Tionghoa peranakan terus berlanjut hingga akhir masa pemerintahan Kolonial Hindia Belanda. Hal ini merupakan perubahan yang signifikan dalam pers Tionghoa peranakan. Kemunculan organisasi-organisasi pan-Tionghoa menunjukkan adanya kesadaran etnik yang tinggi dari golongan Tionghoa peranakan, di samping faktor politik turut pula mendorong. Kebijakan politik pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang menghalangi pembauran orang-orang Tionghoa peranakan dengan pribumi mengakibatkan orang-orang Tionghoa

---

<sup>76</sup> Nio Joe Lan, *Riwajat 40-Taon dari Tiong Hoa Hwee Koan Batavia 1900-1939*. (Batavia: THHK, 1940), hlm. 5-6.

<sup>77</sup> Adam, *op. cit.*, hlm. 131.

peranakan tersisih dari organisasi lokal yang bersifat kedaerahan.<sup>78</sup> Oleh karena itu, mereka merasa perlu untuk mendirikan organisasi yang khusus bagi golongannya.

Di Surabaya selain dibuka cabang THHK, terdapat pula berbagai organisasi yang umumnya bergerak di bidang sosial-ekonomi. Program kegiatannya antara lain mengurus upacara kematian dan perkawinan, membuka perguruan silat, dan kursus bahasa Tionghoa. Salah satunya adalah *Kiong Hoo Wie Sien Hwee*, yaitu perkumpulan sosial yang memberi bantuan dana kepada anggotanya yang akan melaksanakan upacara pemakaman. Organisasi serupa adalah *Joe Tik Hwee Koan*, *Tiong Hoa Ja Hak Hwee*, *Hoo Hap*, dan *Gie Hoo*. Dua organisasi terakhir juga membuka kursus bela diri.<sup>79</sup>

Pada dasawarsa pertama abad ke-20, organisasi pemuda yang memiliki kegiatan serupa juga banyak terdapat di Surabaya. Organisasi itu antara lain *Ja Hak Hwee*, perkumpulan pemuda yang mengadakan sekolah malam dan mengajarkan bahasa Tjing Im (Mandarin). Murid THHK di Surabaya juga berhimpun dalam sebuah organisasi yang bernama *Hak Siang Hwee* (Perkumpulan Murid). Kegiatannya adalah mengadakan *social gathering* dan kepanduan.<sup>80</sup> Organisasi pemuda lainnya adalah *Chung Hsioh* yang didirikan oleh murid-murid sekolah menengah Belanda. Perkumpulan ini kemudian menerima pula para sarjana Tionghoa dan namanya diganti menjadi *Hsain Tsung Hui*.<sup>81</sup>

Organisasi yang didirikan di Surabaya sebagian besar bergerak di bidang sosial. Hal ini merupakan wujud dari adanya solidaritas etnis dan bukan bentuk dari kesadaran politis. Golongan Tionghoa peranakan mulai menyadari

---

<sup>78</sup> Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 51

<sup>79</sup> Noordjanah, *ibid.*, hlm. 52.

<sup>80</sup> Siaw Tiong Djin, *Siaw Giok Tjan: Perjuangan Seorang Patriot Indonesia Membangun Nasion Indonesia dan Masyarakat Bhineka Tunggal Ika*. (Jakarta: Hasta Mitra, 1999), hlm. 23.

<sup>81</sup> Noordjanah, *op. cit.*, hlm. 53.

kedudukannya secara politis pada dasawarsa pertama abad ke-20 ketika pemerintah Kolonial Belanda mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang dianggap merugikan golongan Tionghoa. Salah satunya adalah Undang-Undang Kawula Negara Belanda (*Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap*) pada 1910. Isinya menyatakan bahwa semua orang Tionghoa Hindia Belanda adalah kawula Belanda.

Sebelumnya pada 1909, Pemerintah Kekaisaran Tiongkok mengeluarkan Undang-Undang Kebangsaan yang menyatakan bahwa semua keturunan Tionghoa, atau setiap anak yang sah ataupun tidak sah dari seorang ayah Tionghoa (atau seorang ibu Tionghoa manakala bapaknya tidak diketahui) adalah berkebangsaan Tiongkok. Oleh karena itu, baik pemerintah Tiongkok maupun Belanda memiliki hak yurisdiksi yang sama atas orang Tionghoa peranakan kelahiran Hindia Belanda. Perundingan antara keduanya pun dilakukan. Pada intinya perjanjian itu menyatakan bahwa Pemerintah Kekaisaran Tiongkok mengakui bahwa orang Tionghoa peranakan selama di Hindia Belanda dan wilayah kekuasaannya tunduk pada Undang-undang Belanda, tetapi mereka bebas untuk memilih kebangsaan mereka ketika meninggalkan wilayah kekuasaan Hindia Belanda.<sup>82</sup> Undang-Undang Kawula Belanda inilah yang memicu organisasi pan-Tionghoa yang pada mulanya hanya bergerak di bidang sosial mulai menyuarakan pendapatnya secara aktif di bidang politik. Dikeluarkannya beberapa kebijakan yang dianggap merugikan itu telah membangkitkan keinginan golongan Tionghoa untuk bersatu dalam ikatan nasion Tiongkok.

Pada dasawarsa pertama abad ke-20, di mana rasa solidaritas golongan Tionghoa menguat, terbit sebuah surat kabar *Sia Hwee Po* di Surabaya. Surat kabar ini merupakan organ resmi dari Hwa Kiaw Bian Hap Hwee (HKBHH). Pertama kali terbit pada 1913 dengan harga berlangganan f 4 per tahun. Bagi anggota HKBHH, surat kabar ini diberikan secara cuma-cuma. *Sia Hwee Po* diterbitkan dua kali setiap bulan yakni pada tanggal 1 dan 15 sebanyak delapan halaman. Tan Kiong Phik adalah pengggagas terbitnya *Sia Hwee Po* dan secara

---

<sup>82</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 42

langsung memimpin kepengurusan surat kabar ini. Pada tahun kedua setelah berdirinya surat kabar ini, ia mengundurkan diri karena alasan kesehatan yang memburuk. Setelah itu, kepengurusan dipegang oleh Oei Hong Ho sebagai direktur, Liem Tjhioe Kwi sebagai redaktur, dan Liem Hwan Kwie sebagai administratur. Biaya penerbitan *Sia Hwee Po* berasal dari sumbangan pengurus dan anggota HKBHH. Selain itu, sumber dana juga didapat dari iklan meskipun surat kabar ini tidak berorientasi komersial. *Sia Hwee Po* dicetak oleh NV Handels Drukkerij Tjhoen Tjhioe.<sup>83</sup>

HKBHH sendiri merupakan organisasi pan-Tionghoa yang mengutamakan soliditas dari golongan Tionghoa peranakan. Organisasi ini tidak menjadikan perbedaan asal suku bangsa dan pemikiran yang berbeda sebagai penghalang bagi golongan Tionghoa peranakan untuk bersatu dalam ikatan organisasi yang sama. HKBHH juga tidak menyukai kondisi pada masa itu di mana banyak didirikan organisasi pan-Tionghoa. Alasannya, keadaan ini dapat memecah golongan Tionghoa peranakan. Pandangan-pandangan HKBHH ini diutarakan di dalam *Sia Hwee Po*. Nama *Sia Hwee Po* sendiri diambil sebagai nama surat kabar karena memiliki arti tertentu. Seorang penulis yang bernama Ang Eng menulis artikel tentang hal ini. Ang Eng mengatakan bahwa istilah *Sia Hwee* mulai dikenal pada permulaan abad ke-20. *Sia Hwee* dapat diartikan sebagai “social perhoeboengan, sarikat, societij perkoempoelan, pergaoelan” sedangkan *Po* mempunyai arti surat kabar.<sup>84</sup>

Dalam artikel yang berjudul “*Sia Hwee Po*” itu Ang Eng secara tegas menyatakan bahwa *Sia Hwee Po* merupakan organ dari *Sia Hwee*. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa surat kabar ini mendeklarasikan dirinya sebagai organ bagi seluruh organisasi pan-Tionghoa. Walaupun pada kenyataannya *Sia*

---

<sup>83</sup> *Sia Hwee Po*, 1 Oktober 1914. Untuk semua data surat kabar lama penulis ambil dari web yang menyediakan surat kabar-surat kabar lama di alamat [http://niod.x-cago.com/maleise\\_kranten/papers.do](http://niod.x-cago.com/maleise_kranten/papers.do). Pada web ini banyak surat kabar-surat kabar lama yang dipublikasikan sehingga memudahkan penulis dalam mengakses data. Data penulis unduh sejak tanggal 25 Febuari-27 Maret 2014.

<sup>84</sup> Ang Eng, “*Sia Hwee Po*”, dalam *Sia Hwee Po*, 1 Oktober 1914.

*Hwee Po* diterbitkan oleh HKBHH, surat kabar ini berusaha mengkomodasi atau menjadikan dirinya sarana untuk menyuarakan pendapat seluruh organisasi pan-Tionghoa. Ang Eng juga menyatakan bahwa perkembangan gerakan pan-Tionghoa ini tidak terlepas dari peran surat kabar. *Sia Hwee Po* memuat tulisan-tulisan yang bermanfaat bagi golongan Tionghoa. Surat kabar ini menegaskan tidak akan memuat tulisan-tulisan yang berisi ejekan dan saling menghina antara golongan Tionghoa yang berbeda pendapat. Sesuai dengan tujuan utamanya, surat kabar ini hanya memuat tulisan-tulisan yang mampu membangkitkan dan mempererat rasa persaudaraan golongan Tionghoa.<sup>85</sup> *Sia Hwee Po* berubah menjadi mingguan pada Januari 1915 dengan nama yang juga berganti menjadi *Java Herald*. Mingguan baru ini diterbitkan setiap Sabtu dengan pemimpin redaksi Kwee Hing Tjiat. Akan tetapi, haluan dari mingguan ini tidak berubah. Mingguan ini tetap menyajikan artikel dan tulisan yang “sopan” dan tidak memuat tulisan yang saling menghina dan menjatuhkan.<sup>86</sup>

Pada periode selanjutnya, terutama setelah Konferensi Semarang 1917, kesadaran etnik golongan Tionghoa mulai berkembang menjadi kesadaran politis. Hal yang sama pula terjadi dalam pers. Surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan mulai menjadikan politik sebagai bagian dari porsi pemberitaan mereka. Sejak saat itu, mulai muncul pers yang memiliki orientasi politik tertentu. Sebelum terbentuknya THHK, pers Tionghoa peranakan semata-mata hanya berorientasi komersial. Hal ini disebabkan golongan Tionghoa peranakan belum menyadari akan keberadaan dan identitasnya di Hindia Belanda. Tujuan utama mereka datang ke Hindia Belanda adalah untuk memperbaiki perekonomiannya.

Setelah menyebarnya nasionalisme Tiongkok dan adanya perubahan orientasi kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda yang dianggap merugikan, golongan Tionghoa peranakan mulai menyadari identitasnya. Namun, dalam perkembangan selanjutnya, terdapat perbedaan pemikiran mengenai identitas di dalam golongan Tionghoa peranakan itu sendiri. Selama periode

---

<sup>85</sup> Ang Eng, “*Sia Hwee Po*”, dalam *Sia Hwee Po*, 1 Oktober 1914.

<sup>86</sup> *Sia Hwee Po*, 1 Oktober 1914

1900-1942, aliran pemikiran ini mulai berkembang dan ide-idenya mulai menyebar dalam surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan. Berdasarkan perbedaan pandangannya mengenai identitas golongan Tionghoa, aliran ini terbagi menjadi tiga kelompok, yakni aliran politik yang berorientasi ke Tiongkok, Hindia Belanda, dan Pribumi.

Perbedaan pandangan politik di dalam golongan Tionghoa peranakan yang bersamaan dengan berkembangnya pers sebagai media komunikasi efektif telah mengakibatkan surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan mengalami reorientasi. Selain itu, kecenderungan keberpihakan pers terhadap salah satu organisasi Tionghoa peranakan dengan aliran politik tertentu cukup kentara selama periode ini. Umumnya, surat kabar-surat kabar itu terbit setelah didirikannya organisasi Tionghoa peranakan. Meskipun demikian, ada beberapa surat kabar yang sudah terbit sebelum didirikannya organisasi itu dan mulai memperlihatkan keberpihakannya pada aliran politik tertentu setelah organisasi itu berdiri.

Perubahan orientasi pers Tionghoa ini tidak dapat diartikan sebagai perubahan yang terbagi secara tegas ke dalam periode terpisah. Dengan adanya gerakan pan-Tionghoa, pers Tionghoa peranakan sebagian besar memang cenderung memiliki haluan politik. Akan tetapi, sisi komersialnya tetap diperhatikan walaupun tidak begitu menonjol. Ide gerakan nasional muncul sebagai antitesa terhadap politik Kolonial Hindia Belanda. Keberadaan pers menjadi pendukung laju pergerakan nasional di Hindia Belanda. Kehidupannya terus berkembang meskipun keberadaannya terus menerus diancam kebijakan pembredelan oleh pemerintah kolonial. Ide pergerakan nasional muncul sebagai kekuatan historis masyarakat pribumi yang juga berpengaruh terhadap pers Tionghoa peranakan. Aspek yang paling mudah dipertimbangkan dalam melihat hubungan pers Tionghoa peranakan dengan nasionalisme pribumi adalah aspek politik. Pers Tionghoa peranakan dipergunakan oleh tokoh pergerakan untuk menyebarkan ide-ide perjuangan pergerakannya. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan efektivitas pers Tionghoa peranakan. Pers Tionghoa peranakan dianggap relatif aman karena posisinya yang netral, sedangkan pers



pribumi lebih mudah terdeteksi dan akhirnya dibredel dan pemimpin atau penyumbang pemikirannya ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Belanda.

### 1. Aliran Politik Tiongkok

Aliran politik yang berorientasi ke Tiongkok ini menganggap bahwa golongan Tionghoa peranakan harus tetap menjadi orang asing dan menganggap bahwa Tiongkok adalah tanah airnya. Aliran ini mulai muncul sejak terbitnya surat kabar *Sin Po* pada 1910 di Batavia. *Sin Po* mulai memiliki pengaruh yang luas pada 1920-an ketika surat kabar ini melakukan kampanye menentang WNO. Oleh sebab itu, aliran yang berorientasi politik ke Tiongkok terkenal dengan sebutan aliran *Sin Po*. Munculnya aliran *Sin Po* ini dapat ditelusuri dari diselenggarakannya Konferensi Semarang pada 1917. Konferensi ini harus dipahami dari latar belakang perkembangan politik di Tiongkok dan Hindia Belanda.

Perkembangan politik di Tiongkok dapat dilihat dari pecahnya revolusi 1911. Peristiwa ini mengakibatkan runtuhnya Dinasti Ch'ing dan terbentuknya Republik Tiongkok. Akan tetapi, lahirnya Republik Tiongkok ini tidak membawa kemajuan. Yuan Shih K'ai, seorang penguasa perang hampir mengambil alih kekuasaan dan menjalankannya secara otoritarian. Ia bahkan menginginkan dihapuskannya sistem republik dan mendirikan kembali kerajaan. Akan tetapi, keinginannya tidak tercapai karena ia meninggal pada 1916. Sekalipun demikian, kematian Yuan tidak mengurangi kekacauan di Tiongkok. Penguasa perang yang berkuasa di seluruh wilayah Tiongkok tetap bercokol dan kekuatan-kekuatan Barat serta Jepang berdampak besar atas kehidupan politik dan ekonomi daratan Tiongkok. Perjuangan politik itu menyebabkan timbulnya dua pemerintahan di Tiongkok yang saling berdampingan hingga 1928; yang satu dikuasai oleh para penguasa perang berpangkalan di Peking, sedangkan lainnya adalah pemerintahan Nanking yang berada di bawah kendali Koumintang.<sup>87</sup>

Sementara itu perkembangan politik di Hindia Belanda mengarah ke pembentukan *Volksraad* (Dewan Rakyat). Pembentukan *Volksraad* merupakan

---

<sup>87</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 21.

salah satu cara pemerintah Kolonial Hindia Belanda untuk meredam pergolakan politik yang terjadi di Hindia Belanda akibat munculnya isu seputar *Indie Weerbaar* (pertahanan Hindia Belanda). Munculnya isu *Indie Weerbaar* ini dipicu oleh kekhawatiran pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap ancaman militer Jepang yang terus mendesak di Asia Tenggara sejak kemenangan militer Jepang pada Perang Dunia I. Beberapa orang yang tertarik terhadap permasalahan ini akhirnya membentuk *Comite Indie Weerbaar* (Panitia Pertahanan Hindia Belanda) dan mengajukan suatu usul untuk menerapkan wajib militer (milisi) bagi orang-orang pribumi maupun bagi kawula Belanda lainnya. Permasalahan ini kemudian menjadi isu serius bagi orang-orang Tionghoa peranakan, dan menjadi perbincangan yang sangat penting dalam Konferensi Semarang 1917.

Pada pertengahan 1917, suatu peraturan berkenaan dengan keanggotaan *Volksraad* dikeluarkan. Peraturan itu menetapkan bahwa orang Belanda dan mereka yang berstatus Eropa (yaitu beberapa orang pribumi dan Tionghoa peranakan) mempunyai hak pilih. Ini berarti bahwa para anggota dewan daerah dari golongan Tionghoa peranakan yang berstatus Eropa mempunyai hak untuk memilih calon anggota *Volksraad*. Sekalipun ada ketidakpastian, seorang anggota dari Dewan Karesidenan Batavia, H.H. Kan (Kan Hok Hoei) merencanakan untuk mengajukan nama-nama calon dari anggota Tionghoa peranakan kepada Gubernur Jenderal sebelum pembukaan *Volksraad* pada 1918 dimulai. H.H. Kan adalah seorang tuan tanah, mendapatkan pendidikan Belanda dan sangat berminat pada *Volksraad*. Untuk melaksanakan rencananya, ia mengundang semua anggota dewan daerah dari golongan Tionghoa peranakan di seluruh Hindia Belanda untuk mengadakan suatu konferensi dengan tujuan memilih calon-calon. Konferensi itu diselenggarakan di Bandung dengan dihadiri oleh sebelas orang, tujuh diantaranya adalah opsir Tionghoa peranakan.<sup>88</sup>

Para peserta konferensi memutuskan untuk mengirim H.H. Kan, Tjoa Liang Djien, Tjoeng Faji Yoeng (mayor), Khouw Im An (mayor), dan Lie Tjian

---

<sup>88</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 28

Tjoen (kapten) sebagai calon anggota *Volksraad*.<sup>89</sup> Langkah ini dikecam oleh masyarakat Tionghoa karena organisasi-organisasi Tionghoa tidak diajak berkonsultasi. H.H. Kan akhirnya menyetujui penyelenggaraan konferensi lainnya dengan mengundang berbagai organisasi Tionghoa di Jawa untuk mendiskusikan masalah yang sama.<sup>90</sup>

Konferensi yang dijanjikan H.H. Kan itu diselenggarakan di Semarang pada 4 November 1917. Dalam konferensi itu, terjadi perdebatan seputar kedudukan golongan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Perdebatan ini berkaitan dengan isu seputar *Wet hop het Nederlandsch Onderdaanschap* (WNO) atau Undang-Undang tentang Kawula Negara Belanda dan keikutsertaan golongan Tionghoa peranakan dalam *Volksraad*. Golongan Tionghoa peranakan yang berorientasi politik ke Tiongkok menyatakan bahwa orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda adalah orang asing dan tidak perlu ikut serta dalam politik. Hal ini sekaligus menegaskan bahwa tanah air mereka bukanlah Hindia Belanda tapi Tiongkok. Setelah *Sin Po* yang berorientasi politik ke Tiongkok menegaskan identitasnya, mulai meluas pengaruhnya. Mereka yang mendukung pandangan-pandangan *Sin Po* kemudian dikenal sebagai kelompok *Sin Po*. Pasca konferensi Semarang kelompok *Sin Po* ini mulai melakukan kampanye menentang WNO. Perdebatan seputar WNO banyak dimuat dalam surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan.

Di Surabaya, surat kabar yang sejalan dengan *Sin Po* adalah *Pewartar Soerabaia*. Surat kabar ini diterbitkan oleh percetakan Kwa Hok Ing pada 1902 dengan nomor-nomor percobaan. *Pewartar Soerabaia* mulai memperlihatkan kecenderungan politiknya pada 1917. Sebelum tahun itu, artikel dan tulisan dalam *Pewartar Soerabaia* belum memperlihatkan orientasi politiknya. Pada 1917, posisi-posisi *hoofdredacteur* dijabat oleh H.F.R Kommer dan jabatan direktur administrasi dipegang oleh He Kian Sing. Harga berlangganan untuk surat kabar ini adalah f 16 per tahun. Surat kabar ini terbit setiap hari kecuali Minggu dan

---

<sup>89</sup> *Sin Po*, 13 Oktober 1917

<sup>90</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... log. cit.*, hlm. 28

hari-hari besar. *Pewarta Soerabaia* diterbitkan sebanyak dua lembar atau sekitar delapan halaman.<sup>91</sup> Selama tahun 1917 tercatat beberapa artikel dan tulisan yang mengkritik kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda.<sup>92</sup> Meskipun demikian, surat kabar ini tidak seperti *Sin Po* yang cenderung militan. *Pewarta Soerabaia* lebih liberal dalam memegang keyakinan politiknya. Surat kabar ini agak dimusuhi oleh beberapa surat kabar berorientasi politik ke Tiongkok lainnya, karena dianggap kurang militan.

Surat kabar yang berorientasi politik ke Tiongkok lainnya adalah *Sin Jit Po* yang terbit pertama kali pada 1923 di Surabaya. Surat kabar ini dipimpin oleh T.H.H Phoa sebagai *hoofdredacteur* dengan dibantu oleh Oei Kie Hok dan R.M. Bintarti sebagai anggota redaksi. Selain kedua anggota redaksi tersebut, *Sin Jit Po* memiliki koresponden tetap untuk wilayah Kalimantan (Borneo) Timur yakni Ang Hoay Lie. *Sin Jit Po* dicetak dan diterbitkan oleh N.V. Handelsdrukkerij. *Sin Jit Po* terbit setiap hari kecuali Minggu dan hari raya. Setiap edisinya terbit kurang lebih empat halaman. Seperti umumnya surat kabar Tionghoa peranakan pada masa itu, dalam setiap edisi *Sin Jit Po* disajikan berita-berita lokal Surabaya, Hindia Belanda dan luar negeri, informasi dagang, dan juga iklan-iklan. Surat kabar ini lebih keras haluan politiknya. Berbeda dengan *Pewarta Soerabaia* yang cenderung lebih moderat, *Sin Jit Po* cenderung militan dan terbuka dalam mengkritik organisasi dan surat kabar Tionghoa peranakan yang berbeda haluan dengannya.

Pada 1925 terbit surat kabar baru yang berorientasi politik ke Tiongkok di Surabaya, yaitu *Soeara Publiek*. Pada dasarnya surat kabar ini merupakan versi baru dari surat kabar tertua di Surabaya, yaitu *Bintang Soerabaia*. Tidak diketahui secara jelas mengapa surat kabar ini berganti nama dan mengalami perubahan

---

<sup>91</sup> *Pewarta Soerabaia*, 9 Januari 1917

<sup>92</sup> Salah satu contohnya pada edisi 20 Maret 1917 (No.64) pada rubrik Hindia Nederland di mana terdapat artikel “Wykstselsel Boeat Bangsa Tionghoa” ditulis oleh Tjipto Mangoen Koesoemo. Artikel ini pernah dimuat dalam *Warna Warta*. Tampaknya *Pewarta Soerabaia* menganggap penting artikel ini untuk dimuat kembali meskipun ada beberapa bagian yang mengkritik golongan Eropa. Pemuatan kembali artikel ini sangat beresiko terkena delik pers, *Pewarta Soerabaia*, 20 Maret 1917.

yang sangat signifikan baik secara visual maupun materi beritanya. *Bintang Soerabaia* kemungkinan beralih kepemilikan pada akhir 1924. Hal yang meyakinkan bahwa *Soeara Publiek* merupakan versi baru dari *Bintang Soerabaia* adalah berdasarkan tulisan Liem Koen Hian pada surat kabar itu yang mengatakan bahwa sebelum bernama *Soeara Publiek*, surat kabar ini bernama *Bintang Soerabaia*.<sup>93</sup>

*Soeara Publiek* terbit setiap hari kecuali Minggu dan hari raya yang dicetak dan diterbitkan oleh Kong Sing In Boe Kongsie. Jabatan *hoofdredacteur* diisi oleh Phoa Tjhoen Hoay. Tio Lin Khing menjabat sebagai direktur dan Tan Sing Hwie sebagai wakil direktur. Selain itu, *Soeara Publiek* memiliki koresponden tetap Tio Ie Soei untuk wilayah Jawa Barat. Harga berlangganan per kwartal di wilayah Hindia Belanda f 6 dan untuk luar Hindia Belanda f 7,5. *Soeara Publiek* terbit sebanyak delapan halaman.<sup>94</sup> *Soeara Publiek* menyajikan berita-berita lokal dari Surabaya, Hindia Belanda, dan berita-berita dari luar negeri. Berita dan artikel itu ditempatkan pada empat halaman pertama dan sisanya diisi iklan-iklan. Satu hal yang berbeda dari surat kabar lainnya adalah ukurannya yang terbilang cukup kecil (54x36 cm).

Pada pertengahan Juni, *Soeara Publiek* beralih kepemilikan. Surat kabar ini dibeli oleh Liem Koen Hian dan berubah secara drastis di bawah kepemimpinannya. Selain tampilan visualnya, haluan surat kabar ini pun berubah. Sebelumnya, *Soeara Publiek* adalah surat kabar berorientasi politik ke Tiongkok, namun setelah berganti kepemilikan, surat kabar ini berorientasi politik ke pribumi. *Soeara Publiek* lebih banyak menyajikan berita dan artikel yang berkaitan dengan aktivitas pergerakan nasional. Meskipun demikian, pemberitaan tentang golongan Tionghoa peranakan juga tidak dilupakan. *Soeara Publiek* yang kemudian berganti nama menjadi *Swara Publiek* kembali kepada orientasi politiknya pada akhir 1929.

---

<sup>93</sup> Liaw Kian Djoe, *Pers Indonesia-Tionghoa dan Pergerakan Kemerdekaan 1901-1942*, (tanpa kota penerbit: tanpa penerbit, 1965), hlm. 5

<sup>94</sup> *Swara Publiek*, 15 Juli 1929

## 2. Aliran Politik Hindia Belanda

Kampanye menentang WNO yang gencar dilakukan oleh golongan berorientasi politik ke Tiongkok pada 1920-an mengalami kegagalan. Hal ini memberikan kesempatan kepada elit Tionghoa peranakan yang berorientasi ke Hindia Belanda untuk berusaha agar kehadirannya terasa. Pada pertengahan 1920-an banyak tokoh *Chung Hwa Hui* (CHH) Nederland,<sup>95</sup> yang kembali ke Hindia Belanda. Tokoh-tokoh itu diantaranya adalah Han Tiauw Tjong (ketua CHH Nederland pada 1921), Be Tiat Tjong (ketua CHH Nederland pada 1923), dan Oei Tjong Houw.<sup>96</sup>

Berbeda dengan kelompok *Sin Po* yang mengharapkan perlindungan dari negeri Tiongkok dan ingin bekerja di luar lembaga-lembaga kolonial, para bekas pemimpin CHH Nederland tidak melihat Tiongkok sebagai tempat yang tepat untuk meminta perlindungan. Mereka beranggapan bahwa akan lebih baik jika berusaha di dalam kerangka Kolonial Hindia Belanda yang ada.<sup>97</sup> Para bekas anggota CHH Nederland setelah kembali ke Hindia Belanda tetap berhubungan satu sama lain. Pada Agustus 1926 mereka membentuk satu perhimpunan yang diberi nama *Chung Hwa Club*, yang mengambil prakarsa dalam membuat persiapan bagi pelaksanaan kongres yang bertujuan untuk membentuk satu organisasi Tionghoa baru.<sup>98</sup>

Golongan Tionghoa peranakan yang berpendidikan Barat ini merasakan kebutuhan untuk mendirikan satu organisasi atau partai Tionghoa yang baru untuk membela kepentingan-kepentingan mereka. Golongan ini beranggapan bahwa mereka tidak dapat berbuat banyak di *Volksraad* karena tidak didukung oleh partai. Keinginan para politisi Tionghoa peranakan untuk membentuk satu partai

---

<sup>95</sup> CHH Nederland adalah organisasi mahasiswa Tionghoa peranakan yang berpusat di Leiden. Organisasi ini dibentuk pada 1911 ketika nasionalisme Cina tumbuh di kalangan Tionghoa peranakan. Sebagian besar mahasiswa Tionghoa peranakan di Belanda ikut bergabung menjadi anggota. Tong Djin, *op. cit.*, hlm. 13.

<sup>96</sup> Tong Djin, *ibid.*, hlm. 45

<sup>97</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa...op. cit.*, hlm. 56.

<sup>98</sup> Djawa Tengah, 22 Maret 1917

didorong oleh pembentukan dewan propinsi Jawa Barat pada 1926 dan pembaruan *Volksraad* yang akan dilaksanakan pada 1927.<sup>99</sup>

Setelah pemberontakan komunis pada 1926, kongres Chung Hwa pertama diselenggarakan untuk membicarakan masalah-masalah yang berkaitan dengan golongan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda, seperti keikutsertaan orang Tionghoa peranakan di dunia politik dan pembentukan suatu organisasi Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Kongres yang diadakan pada 19-20 April 1927 didukung oleh golongan Tionghoa peranakan yang berpendidikan Belanda, terutama bekas anggota CHH Nederland, dan para pengusaha Tionghoa peranakan. Sebelum kongres, banyak golongan peranakan yang diminta untuk menyusun kertas kerja untuk masalah-masalah seperti keikutsertaan orang-orang Tionghoa peranakan Hindia Belanda dalam politik setempat, kedudukan ekonomi golongan Tionghoa peranakan, dan pendidikannya di Hindia Belanda. Kongres yang diselenggarakan di Semarang pada 1927 itu dihadiri sekitar 300 orang.<sup>100</sup>

Berbeda dengan Konferensi Semarang 1917, peserta kongres ini mencakup lebih banyak kaum Tionghoa peranakan yang berpendidikan. Sangat sedikit golongan totok yang ikut serta. Sidang-sidang kongres dilaksanakan dalam bahasa Belanda, tetapi bahasa Melayu boleh digunakan. Meskipun demikian, cukup banyak golongan peranakan pendukung aliran *Sin Po* yang antusias dalam kongres itu.<sup>101</sup>

Menjelang akhir kongres, sebelas orang peserta dengan dipelopori oleh Ong Hok Lan dan Kwee Kek Beng mengusulkan pembentukan satu organisasi Tionghoa peranakan. Mereka mengusulkan agar panitia kongres diberi tanggung jawab untuk membentuk suatu organisasi yang bertujuan mempersatukan golongan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Setahun kemudian, pada April 1928, diadakan kongres *Chung Hwa* kedua di tempat yang sama dengan kongres pertama untuk membicarakan pembentukan organisasi politik. Keputusan akhir

---

<sup>99</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa...op. cit.*, hlm. 58.

<sup>100</sup> *Sin Po*, 17 Januari 1927

<sup>101</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 63

adalah disetujuinya pembentukan organisasi baru bernama *Chung Hwa Hui* Hindia Belanda (CHH). Organisasi ini berdiri pada 8 April 1928 dan H.H. Kan terpilih sebagai ketuanya.<sup>102</sup>

Di Surabaya, pada periode ini, tidak ditemukan surat kabar yang berorientasi ke Hindia Belanda seperti surat kabar yang terbit di beberapa wilayah lain di Jawa. Di kota ini tidak ditemukan adanya surat kabar berorientasi politik ke Hindia Belanda. Justru pada periode ini, kecaman terhadap aliran pemikiran ini banyak dilakukan oleh surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan di Surabaya. Bahkan perseteruan yang lebih kencang tentang perbedaan orientasi politik terjadi antara golongan yang pro Tiongkok dengan golongan yang mengusung orientasi politik baru, yakni pro pribumi. Surat kabar yang paling keras mengkritik keberadaan CHH adalah *Sin Jit Po*. Surat kabar ini hingga 1929 berhaluan politik ke Tiongkok yang konservatif.

Tidak adanya pers Tionghoa peranakan Surabaya yang berorientasi ke Belanda ini dapat dipahami dari sifat organisasi CHH itu sendiri. Organisasi yang membuka cabang di Surabaya ini cenderung bersifat eksklusif. CHH dikenal sebagai organisasi yang mayoritas anggotanya adalah orang Tionghoa peranakan kaya dari kelas pengusaha. Organisasi ini tidak menyentuh golongan Tionghoa peranakan yang secara ekonomi masih lemah. Basis utama kekuatan CHH adalah di Semarang. Di kota tersebut banyak terdapat golongan Tionghoa peranakan kaya yang mendirikan perusahaan-perusahaan besar. Berbeda dengan Semarang, Surabaya tidak memiliki perusahaan Tionghoa peranakan yang besar. Perseteruan antara surat kabar yang berorientasi politik ke Tiongkok dengan surat kabar yang berorientasi politik pribumi terjadi ketika *Soeara Publiek* yang pada mulanya berorientasi politik Tiongkok berganti kepemilikan.

Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, *Soeara Publiek* berubah haluan pada masa kepemimpinan Liem Koen Hian. *Soeara Publiek* memelopori suatu aliran baru di antara golongan Tionghoa peranakan yakni mengusung konsep yang disebut Liem Koen Hian sebagai "*Indisch Burgerschap*" di mana dinyatakan

---

<sup>102</sup> *Sin Po*, 12 April 1928



bahwa golongan Tionghoa peranakan adalah juga bagian dari rakyat pribumi dan akan menjadi warga negara Indonesia jika bangsa ini merdeka. Akan tetapi, golongan ini tetap mempertahankan identitas kulturalnya sebagai golongan Tionghoa. Haluan inilah yang dikecam oleh surat kabar Tionghoa lainnya.

Pada edisi 27 Desember 1928 (No. 288) surat kabar ini berganti nama menjadi *Swara Publiek* dan tetap pada haluannya hingga Desember 1928. Pergantian nama ini bersamaan dengan beralihnya kepemilikan surat kabar. Liem Koen Hian mengundurkan diri sebagai *hoofdredacteur* dan menjual surat kabar itu kepada Tjioe Hwie Bing. Alasan penjualannya, Liem Koen Hian sudah tidak mampu lagi mengelola surat kabar itu. Ia juga menyatakan bahwa penjualan percetakan dan hak untuk menerbitkan *Swara Publiek* itu kepada kongsi milik Tjioe Hwie Bing tidak berdasarkan kepentingan komersial tetapi lebih kepada keinginan untuk tetap mempertahankan eksistensi surat kabar itu dengan haluan yang diusungnya. Liem Koen Hian tidak ingin penduduk Tionghoa peranakan di Surabaya khususnya dan Jawa Timur pada umumnya hanya dipengaruhi oleh satu surat kabar saja.<sup>103</sup>

*Swara Publiek* di bawah kepemilikan Tjioe Hwie Bing hanya bertahan enam bulan. Kemudian diduga ia menjualnya kepada NV *Pewartar Soerabaia*. Pergantian kepemilikan ini menyebabkan Kwee Hiam Tjing, yang sebelumnya ditunjuk sebagai *hoofdredacteur* mengundurkan diri. Hal ini dilakukannya karena tidak setuju surat kabar itu dijual kepada *Pewartar Soerabaia*. Menurut Liem Koen Hian, sebelumnya Tjioe Hwie Bing diminta membuat perjanjian untuk tidak menjual *Swara Publiek* ke *Pewartar Soerabaia*, hal ini dilakukan karena Liem Koen Hian tidak setuju dengan haluan *Pewartar Soerabaia*. Tjioe Hwie Bing sendiri membeli *Swara Publiek* dari Liem Koen Hian dengan harga yang murah dan dilakukan dengan cara mencicil.

Dengan bergantinya kepemilikan, *Swara Publiek* pun mengalami lagi perubahan. Secara visual, surat kabar itu memiliki kesan yang lebih kuat sebagai surat kabar Tionghoa peranakan. Ketika masih dikelola oleh Liem Koen Hian,

---

<sup>103</sup> Kian Djoe, *op. cit.*, 1.

kop *Swara Publiek* tampil lebih sederhana. Kini, *Swara Publiek* tampil dengan aksesoris huruf Tionghoa di tengah kopnya. Secara umum, rubrik-rubrik di dalam surat kabar ini tidak banyak berubah. Namun, pemberitaannya hampir seluruhnya berhubungan dengan golongan Tionghoa. Edisi 1 Oktober 1929 adalah titik tolak perubahan baru itu. Ada satu hal yang unik, di dalam kopnya disebutkan bahwa percetakan dan penerbitnya masih N.V. *Swara Publiek*. Sejauh yang dapat ditelusuri, tidak ada sumber yang menyebutkan pemilik baru *Swara Publiek*. Pada 1931 anggota redaksi *Swara Publiek* yang baru terbentuk. Anggota redaksi itu terdiri dari Hauw Ying Sung, Kwee Hong Liang, dan seorang pribumi bernama Soeyitno. Jabatan administrasi dipegang oleh Tjoa Tjing Tjoan.<sup>104</sup>

Liem Koen Hian sendiri kemudian bekerja pada *Sin Jit Po* di akhir 1929. Oleh karena kehadirannya inilah, *Sin Jit Po* mulai berubah haluan politik. Keberadaan Liem itu sebenarnya tidak diinginkan oleh beberapa pihak dari surat kabar yang berorientasi politik ke Tiongkok. Mereka mengkhawatirkan perubahan yang akan dibawa oleh Liem Koen Hian pada surat kabar tersebut. Akhirnya, ketakutan mereka menjadi nyata ketika *Sin Jit Po* berhenti terbit karena masalah keuangan. Pemilik lama Oei Ping Bie menjual *Sin Jit Po* kepada Tan Ping Lee. Pemilik baru *Sin Jit Po* itu tetap mempertahankan Liem Koen Hian sebagai *hoofdredacteur*. Alasannya adalah adanya persamaan orientasi politik antara Tan Ping Lee dengan Liem Koen Hian. Di atas “kematian” *Sin Jit Po* lahir surat kabar baru yang berorientasi politik pribumi *Sin Tit Po*.

### 3. Aliran Politik Bumiputera

Setelah pembentukan CHH pada 1928, rasa persatuan nasional di kalangan golongan pribumi tumbuh dengan cepat. Bersamaan dengan itu, antagonisme rasial antara orang-orang Belanda dan pribumi mencapai titik kulminasinya. Hubungan antara kaum Tionghoa peranakan dan penduduk pribumi semakin meningkat setelah diselenggarakannya Kongres Chung Hwa kedua. CHH Nederland menunjukkan simpatinya kepada perjuangan Perhimpunan Indonesia

---

<sup>104</sup> *Swara Publiek*, 1 April 1931

(PI). Hubungan antara kaum CHH Nederland dan kaum cendekiawan pribumi pada umumnya dan PI pada khususnya menjadi lebih erat. Hal ini misalnya terlihat ketika CHH Nederland mengundang wartawan terkemuka, M. Tabrani dan Abdoel Manaf untuk memberi ceramah tentang masalah-masalah Indonesia.<sup>105</sup>

Beberapa orang nasionalis sekuler menyadari pentingnya kedudukan golongan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda dan kemungkinan untuk bekerja sama dengan mereka dalam perjuangan untuk kemerdekaan Indonesia.<sup>106</sup> Pada 1928 Soekarno pernah menulis bahwa paham Indonesia tidak bertentangan dengan paham Asia. Sebaliknya paham Indonesianisme adalah sebagian dari paham Asianisme. Kemenangan orang Asia dalam perjuangan melawan imperialisme Barat adalah juga kemenangan bagi Indonesia. Prasangka rasial terhadap orang Eropa, perkembangan gerakan nasional Indonesia, dan meningkatnya hubungan antara kaum Tionghoa peranakan dan para pemimpin bumiputera memberikan dasar bagi beberapa orang Tionghoa peranakan untuk bekerja bersama-sama dengan kaum nasionalis Indonesia, di samping tumbuhnya prasangka rasial terhadap Belanda. Setelah 1927 berkembang satu konsepsi nasion Indonesia di kalangan Tionghoa peranakan, yang diperjuangkan oleh Indische

---

<sup>105</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 80

<sup>106</sup> Istilah 'Indunesia' pertamakali diperkenalkan oleh seorang ahli etnografi asal Inggris, George Samuel Windsor Earl (1813-1865) dalam *Journal of the Indian Archipelago and Eastern Asia* (JIAEA, BI: "Jurnal Kepulauan Hindia dan Asia Timur") volume IV. Oleh seorang etnografi lain asal Scotlandia, James Richardson Logan (1819-1869) istilah ini dipakai untuk mengidentifikasi penduduk Kepulauan Hindia dengan mengganti huruf vokal *u* dengan huruf vokal *o* agar ucapannya lebih baik, sehingga menjadi Indonesia. Pada tahun 1884 guru besar etnologi di Universitas Berlin, *Adolf Bastian* (1826-1905) menerbitkan buku *Indonesien oder die Inseln des Malayischen Archipel* (Indonesia atau Pulau-pulau di Kepulauan Melayu) sebanyak lima volume, yang memuat hasil penelitiannya ketika mengembara di kepulauan itu pada tahun 1864 sampai 1880. Terbitan buku Bastian inilah yang mempopulerkan istilah "Indonesia" di kalangan sarjana Belanda. Sementara itu, orang pribumi yang mula-mula menggunakan istilah "Indonesia" adalah Suwardi Suryaningrat (Ki Hajar Dewantara), ketika pada 1913 mendirikan sebuah biro pers dengan nama *Indonesische Persbureau*. Istilah *Indonesisch* (pelafalan Belanda untuk "Indonesia") kemudian dipakai oleh Prof Cornelis van Vollenhoven sebagai pengganti istilah *Indisch* ("Hindia") pada 1917. Lihat R. E. Elson, *The Idea of Indonesia*, (Jakarta: Serambi, 2008), hlm. 19-30.

Partij.<sup>107</sup> Konsepsi ini mendefinisikan nasion menurut arti persatuan. Dalam hal ini, Tionghoa peranakan juga termasuk bagian dari nasion itu.

Pada awal 1928, *Soeara Publiek* mengemukakan gagasan Liem Koen Hian tentang “Kewarganegaraan Hindia Belanda” (*Indisch Burgerschap* atau *Indier Burgerschap*) bagi golongan Tionghoa peranakan guna menandingi WNO. Menurut pendapatnya, golongan Tionghoa peranakan yang memandang Hindia Belanda sebagai tanah air harus diberi status hukum pribumi dan oleh karena itu mereka berhak memiliki tanah. Sebaliknya mereka harus pula mempunyai kewajiban-kewajiban yang sama seperti orang-orang pribumi. Liem menyatakan bahwa tidak ada nilai praktisnya bagi golongan Tionghoa peranakan untuk berasimilasi ke dalam status Eropa, kecuali apabila mereka terlibat dalam perkara kriminal. Dalam hal ini, mereka akan berada di bawah kekuasaan hukum Pengadilan Eropa (*Raad van Justitie*) dan oleh karena itu menerima perlakuan yang lebih baik.<sup>108</sup>

Selain Perniagaan, pandangan Liem Koen Hian ini disokong oleh surat kabar Panorama. Akan tetapi, sebagian besar pers Tionghoa peranakan menolaknya. Mereka menolak “kewarganegaraan Hindia Belanda” atas dua alasan. Pertama, golongan Tionghoa peranakan tidak mau menjadi orang Hindia Belanda. Kedua, pemilikan tanah akan menimbulkan pertentangan antara orang Tionghoa peranakan dengan penduduk pribumi.<sup>109</sup> Selain itu, reaksi terhadap gagasan Liem ini diikuti oleh perasaan curiga terhadap golongan Tionghoa peranakan oleh orang-orang pribumi.

---

<sup>107</sup> Organisasi ini didirikan pada 1912 oleh E.F.E. Douwes Dekker di Bandung, merupakan organisasi pertama kali yang memakai nama partai dengan konsep nasionalisme Hindia (*Indisch Nationalism*). Organisasi ini yang menerima berbagai etnik yaitu kaum Indo-Eropa dan pribumi, radikal, menuntut kemerdekaan Indonesia. George McTurnan Kahin, *Nasionalisme dan revolusi di Indonesia; Refleksi Pergumulan Lahirnya Republik*, (Jakarta: kerja sama Universitas Negeri Surakarta dan Pustaka Sinar Harapan, 1995), hlm. 134.

<sup>108</sup> *Perniagaan*, 25 Januari 1928

<sup>109</sup> *Perniagaan*, 12 Februari 1928

Lahirnya konsepsi “warga negara Hindia Belanda” di kalangan beberapa pemimpin Tionghoa peranakan mungkin disebabkan oleh kekecewaan mereka terhadap Tiongkok. Pada 1927 Tiongkok masih lemah dan tidak mungkin akan memberikan perlindungan kepada golongan Tionghoa peranakan. Tulisan-tulisan yang mengungkapkan kekecewaan ini dapat ditemukan dalam beberapa surat kabar Tionghoa peranakan setelah 1927.<sup>110</sup> Gagasan mengenai “kewarganegaraan Hindia Belanda” kemudian dikembangkan menjadi “kewarganegaraan Indonesia” (*Indonesierschap*) pada awal 1930-an. Liem menegaskan kembali bahwa Indonesia adalah tanah air dan negara dari golongan Tionghoa peranakan. “Kewarganegaraan Indonesia” yang memberikan kaum Tionghoa peranakan hak dan kewajiban yang sama seperti golongan pribumi harus diterapkan.<sup>111</sup>

Liem Koen Hian terus menyuarakan gagasannya melalui ceramah di berbagai tempat. Puncaknya, pada 25 September 1932, ia bersama dengan Ong Liang Kok, dan kaum peranakan lainnya di Surabaya, dengan disokong oleh kaum nasionalis moderat mendirikan Partai Tionghoa Indonesia (PTI). Tujuan organisasi ini adalah untuk memajukan ekonomi, sosial, dan politik rakyat Indonesia hingga menjadi satu negara dengan hak dan kewajiban yang sama.<sup>112</sup>

Sebelum berdirinya PTI di Surabaya sudah ada dua surat kabar yang mengusung gagasan tentang kewarganegaraan Indonesia. Dua surat kabar itu adalah *Sin Tit Po* dan Soeara Publiek/Swara Publiek. Liem Koen Hian pernah bekerja sebagai *hoofdredacteur* pada kedua surat kabar itu. Seperti yang sudah dikemukakan sebelumnya, *Sin Tit Po* adalah kelanjutan dari *Sin Jit Po*. Liem Koen Hian adalah aktor dibalik perubahan ini. Sejak Liem Koen Hian bergabung pada 1929, surat kabar ini mengalami perubahan secara perlahan. Liem Koen Hian mulai memasukkan gagasannya tentang konsep “*Indonesierschap*”. Hal ini yang kemudian membuat *Sin Jit Po* banyak dimusuhi oleh surat kabar yang berbeda haluan, seperti *Pewartar Soearabaia* dan *Swara Publiek* yang sepeninggal

---

<sup>110</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 82

<sup>111</sup> *Sin Tit Po*, 24-26 Agustus 1932

<sup>112</sup> *Sin Tit Po*, 26 September 1932

Liem Koen Hian kembali kepada haluannya sebagai surat kabar berorientasi politik ke Tiongkok.

Pada *Sin Jit Po* edisi 28 November 1929 (No. 265) disebutkan bahwa pada 2 Desember 1929 akan terbit surat kabar baru yang menggantikannya. Artikel yang dimuat pada halaman pertama itu sekaligus menunjukkan persetujuan antara *Sin Jit Po* atau lebih tepatnya Liem Koen Hian dengan dua surat kabar Tionghoa peranakan yang berorientasi politik ke Tiongkok itu. Liem mengatakan tujuan diterbitkannya surat kabar baru itu adalah untuk menjaga wacana masyarakat Surabaya agar tidak hanya terpengaruh oleh satu suara surat kabar saja. Dalam artikel itu disebutkan secara jelas “...maka selamanja publiek di Soerabaia tida aken moedah dipengaroehin oleh Pewarta Soerabaia dan Swara Publiek sadja, jang jadi een pot nat”. Artikel itu, secara tersirat menggambarkan bahwa di Surabaya terjadi persetujuan dan konflik politik kepentingan antara surat kabar yang berbeda haluan. Liem menuduh bahwa Pewarta Soerabaia dan Swara Publiek ingin mematikan *Sin Jit Po* yang sudah tidak berorientasi politik ke Tiongkok.

Pada 2 Desember 1929 terbit surat kabar yang dijanjikan Liem Koen Hian. Edisi perdana *Sin Tit Po* ini terbit delapan halaman lebih. Direktur dari surat kabar ini adalah Tan Ping Lee dan jabatan administratur dipegang oleh Njoo Khee Tjo. Dalam edisi perdana *Sin Tit Po* dimuat artikel tentang kelahiran surat kabar baru itu. Artikel tersebut menerangkan bahwa terbitnya surat kabar ini adalah jawaban atas segala usaha dari berbagai pihak yang ingin Liem Koen Hian dan *Sin Jit Po* mengalami kemunduran. Menurut Liem, salah satu contoh usaha itu adalah tuduhan penggelapan uang yang dilakukan dirinya ketika ia masih menjabat *hoofdredacteur* Swara Publiek. Ia mengatakan bahwa tuduhan itu dimaksudkan agar dirinya didepak dari *Sin Jit Po*.<sup>113</sup> Kesulitan keuangan yang dialami *Sin Jit Po* akhirnya menyebabkan surat kabar ini dijual oleh Ong Ping Bie kepada Tan Ping Lee. Liem Koen Hian tetap dipertahankan sebagai *hoofdredacteur*. Surat kabar ini berubah menjadi *Sin Tit Po* di bawah

---

<sup>113</sup> *Sin Tit Po*, 2 Desember 1929.

kepemimpinannya. Dengan segala gagasannya tentang konsep “*Indonesier*”, Liem membawa *Sin Tit Po* menjadi “organ tidak resmi” PTI yang didirikannya.

Menjelang akhir 1942, surat kabar Tionghoa peranakan di Surabaya dikuasai oleh dua kutub yang berbeda. Di kutub yang pertama, *Pewartar Soerabaia* sebagai surat kabar yang telah mapan mengusung orientasi politik ke Tiongkok. *Pewartar Soerabaia* disokong oleh surat kabar yang lebih kecil *Swara Publiek*. Kutub kedua, *Sin Tit Po* dengan konsep “*Indonesier-schap*”-nya.

Berdasarkan uraian yang sudah dijelaskan di atas, secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa perubahan orientasi politik surat kabar Tionghoa peranakan sepanjang abad ke-20 tidak dapat dibagi secara tegas ke dalam periode yang terpisah. Pada awal 1900-an surat kabar Tionghoa peranakan secara umum lebih menekankan solidaritas golongannya. Pada periode ini belum terlihat keberpihakan surat kabar terhadap orientasi politik tertentu. Hal ini karena memang pada saat itu kesadaran golongan Tionghoa peranakan hanya sebatas kesadaran kultural dan bukan kesadaran politik. Pada periode 1917-1928 mulai terbentuk opini masyarakat Tionghoa peranakan tentang identitas mereka sebagai orang asing di Hindia Belanda. Oleh karena itu, golongan Tionghoa peranakan tidak perlu ikut dalam gerakan politik. Usaha untuk menyebarkan ide dan pemikiran ini dilakukan melalui surat kabar-surat kabar Tionghoa peranakan. Di Surabaya, pembentukan opini masyarakat ini dilakukan oleh *Pewartar Soerabaia*. Meskipun tidak militan seperti *Sin Po*, dapat dikatakan bahwa *Pewartar Soerabaia* merupakan pilar utama dari pembentukan orientasi politik ini.

Ketika *Chung Hwa Hui* didirikan pada 1928, usaha untuk menyebarkan ide-ide tentang keberpihakannya terhadap Belanda pun dilakukan melalui pers Tionghoa peranakan. Hal unik terjadi di Surabaya tidak terdapat surat kabar yang mendukung aliran politik *Chung Hwa Hui*. Bahkan pada periode ini muncul lagi surat kabar Tionghoa peranakan yang mendukung kelompok *Sin Po* yakni *Sin Jit Po*. Surat kabar ini dapat dikategorikan sebagai surat kabar yang sama keras dan konservatifnya dengan *Sin Po*. Bahkan *Sin Jit Po* mengancam *Pewartar Soerabaia* yang lebih liberal haluan politiknya. *Sin Jit Po* kemudian didukung terbitnya

*Soeara Publiek* pada 1925. Keduanya berubah haluan pada 1929 ketika dipimpin oleh Liem Koen Hian.

Periode 1928-1942 ditandai dengan munculnya aliran baru dalam politik golongan Tionghoa peranakan. Surat kabar yang merupakan kelanjutan dari *Sin Jit Po* muncul sebagai pengusung aliran politik pribumi yakni *Sin Tit Po*. Setelah berdirinya PTI, surat kabar ini menjadi corong utama penyebaran ide-ide tentang “*Indonesierschap*” Lim Koen Hian. Pada periode ini bukan berarti tidak ada orientasi politik lain. Aliran yang pro Tiongkok tetap ada, namun tampil lebih moderat.

### 3.3 Gagasan Kebangsaan dalam Surat Kabar Tionghoa Peranakan

Liem Koen Hian dilahirkan di Banjarmasin pada 1896. Ayahnya adalah seorang pedagang kecil yang kemudian menjadi pegawai Hindia Belanda. Liem menerima pendidikan sekolah dasar Belanda di kota kelahirannya.<sup>114</sup> Setelah meninggalkan bangku sekolah, ia bekerja sebentar sebagai juru tulis pada perusahaan minyak Shell di Balikpapan. Namun rupanya ia tidak senang dengan pekerjaan itu. Ia kemudian kembali ke kota kelahirannya untuk bekerja di sebuah surat kabar peranakan yang bernama *Penimbangan*.<sup>115</sup>

Pada waktu Perang Dunia I Liem bermigrasi ke Surabaya dan bekerja sebagai anggota dewan redaksi majalah *Tjhoen Tjhioe* (dari tahun 1915 sampai 1916).<sup>116</sup> Pada awal 1917 Liem mendirikan surat kabar mingguan *Soo Lim Poo*, sekaligus menjadi pemimpin redaksinya, namun surat kabar ini tidak berumur

---

<sup>114</sup> M. P. B. Manus, *et. al.*, *Tokoh-Tokoh Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia* (Jakarta: Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1993), hlm. 134.

<sup>115</sup> Leo Suryadinata, “Liem Koen Hian: Peranakan yang Mencari Identitas,” dalam Ainin Dita Z (*ed.*), *Tokoh Tionghoa dan Identitas Indonesia: Dari Tjoe Bou San sampai Yap Thiam Hien*, (Jakarta: Komunitas Bambu, 2010), hlm. 64.

<sup>116</sup> Ananda B. Kusuma, *ed., et. al.*, *Risalah Sidang Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) – Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) 28 Mei – 22 Agustus 1945* (Jakarta: Sekretariat Negara RI, 1995), hlm. 591.



panjang. Pada akhir tahun 1918 ia diminta untuk memimpin surat kabar *Sinar Soematra* di Padang hingga tahun 1921. Kiprahnya berlanjut ketika tahun 1921 hingga 1925 Liem menjadi pemimpin redaksi *Pewartar Soerabaia*, sebuah harian milik The Kian Sing, seorang peranakan penganut nasionalisme Tiongkok yang sangat aktif dalam Konferensi Semarang 1917.<sup>117</sup>

Nasionalisme Tiongkok sedang mencapai puncaknya di Jawa pada awal abad ke-20. Kebijakan-kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda menimbulkan keresahan di kalangan Tionghoa peranakan. Sebagaimana halnya banyak kaum Tionghoa peranakan pada masa itu, nasionalisme Tiongkok pun mempengaruhi Liem Koen Hian. Ketika grup *Sin Po* mempropagandakan penolakan terhadap *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap* (WNO) atau undang-undang kekawulanegaraan Belanda dan *Indie Weerbar* (pertahanan Hindia) pada akhir dasawarsa kedua abad ke-20, Liem ikut mendukung kampanye tersebut melalui tulisan-tulisannya selama periode ia menjadi pemimpin redaksi *Sinar Soematra* dan *Pewartar Soerabaia* (1918-1925).

Di awal abad ke-20 nasionalisme Tiongkok tumbuh subur di tengah memuncaknya ketidakpuasan masyarakat Tionghoa terhadap pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Negeri Tiongkok mulai memperhatikan kaum Tionghoa peranakan di perantauan. Kapal-kapal perang Tiongkok yang disertai seorang duta, inspektur-inspektur pengajaran, kesempatan belajar di Negeri Tiongkok, dan lain-lain dikirimkan oleh Kaisar Tiongkok ke Hindia Belanda. Pada 1909 Kekaisaran Tiongkok mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kekaisaran yang menegaskan bahwa semua orang yang berdarah Tionghoa dianggap berkewarganegaraan Tiongkok. Tindakan-tindakan ini dimaksudkan untuk menarik simpati orang-orang Tionghoa peranakan di perantauan agar mau membantu Negeri Tiongkok yang sedang berusaha melepaskan diri dari pengaruh bangsa-bangsa asing. Situasi ini membuat pemerintah Kolonial Hindia Belanda khawatir dan terpaksa melonggarkan tekanan-tekanannya pada masyarakat Tionghoa peranakan.

---

<sup>117</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa ... op. cit.*, hlm. 132.

Pada 1910, setahun setelah Negeri Tiongkok mengeluarkan Undang-Undang Kewarganegaraan Kekaisaran, pemerintah Kolonial Hindia Belanda merespons dengan memberlakukan *Wet op het Nederlandsch Onderdaanschap* (WNO) atau Undang-Undang Kekawulanegaraan Belanda. Dalam undang-undang tersebut ditetapkan bahwa penduduk yang lahir di Hindia Belanda adalah kawula Belanda (*Nederlands Onderdanen*) sehingga peranakan Tionghoa otomatis menjadi Kawula Belanda.

Pemberlakuan WNO ini mendapat tantangan keras dari para nasionalis Tionghoa di Hindia Belanda, termasuk Liem Koen Hian. Kampanye besar-besaran untuk menentang WNO dimulai dengan memanfaatkan momentum adanya wacana pembentukan *Indie Weerbar* (Pertahanan Hindia Belanda). Dalam tulisannya yang berjudul *Oendang-Oendang Karahajatan Olanda I*, Liem memprotes kedudukan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda yang diatur dalam WNO, sebagai berikut:

Dengen itoe oendang-oendang pamarentah menjataken sategas-tegasnja, bahoea tjaranja ia memperlakoeken orang Tionghoa dengan berlaenan dari tetamoe-tetamoe dari Barat, disebabkan oleh kerna ia anggep bangsa Tionghoa tida lebih dari satoe bangsa taloekan. Sekarang, sasoeatoe orang Tionghoa, peranakan dan totok, bisa kata kebangsaannja dihinaken.<sup>118</sup>

Menurut Liem Koen Hian, WNO adalah penghinaan terhadap bangsa Tionghoa sebab dalam WNO kedudukan peranakan Tionghoa berada di bawah golongan Eropa. Tionghoa peranakan merupakan bangsa asing di Hindia Belanda, bukan bagian dari bangsa yang berada di bawah kekuasaan pemerintah kolonial Hindia Belanda, sehingga tidak seharusnya WNO menempatkan golongan Tionghoa peranakan di bawah golongan Eropa seolah-olah bangsa Tionghoa adalah rakyat dari negeri yang ditaklukkan Belanda.

Bagi Liem, kedudukan bangsa Tionghoa sebagai bangsa asing tidak lebih rendah daripada bangsa Jepang dan Eropa. Seharusnya pemerintah kolonial menempatkan orang-orang Tionghoa pada derajat yang sama dengan orang-orang

---

<sup>118</sup> Liem Koen Hian. "Oendang-Oendang Karahajatan Olanda I" dalam *Sinar Sumatra*, 3 Februari 1919.

Jepang dan Eropa di Hindia Belanda. Sebagai bangsa yang sederajat dengan bangsa Eropa dan Jepang, maka Liem menuntut persamaan hak dan kewajiban antara Tionghoa peranakan dengan orang-orang Jepang dan Eropa. WNO yang menempatkan kaum Tionghoa peranakan sebagai rakyat negara jajahan dianggap telah melanggar hak-hak bangsa Tionghoa sebagai bangsa asing yang seharusnya diperlakukan sebagai “tamu” dengan penuh rasa hormat.

Selain membedakan hak-hak orang Tionghoa dengan orang Eropa, WNO juga dianggap merugikan kaum Tionghoa peranakan karena hak-haknya dan hak-hak rakyat pribumi pun dibedakan. Diskriminasi ini membuat Tionghoa peranakan semakin tertekan. Mengenai hal ini Liem menyatakan sebagai berikut:

Peranakan Tionghoa jang soeda djadi rahajat Olanda, tida mempoenjai hak dan kewadajiban sama seperti orang Olanda dan djoega tida mempoenjai hak dan kewadajiban sama seperti orang boemipoetra. Bahoea peranakan Tionghoa masi diperbedaken dari orang Olanda, itoelah soeda dikatahoei. Tapi, boleh djadi ada banjak orang Tionghoa jang belon pikir, bahoea marika poen dibedaken dari orang boemipoetra. Satoe tjonto kita maoe kasi. Orang boemipoetra boleh berladang, tapi orang Tionghoa sampe ini djam tida boleh. Djadi, dalem perkara hak orang Tionghoa peranakan sekarang mengambang diantara orang Olanda dan orang boemipoetra.<sup>119</sup>

WNO dinilai tidak konsisten dalam mengatur kedudukan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Tionghoa peranakan tidak diberikan hak dan kewajiban sebagaimana seharusnya diberikan kepada bangsa-bangsa asing di Hindia Belanda namun juga tidak diberi hak dan kewajiban penuh sebagai rakyat Hindia Belanda. Kedudukan yang mengambang dalam WNO ini membuat kaum Tionghoa peranakan terjepit, hak-haknya sangat terbatas, dan kepentingannya tidak benar-benar terjamin. Di satu sisi pemerintah Tiongkok tidak dapat melindungi Tionghoa peranakan Hindia Belanda sebab kaum Tionghoa peranakan adalah kawula negara Belanda tetapi di sisi lain pemerintah Hindia Belanda juga tidak sepenuhnya menjamin kepentingan Tionghoa peranakan.

---

<sup>119</sup> Liem Koen Hian. “Oendang-Oendang Karahajatan Olanda II” dalam *Sinar Sumatra*, 4 Februari 1919.

Liem berpendapat bahwa tidak ada niat baik dari pemerintah Kolonial Hindia Belanda di balik pemberlakuan WNO, yang mencegah Negeri Tiongkok ikut campur dalam urusan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Ia berargumen bahwa pembedaan hak dan kewajiban berdasarkan ras dalam aturan WNO merupakan politik adu domba yang dijalankan Belanda sekaligus bukti bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak memiliki niat baik untuk memperbaiki nasib Tionghoa peranakan. Orang-orang Tionghoa peranakan dan pribumi dengan sengaja dipisahkan agar tidak terdapat kepentingan bersama dan orang Tionghoa peranakan dibiarkan menjadi orang asing sehingga dapat dimanfaatkan sebagai kelas perantara dalam struktur kolonial. WNO sebenarnya dibuat untuk mencegah negeri Tiongkok melindungi kaum Tionghoa peranakan di Hindia Belanda, sebab pemerintah Hindia Belanda takut jika suatu saat Tiongkok menjadi negara kuat dan mampu menekan pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan status hukum yang sama dengan orang Eropa kepada kaum Tionghoa peranakan (seperti halnya orang Jepang), maka orang-orang pribumi pun akan menuntut kedudukan yang sama pula. Agar hal tersebut tidak terjadi, pemerintah Hindia Belanda membuat WNO, sehingga sekalipun Tiongkok menjadi negara kuat dan memaksa pemerintah Hindia Belanda untuk memberikan kedudukan hukum setara dengan bangsa Eropa kepada bangsa Tionghoa, maka hanya Tionghoa totok saja yang akan mendapatkannya, sedangkan Tionghoa peranakan tidak. Dengan demikian tidak ada tuntutan rakyat pribumi untuk pemberian status hukum serupa.<sup>120</sup> Atas dasar alasan-alasan itulah Liem menentang WNO.

Dengan memanfaatkan isu *Indie Weerbar*, Liem mengajak kaum Tionghoa peranakan untuk segera bergerak bersama-sama memprotes WNO. Akan tetapi meski Liem menentang keras WNO, ia memahami bahwa ada sebagian kaum Tionghoa peranakan yang mendukung WNO dan ingin menjadi kawula negara Belanda. Bagi Liem, adalah hak setiap Tionghoa peranakan untuk memilih menjadi kawula negara Belanda atau menjadi warga negara Tiongkok dan tetap menjadi orang asing di Hindia Belanda. Bagi Tionghoa peranakan yang memilih

---

<sup>120</sup> Koen Hian *Ibid.*

kekawulanegaraan Belanda, pilihan tersebut pun harus dihormati. Liem menuntut minimal WNO tidak dipaksakan kepada setiap Tionghoa peranakan serta memberi kesempatan kepada Tionghoa peranakan untuk memilih kewarganegaraan Tiongkok.<sup>121</sup>

Penolakan terhadap WNO menurut Liem bukan sekedar karena WNO menempatkan kaum Tionghoa peranakan di bawah bangsa Eropa dan tidak memberikan keuntungan bagi kaum Tionghoa peranakan. Liem juga menolak anggapan bahwa orang-orang Tionghoa peranakan tidak setuju dengan WNO karena takut wajib militer. Lebih dari itu, kaum Tionghoa peranakan merasa dirinya bukanlah rakyat Hindia Belanda melainkan bagian dari bangsa Tiongkok yang besar. Perasaan kebangsaan sebagai bangsa Tiongkok membuat orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda tidak mau menjadi rakyat Hindia Belanda sekalipun diberi kedudukan sama dengan orang-orang Eropa. Bagi Liem kesetiaan terhadap negeri Tiongkok adalah tanpa syarat. Sebagai seorang Tionghoa peranakan yang merasa dirinya sebagai bagian dari bangsa Tionghoa yang besar, Liem merasa berkewajiban untuk mengabdikan pada negeri Tiongkok. Liem yakin bahwa kaum Tionghoa peranakan harus membantu negeri Tiongkok agar menjadi kuat. Ia percaya jika Tiongkok menjadi kuat, maka akan mampu melindungi kepentingan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda dan negara-negara lainnya, sehingga nasib Tionghoa peranakan tidak lagi terombang-ambing karena menjadi minoritas yang lemah di negeri asing. Hal itu diungkapkannya dalam tulisan berikut ini:

...saja ada saorang Tionghoa. Saja poenja tanah aer terletak di sana dan sedeng berichtiar boeat mengangkat dirinja. Dan dalem ichtiarnja itoe ia toedjoeken matanja boeat minta pertoeoengan dan bantoean pada poetra-poetranja jang setia, baik jang masih berdiam dalem negrinja, baikpoen jang berdiam di loear negri. Dan di antara poetra-poetranja jang berdiam di loear negri, adalah teritoeng djoega saja poenja bangsa di Hindia sini, jang, sebaliknja, poen toedjoeken matanja pada itoe negri leloehoer, dari siapa

---

<sup>121</sup> Liem Koen Hian. "Oendang-Oendang Karahajatan Olanda III" dalam *Sinar Sumatra*, 5 Februari 1919.

marika (peranakan Tionghoa) harep terangkatnja marika poenja deradjat.<sup>122</sup>

Orientasi ke negeri Tiongkok ini masih dipertahankan Liem ketika ia menjadi pemimpin redaksi *Pewart* Soerabaia hingga tahun 1925. Memasuki dasawarsa 1920-an nasionalisme Tiongkok semakin melemah, bahkan beberapa bekas pemimpin kampanye yang menentang WNO seperti The Kian Sing dan Hauw Tek Kong mengubah haluannya dan berbalik mendukung WNO. Ketika Hauw Tek Kong, bekas pendukung kuat golongan *Sin Po*, menyerukan kepada peranakan Tionghoa untuk menerima kekawulanegaraan Belanda serta setia kepada Belanda, Liem mengejek Hauw dengan mengatakan bahwa Hauw sedang bermimpi di tengah hari bolong. Liem berpendapat bahwa Tionghoa peranakan bisa menjadi “rakjat Olanda jang setia dan sejati” kalau 800.000 Tionghoa peranakan di Hindia dimasak bersama-sama dengan beberapa ribu orang Belanda di dalam sebuah kawah yang maha besar dan dari sana menciptakan semacam manusia baru.<sup>123</sup>

Pemikiran Liem Koen Hian pada periode ini sangat dipengaruhi oleh pemikiran golongan *Sin Po*. Memasuki pertengahan tahun 1920-an, pengaruh golongan *Sin Po* semakin melemah karena semakin berkurangnya pembatasan pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap masyarakat Tionghoa peranakan. Dicabutnya kebijakan *wijkenstelsel* dan *passenstelsel*, tidak dilaksanakannya *Indie Weerbar*, ditambah lagi dengan meningkatnya Tionghoa peranakan yang menerima pendidikan Belanda membuat kampanye golongan *Sin Po* kehilangan kekuatan. Demikian dapat dikatakan pada pertengahan 1920-an orientasi Liem Koen Hian mulai bergeser ke Hindia Belanda.

Pada 12 November 1926 terjadi pemberontakan komunis di sekitar Batavia dan Banten. Dua bulan kemudian (Januari 1927) pemberontakan serupa terjadi di pantai barat Sumatera. Kedua pemberontakan ini dapat dipadamkan oleh

---

<sup>122</sup> Liem Koen Hian. “Oendang-Oendang Karahajatan Olanda I” dalam *Sinar Sumatra*, 3 Februari 1919.

<sup>123</sup> Hauw Tek Kong. “Jingoisme” dalam *Keng Po*, 29 Januari 1925.

pemerintah.<sup>124</sup> Pemberontakan komunis menimbulkan reaksi yang sangat keras dan tegas dari pemerintah Hindia Belanda. Enam hari setelah terjadinya revolusi di Batavia dan Banten, Dewan Hindia Belanda memenjarakan para pemimpin komunis terkemuka.<sup>125</sup> Untuk itu pada Januari 1927 Belanda membangun kamp pengasingan Boven Digoel di pedalaman Irian Barat untuk mengamankan para pemberontak tersebut.<sup>126</sup> Akibat revolusi, kira-kira 13.000 orang ditahan dan dari jumlah itu setengahnya dibebaskan segera, 4.500 orang lainnya dipenjarakan dan sekitar 1.300 orang dikirim ke Boven Digoel. Hukuman ini disetujui oleh Gubernur Jenderal A.C.D de Graeff yang tiba beberapa bulan sebelum terjadinya pemberontakan.<sup>127</sup>

Pasca pemberontakan menandai suatu babak baru di atas pentas politik pergerakan nasional di Hindia Belanda. Politik kolonial yang sangat keras itu sudah terasa sejak 1927. Pengawasan terhadap pergerakan nasional dilakukan sedemikian rupa, demikian juga larangan-larangan terhadap pers maupun gerakan-gerakan lainnya.<sup>128</sup> Antagonisme rasial yang semakin meningkat antara Belanda dan Pribumi ini membuat nasionalisme pribumi semakin berkembang. Kehancuran PKI dan semakin tidak aktifnya Sarekat Islam memberikan jalan lapang bagi pergerakan nasional yang berhaluan nasionalisme sekuler. Perserikatan Nasional Indonesia yang berdiri pada 4 Juli 1927 segera menjadi perhatian utama dan mengambil alih tempat utama dalam pergerakan nasional. Pergerakan nasional ke arah persatuan Indonesia semakin diperkuat setelah pada 28 Oktober 1928 para pemuda mendeklarasikan “Sumpah Pemuda” dalam Kongres Pemuda II di Batavia. Adapun deklarasi tersebut menyatakan: satu tanah

---

<sup>124</sup> van Niel, *op. cit.*, hlm. 302.

<sup>125</sup> Takashi Shiraishi, *Hantu Digoel: Politik Pengamanan Politik Zaman Belanda* (Yogyakarta: LKiS, 2001), hlm. 93-94.

<sup>126</sup> Shiraishi, *Ibid.*, hlm. 9.

<sup>127</sup> van Niel, *op. cit.*, hlm. 326-327.

<sup>128</sup> Leirissa, *op. cit.*, hlm. 69.

air, Indonesia; satu bangsa, Indonesia; dan menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia.<sup>129</sup>

Pada kurun waktu itu komunitas orang-orang Belanda juga semakin konservatif serta merasa sangat cemas dengan rapat-rapat umum yang besar, di mana Soekarno dan pemimpin-pemimpin lainnya dengan mencerca penguasa kolonial. Gubernur Jenderal A.C.D de Graeff, yang cenderung memihak politik etis, masih merasa enggan untuk mendukung penindasan secara umum. Meski demikian, pada 1928 dia mengirim Tjipto Mangunkusumo ke pengasingan di Banda Neira (hingga tahun 1941), memerintahkan penumpasan terhadap gerakan serikat buruh yang berhaluan kiri ketika pimpinan Serikat Kaum Buruh Indonesia ditangkap pada 1929, dan akhirnya pada tahun 1929 menangkap Soekarno beserta pemimpin-pemimpin Partai Nasionalis Indonesia (PNI) lainnya.<sup>130</sup>

Pada tahun 1930-an telah nampak adanya suatu masyarakat baru, yang dapat dinamakan masyarakat Indonesia. Masyarakat baru ini terdiri dari berbagai suku bangsa yang sudah sanggup membedakan antara identitas suku dan kepentingan nasional. Ciri-ciri masyarakat baru ini nampak dalam alam pikiran mereka yang tidak lagi terbatas pada alam pikiran tradisional. Cita-cita mereka mengarah pada suatu satuan politik baru yang terlepas dari ikatan-ikatan tradisional maupun kolonial Belanda. Indonesia Merdeka adalah semboyan paling ekstrim dari cita-cita itu.<sup>131</sup>

Selain itu, peristiwa lain yang juga mengguncang Hindia Belanda adalah depresi ekonomi pada 1930, yang sebenarnya sudah mulai dirasakan sejak 1929. Krisis ekonomi ini menghancurkan sendi-sendi ekonomi negara industri maju akibat melimpahnya produksi yang tidak diikuti oleh daya beli yang tinggi dari masyarakat.<sup>132</sup> Krisis ini mencapai puncaknya pada 1930-1934 dimana dilakukan

---

<sup>129</sup> Keith Foulcher, *Sumpah Pemuda: Makna dan Proses Penciptaan Simbol Kebangsaan Indonesia* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 13.

<sup>130</sup> Ricklefs, *op. cit.*, hlm. 274.

<sup>131</sup> R. Z. Leirissa, *Op. Cit.*, hlm. 68.

<sup>132</sup> Wilson, *Orang dan Partai Nazi di Indonesia: Kaum Pergerakan Menyambut Fasisme* (Jakarta: Komunitas Bambu, 2008), hlm. 51.



pengurangan produksi dan jumlah buruh secara besar-besaran, termasuk di Hindia Belanda

Pada 1931, de Graeff digantikan oleh Gubernur Jenderal de Jonge. Pergantian ini merupakan garis pemisah antara dua zaman politik kolonial Hindia Belanda dalam empat puluh tahun terakhir kekuasaan mereka. Perbedaan prinsip antara de Graeff dan de Jonge terletak pada garis etis dan non-etis. Tujuan utama politik Kolonial Hindia Belanda pada masa de Jonge dititikberatkan pada mempertahankan pemerintah Kolonial Hindia Belanda, ini berarti de Jonge menolak segala bentuk perubahan di masyarakat dan terutama sekali bila perubahan itu melancarkan gerakan pembaruan. Depresi ekonomi pada 1930-an dijadikan sebagai alasan untuk memandang arti perubahan-perubahan tersebut. Perubahan menuntut penambahan anggaran belanja dan tentu saja tidak mungkin dilakukan berhubung dengan kesukaran ekonomi. De Jonge tidak mempertahankan politik etis,<sup>133</sup> karena politik tersebut dianggap membuka celah kesempatan kepada radikalisme gerakan nasionalis.<sup>134</sup>

Peristiwa-peristiwa ini tidak luput dari perhatian masyarakat Tionghoa peranakan di Hindia Belanda dan ikut berpengaruh juga dalam kehidupan mereka, termasuk Liem Koen Hian. Tahun 1925 Liem keluar dari *Pewartar Soerabaia* dan menjadi pemimpin redaksi *Soeara Publiek*. Peristiwa ini bersamaan waktunya

---

<sup>133</sup> Politik etis merupakan kebijakan pemerintah Kolonial Hindia Belanda sebagai bentuk balas budi terhadap kaum pribumi yang banyak memberikan pemasukan kas negara induk Belanda pada masa sistem tanam paksa (1930-1970). Politik ini dikeluarkan pada 1901 ketika pemerintah Hindia Belanda menyaksikan kesejahteraan hidup kaum pribumi terus merosot. Kebijakan politik etis ini meliputi tiga program besar, yaitu irigasi (pengairan) dengan membangun dan memperbaiki pengairan-pengairan dan bendungan untuk keperluan pertanian, emigrasi yakni mengajak penduduk untuk bertransmigrasi, dan edukasi yakni memperluas dalam bidang pengajaran dan pendidikan. Program ini secara tidak langsung mengurus kas pemerintah Kolonial Hindia Belanda, sehingga ketika depresi ekonomi pada 1930-an melanda kerajaan induk Belanda, Gubernur Jenderal de Jonge tidak memberlakukan lagi. Sediono M.P Tjondronegoro dan Gunawan Wiradi, *Dua Abad Penguasaan Tanah: Pola Penguasaan Tanah Pertanian di Jawa dari Masa ke Masa*, (Jakarta: kerjasama Yayasan Obor Indonesia dan Gramedia, 1984), hlm., 203.

<sup>134</sup> Onghokham, *Runtuhnya... op. cit.*, hlm. 43.

dengan perubahan pandangannya setelah ia membaca dan makin banyak mengenal gagasan-gagasan dr. Tjipto Mangunkusumo. Ia setuju dengan pendapat Tjipto tentang perkembangan bertahap dari “bangsa Hindia Belanda” yang terdiri dari semua orang yang menganggap Hindia Belanda sebagai tanah airnya serta yang secara aktif ikut membantu mengembangkan negara itu. Kaum peranakan (Indo-Belanda, Tionghoa peranakan dan Arab peranakan) merupakan bagian dari anggota bangsa Hindia Belanda.<sup>135</sup> Pemikiran Liem sejak 1927 dipengaruhi oleh gagasan nasionalisme Hindia. Gagasan nasionalisme Hindia sendiri pertama kali dicetuskan oleh Douwess Dekker dan diperjuangkan melalui *Indische Partij*,<sup>136</sup> gagasan ini kemudian dikembangkan Tjipto Mangunkusumo menjadi *Indier Burgerschap*.<sup>137</sup> Pemikiran Tjipto Mangunkusumo inilah yang menjadi cikal bakal gagasan *Indonesierschap* Liem Koen Hian. Di Surabaya, Liem tinggal di antara kaum nasionalis dan pekerjaannya sebagai seorang wartawan menyebabkan ia terus berhubungan dengan kaum nasionalis Indonesia. Hubungan yang hangat antara Liem dengan kaum nasionalis Indonesia di Surabaya ini nampak ketika Liem ditahan akibat boikot sepakbola di Surabaya tahun 1932, ia dibebaskan karena tekanan dari para tokoh-tokoh nasionalis pribumi seperti M. H. Thamrin dan Soetomo. Kontak yang intens dengan kaum nasionalis Indonesia ini juga mempengaruhi pemikiran Liem Koen Hian.

Pada dasarnya pemikiran Liem Koen Hian memperjuangkan persamaan kedudukan atas dasar kemanusiaan. Ia menentang diskriminasi rasial yang secara sistematis dilakukan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Dalam salah satu tulisannya yang berjudul “Soeal-Soeal dari Tionghoa Peranakan” ia menceritakan sebuah diskriminasi yang dialaminya sendiri ketika ia berada dalam tahanan akibat *persdelict*. Liem mempertanyakan mengapa para tahanan dari golongan Eropa dan Jepang memperoleh perlakuan lebih baik daripada tahanan dari golongan Tionghoa peranakan. Ia mencontohkan bahwa hanya orang Eropa dan

---

<sup>135</sup> Suryadinata. *Dilema ... op. cit.*, hlm. 53.

<sup>136</sup> Wilson, *op. cit.*, hlm. 104.

<sup>137</sup> Suryadinata, Suryadinata. *Dilema ... log. cit.*, hlm. 53.

Jepang yang diperbolehkan menggunakan sepatu di dalam tahanan. Selain itu tahanan Eropa dan Jepang mendapatkan kasur serta kelambu untuk tidur, berbeda dengan golongan lainnya yang hanya bisa tidur di bangku beton selebar setengah meter. Makanan para tahanan pun juga dibedakan berdasarkan golongan rasnya. Liem membandingkan perlakuan buruk yang diterimanya akibat *persdelict* dengan perlakuan baik yang diberikan pemerintah Hindia Belanda kepada seorang tahanan berkebangsaan Jepang yang ditahan karena melakukan usaha prostitusi illegal.<sup>138</sup>

Tulisan Liem tersebut menyindir kebijakan pemerintah kolonial yang diskriminatif terhadap orang Tionghoa peranakan. Ia memprotes perlakuan tidak adil yang diterimanya hanya karena kebangsaannya sebab kebangsaan tidak dapat dijadikan dasar untuk membedakan derajat seseorang. Dalam perkembangan selanjutnya nasionalisme pribumi semakin pesat dan pertentangan antara bangsa bumiputera dengan Belanda terus meruncing. Melihat kenyataan itu Liem yakin bahwa tidak lama lagi bumiputera akan merdeka. Tionghoa peranakan tentu mau tidak mau akan terlibat dalam pertentangan tersebut. Dalam pertentangan tersebut, Liem berpendapat bahwa Tionghoa peranakan harus bergabung dalam kebangsaan Indonesia. Dalam sebuah rapat umum, seorang wartawan *Pewartar Soerabaia* bernama *Siauw Biauwan San* mendebat pandangan Liem. *Siauw* mengemukakan bahwa Tionghoa peranakan sebaiknya bersikap netral dalam pertentangan antara bumiputera dan Belanda, tidak turut campur dalam konflik tersebut, dan tetap menjadi orang asing di Hindia Belanda. Menanggapi pernyataan *Siauw* tersebut, Liem menjawab bahwa bila tiba saatnya pertentangan antara bangsa bumiputera yang dijajah dengan bangsa Belanda yang menjajah itu, mau tidak mau kaum Tionghoa peranakan akan terlibat juga, sehingga Tionghoa peranakan harus segera menentukan di pihak mana mereka akan turut berjuang.<sup>139</sup>

---

<sup>138</sup> Liem Koen Hian. "Soeal-Soeal dari Tionghoa Peranakan" dalam *Soeara Publiek*, 27 Juli 1927.

<sup>139</sup> Liem Koen Hian. "Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa-Peranakan III" dalam *Sin Tit Po*, 27 Agustus 1932.

Tanggapan itu mengundang banyak pertentangan dari berbagai pihak. Bahkan ada yang mengecam perubahan pemikiran Liem Koen Hian dari seorang nasionalis Tiongkok menjadi nasionalis pribumi. *Sin Po* menuduh Liem Koen Hian melakukan kebohongan; dengan menjadi seorang nasionalis Tiongkok palsu atau berpura-pura menjadi nasionalis pribumi. Melalui surat kabar *Soeara Publiek* Liem menolak tuduhan tersebut dengan menyatakan bahwa perubahan pemikiran dari seorang nasionalis Tiongkok menjadi nasionalis pribumi adalah hal yang wajar dan sangat mungkin sebab tidak ada pertentangan diantara kedua paham tersebut.<sup>140</sup> Oleh karena tidak ada pertentangan antara nasionalisme Tiongkok dan nasionalisme pribumi, maka tidak ada yang perlu dipermasalahkan dalam perubahan haluan tersebut. Dalam tulisannya yang lain Liem menambahkan bahwa terjadinya perubahan haluan itu wajar sebab zaman terus berubah, apa yang sesuai di suatu zaman belum tentu sesuai di zaman yang lain.<sup>141</sup> Perubahan pemikiran Liem Koen Hian adalah hasil dari kemampuannya membaca perubahan-perubahan keadaan yang terjadi di sekitarnya. Perkembangan-perkembangan baru yang terjadi di Hindia Belanda telah mengubah keyakinannya mengenai kedudukan orang-orang Tionghoa peranakan di Hindia Belanda.

Liem kemudian menjelaskan alasan mengapa ia melepaskan haluan nasionalisme Tiongkok dalam harian *Sin Tit Po* dimana ia menjadi pemimpin redaksinya. Liem melihat bahwa nasionalisme Tiongkok yang dianut oleh golongan *Sin Po* telah memperlihatkan gejala ultra-nasionalisme yang tidak menghormati bangsa lain, sehingga dapat menjadi sumber permusuhan dengan bangsa pribumi di kemudian hari. Perasaan kebangsaan yang berlebihan akan berakibat kesombongan dan dapat mendorong ambisi imperialisme. Selain itu, nasionalisme Tiongkok tidak ada gunanya bagi Tionghoa peranakan yang nasibnya terikat pada Hindia Belanda. Kepentingan Tionghoa peranakan tidak ada sangkut pautnya dengan negeri Tiongkok. Nasionalisme Tiongkok hanya berguna

---

<sup>140</sup> Liem Koen Hian. "Dari Nationalist Tionghoa djadi Nationalist Indonesier" dalam *Soeara Publiek*, 22 Februari 1928.

<sup>141</sup> Liem Koen Hian. "Haloean Kita V" dalam *Sin Tit Po*, 14 April 1930.

bagi orang-orang Tionghoa di negeri Tiongkok sendiri, seperti yang dituturkannya sebagai berikut:

... boeat bangsa Tionghoa di Tiongkok nasionalisme masih bisa dipake sabagi sendjata boeat oesir moesoeih dari negrinja, boeat Tionghoa peranakan itoe sendjata tida ada goenanja. Moesoeih mana jang peranakan di sini hendak perang dan oesir sama itoe sendjata? Dengan memaen sama nasionalisme, peranakan tjoema bisa pake itoe sendjata boeat boenoeh diri sendiri dale mini waktoe dan di blakang hari, kaloe Tiongkok soeda djadi koeat, boeat berboeat djahat pada bangsa Indonesia seperti kaoem imperialist di Tiongkok sekarang.<sup>142</sup>

Nasionalisme Tiongkok membuat Tionghoa peranakan melupakan kepentingannya yang nyata di Hindia Belanda, dimana Tionghoa peranakan hidup dan bekerja. Tiongkok hanyalah negeri asing bagi Tionghoa peranakan, segala yang terjadi di sana tidak ada sangkut pautnya dengan Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Liem berpendapat bahwa kaum Tionghoa peranakan seharusnya tidak terus menerus menjadi orang asing di Hindia Belanda yang tidak ikut campur tangan sama sekali dengan apa yang terjadi di Hindia Belanda. Kedudukan kaum Tionghoa peranakan dapat diperbaiki hanya melalui keikutsertaan dalam perjuangan mewujudkan cita-cita Hindia Belanda merdeka.

Alasan-alasan itulah yang mendasari perubahan haluan Liem Koen Hian dari seorang nasionalis Tiongkok menjadi seorang nasionalis pribumi. Perkembangan nasionalisme pribumi dan hubungan baiknya dengan kaum nasionalis pribumi membuat Liem akhirnya memilih menjadi seorang nasionalis pribumi. Akan tetapi pada intinya apa yang diperjuangkan Liem Koen Hian tidak berubah. Pemikirannya mencita-citakan kemerdekaan, persamaan derajat, dan emansipasi kemanusiaan bagi Tionghoa peranakan pada khususnya dan bagi setiap bangsa pada umumnya. Ketika nasionalisme Tiongkok yang menurutnya tidak dapat digunakan untuk mencapai cita-cita tersebut, maka ia mengubah haluannya menjadi nasionalisme pribumi. Liem menolak nasionalisme sempit yang menganggap rendah bangsa lain.<sup>143</sup> Pandangan dasar Liem mengenai

---

<sup>142</sup> Liem Koen Hian. "Haloean Kita II" dalam *Sin Tit Po*, 10 April 1930

<sup>143</sup> Liem Koen Hian. "Haloean Kita I" dalam *Sin Tit Po*, 9 April 1930.

persamaan derajat atas dasar kemanusiaan tergambar dalam kata-katanya sebagai berikut: “Kita poenja manoesia berdiri di tanah sama kedoea kakinja seperti djoega si nationalist, aken tetapi sedeng si nationalist lebih oetamakan tjap dari pada orangnja, kita lebih pandeng orangnja dari pada tjapnja.”<sup>144</sup>

Nasionalisme pribumi yang semakin berkembang sejak 1927 juga mulai tumbuh di dalam masyarakat Tionghoa peranakan.<sup>145</sup> Mulai menyebarnya nasionalisme pribumi hingga ke dalam masyarakat Tionghoa peranakan ini mendorong Liem Koen Hian untuk mulai merumuskan haluan baru bagi kaum Tionghoa peranakan. Menurut Liem, orientasi ke negeri Tiongkok, haluan yang disuarakan oleh golongan *Sin Po*, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perkembangan baru yang terjadi.<sup>146</sup>

Pada awal tahun 1928 Liem mulai menyuarakan haluan baru bagi golongan Tionghoa peranakan. Ia mengajak kaum Tionghoa peranakan untuk bergabung dalam kebangsaan pribumi dan ikut serta dalam perjuangan kemerdekaan Indonesia.<sup>147</sup> Haluan baru yang diutarakan oleh Liem ini segera mengundang berbagai reaksi dan perdebatan. Kaum Tionghoa peranakan yang berorientasi ke negeri Tiongkok segera menentang haluan tersebut dengan berargumen bahwa orang-orang Tionghoa peranakan dan pribumi berbeda ras. Liem menyanggah paham kebangsaan yang berdasarkan ras itu. Ia menuliskan sanggahan terhadap paham kebangsaan berdasarkan ras tersebut dengan menjelaskan bahwa:

Indonesia dan Indonesier adalah nama-nama jang mempoenjai artian politiek, jang mengandoeng angen-angen politiek, jaitoe mendirikan negri Hindia jang merdika, jang bernama Indonesia dengen rajatnja jang merdika, bangsa Indonesier.

---

<sup>144</sup> Liem Koen Hian. “Haloean Kita V” dalam *Sin Tit Po*, 14 April 1930.

<sup>145</sup> Liem Koen Hian. “Soeal-Soeal dari Tionghoa Peranakan II” dalam *Soeara Publiek*, 28 Juli 1927.

<sup>146</sup> Liem Koen Hian. “Satoe Program van Actie Boeat Indonesier dan Tionghoa Bersama-sama” dalam *Soeara Publiek*, 10 Januari 1928.

<sup>147</sup> Liem Koen Hian. “Toedjoean Kita” dalam *Soeara Publiek*, 2 Februari 1928.

Dalem itoe artian politiek dari itoe nama, seorang Tionghoa peranakan di sini, kendati terlahir dari iboe-bapa totok tapi kaloe ia trima kerajatan Blanda, tinggal teroes dale mini negri, akoe ini negri seperti tanaeh aernja, jang kasi ia hawa boeat menapas dan pengasilan boeat samboeng djiwanja dan maoe bekerdja sama-sama dengan orang Boemipoetra boeat boeroe angen-angen jang dikandoeng oleh itoe nama Indonesia dan Indonesier – dalem itoe artian politiek seorang Tionghoa peranakan begitoe ada satoe Indonesier, tida perdoeli dalem toeboehnja ada mengalir 100 pCt atawa 10 pCt darah Tionghoa.<sup>148</sup>

Definisi Liem mengenai konsep kebangsaan ini mendasarkan pada persamaan nasib, kepentingan, dan cita-cita. Konsep kebangsaan yang dibangun Liem serupa dengan pemikiran Ernest Renan yang mengungkapkan bahwa bangsa adalah suatu kelompok manusia yang ingin bersatu. Dalam pemikiran Liem, jika seorang Tionghoa peranakan memiliki keinginan untuk bergabung dalam kebangsaan dan bersedia ikut serta mewujudkan negara yang merdeka, maka ia telah menjadi warga kebangsaan.

Pada 1930 Liem semakin memperjelas haluan yang dicetuskannya. Ia yakin bahwa akan datang suatu masa ketika Tionghoa peranakan menyadari bahwa dirinya adalah bagian dari suatu bangsa. Haluan baru yang dicetuskannya itu diberi nama *Indonesierschap*.<sup>149</sup> Menurut Liem adalah suatu hal yang sangat alamiah apabila Tionghoa peranakan merasa terikat pada Indonesia dan menganggap Indonesia sebagai tanah airnya. Ikatan Tionghoa peranakan tidak hanya karena kepentingannya saja ada di Indonesia, melainkan lebih dari itu. Rasa cinta kepada tanah air akan tumbuh secara alamiah sebab Indonesia adalah tempat tinggal Tionghoa peranakan. Persamaan budaya, hubungan kekeluargaan, hubungan pergaulan sehari-hari, dan persamaan kepentingan antara kaum pribumi Indonesia dan Tionghoa peranakan pada akhirnya akan menciptakan perasaan sebagai satu bangsa.<sup>150</sup> Dalam pengertian ini, pemikiran Liem memiliki kesamaan

---

<sup>148</sup> Liem Koen Hian. “Tionghoa Peranakan Djadi Indonesier” dalam *Soeara Publiek*, 20 Februari 1928.

<sup>149</sup> Liem Koen Hian. “Ka Indonesierschap” dalam *Sin Tit Po*, 2 April 1930.

<sup>150</sup> Liem Koen Hian. “Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan II” dalam *Sin Tit Po*, 26 Agustus 1932.

dengan pemikiran Otto Bauer yang menyatakan bahwa bangsa adalah suatu komunitas-karakter yang tumbuh dari suatu komunitas dengan pengalaman yang sama.

Lebih lanjut Liem mengungkapkan bahwa Tionghoa peranakan adalah bagian dari bangsa Indonesia juga oleh karena adanya hubungan secara genealogis. Secara kultural pun Tionghoa peranakan dalam pandangan Liem sangat dekat dengan bangsa Indonesia. Maka menurut Liem, Tionghoa peranakan bukanlah “orang asing” yang tidak perlu turut campur dalam perjuangan rakyat Indonesia seperti yang didengung-dengungkan oleh *Sin Po*. Tionghoa peranakan memiliki “kewajiban suci” untuk ikut memerdekakan Indonesia sebab mereka juga bagian dari bangsa Indonesia.<sup>151</sup>

Liem Koen Hian semakin memperjelas konsep *Indonesierschap*-nya ketika ia menjadi pemimpin redaksi surat kabar *Sin Tit Po*. Ia menjelaskan pengertian *Indonesierschap* dalam “Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan” yang dimuat di koran *Sin Tit Po*, sebagai berikut:

Perkataan Indonesier bisa berarti seorang Indonesier aseli, jaitoe artian etnologisch dan djoega bisa berarti rajat dari negri Indonesia, jaitoe artian staatkundig. Seperti djoega perkataan Nederlander bisa berarti seorang Blanda totok, tetapi bisa djoega berarti seorang Duits totok, seorang Inggris totok atawa seorang Tionghoa totok. Begitoepondengen perkataan Amerikaan, seorang Amerikaan, tida dimaksoedken meloeloe seorang kulit merah, orang Amerikaan aseli, aken tetapi seorang Amerikaan itoe bisa sekali ada seorang peranakan atawa totok Ier, seorang peranakan atawa totok Duits, seorang peranakan atawa totok Italie, jang soeda djadi rajat Amerika. Maka itoe sama sekali tida ada anehnja, djikaloe perkataan Indonesier tida sadja berarti seorang Indonesier aseli, tetapi djoega berarti seorang jang djadi rajat ini negeri. Dengan laen perkataan, perkataan Indonesier tida moesti tjoema berarti seorang Indonesier aseli sadja.<sup>152</sup>

Liem membayangkan bahwa negara Indonesia serupa dengan Amerika Serikat, sebuah negeri yang terdiri dari berbagai golongan ras, budaya, dan agama

---

<sup>151</sup> Liem Koen Hian. “Causerie Pikiran Indonesia dan Pranakan Tionghoa” dalam *Djawa Tengah*, 12 Oktober 1932.

<sup>152</sup> Liem Koen Hian. “Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan II”, *loc. cit.*



tetapi semuanya mengakui dirinya sebagai bagian dari bangsa Amerika. Di Amerika Serikat, kaum pendatang yang bukan penduduk pribumi dapat bergabung dalam kebangsaan Amerika Serikat dengan penduduk pribumi, Liem pun menginginkan hal serupa juga dapat terjadi di Indonesia. Liem menganggap perbedaan antara seorang Tionghoa peranakan dengan seorang Jawa sama halnya dengan perbedaan antara seorang Sunda dengan seorang Sumatra.<sup>153</sup> Konsep kebangsaan Amerika Serikat diambil Liem sebagai contoh karena ia melihat adanya persamaan antara bangsa Amerika Serikat dan bangsa Indonesia. Indonesia, juga terdiri dari berbagai suku bangsa, agama, dan budaya seperti halnya Amerika Serikat. Definisi *Indonesierschap* yang dikemukakan Liem ini memperlihatkan bahwa menurut Liem, bangsa Indonesia adalah bangsa yang terbentuk atas dasar persamaan nasib, penindasan yang dialami bersama, dan perjuangan bersama untuk kemerdekaan.

Pengertian demikian merupakan landasan untuk menetapkan kedudukan kaum Tionghoa peranakan di dalam negara Indonesia yang dalam keyakinan Liem akan segera terbentuk. Bentuk negara Indonesia yang dicita-citakan Liem adalah sebuah negara demokratis dan multikultural seperti Amerika Serikat, dimana Tionghoa peranakan dan golongan-golongan lainnya dalam kebangsaan Indonesia akan mendapatkan kedudukan yang sama. Namun konsep *Indonesierschap* Liem Koen Hian ini tidak mudah diterima pada zamannya. Pemerintah kolonial melakukan pemisahan antar ras dimana golongan Tionghoa (*Vreemde Osterlingen* bersama orang-orang Arab dan India) berada diantara golongan Eropa dan Pribumi dalam stratifikasi sosial di Hindia Belanda. Orang-orang Tionghoa menerima perlakuan dan kedudukan yang berbeda dengan orang-orang pribumi.

Konsep ini diterima dengan kecurigaan oleh mayoritas tokoh pergerakan nasional pada waktu itu. Orang-orang Tionghoa peranakan pun banyak yang menolak karena beranggapan bahwa menjadi satu bangsa dengan Pribumi berarti penurunan derajat dalam stratifikasi sosial. Maka untuk mewujudkan konsep

---

<sup>153</sup> Liem Koen Hian. "Apa Baba bisa Menjadi Indonesier" dalam *Mata Hari*, 8 September 1934.

*Indonesierschap*-nya, Liem mengusulkan penghapusan peraturan hukum yang membedakan kedudukan setiap golongan berdasarkan ras sebab perbedaan status dalam masyarakat itu merupakan penghalang bagi penyetuan Tionghoa peranakan ke dalam bangsa Indonesia.<sup>154</sup>

*Indonesierschap* yang digagas Liem ini juga mengundang sebuah pertanyaan besar mengenai apakah orang-orang Tionghoa peranakan harus melebur atau melakukan asimilasi total ke dalam golongan Pribumi. Namun Liem mengesampingkan permasalahan ini dan menekankan bahwa pertama-tama yang terpenting adalah terlebih dahulu menyebarkan kesadaran kepada masyarakat Tionghoa peranakan bahwa tanah air mereka adalah Indonesia. Menurut pemikiran Liem, peleburan antara golongan Tionghoa peranakan dan Pribumi cepat atau lambat akan terjadi secara alamiah tanpa perlu dipermasalahkan dan dicampuri setelah Indonesia merdeka, persamaan kedudukan di negara Indonesia akan mendorong persatuan yang lebih erat antara kaum Pribumi dan Tionghoa peranakan.<sup>155</sup> Ia menolak anggapan bahwa Tionghoa peranakan harus mengganti nama, agama, kawin campur, dan sebagainya untuk menjadi bagian dari bangsa Indonesia. Mengenai hal ini, Liem menulis sebagai berikut:

Demikianlah sedeng nama kita tetep nama Tionghoa dan tida perloe digantie sama nama Indonesier, *ons volen en denken*, kita poenja perasaan dan pikiran, kita berasa dan berpikir seperti seorang Indonesier. Seperti djoega seorang Blanda-Amerikaan atawa seorang Duits-Amerikaan atawa seorang Ier- Amerikaan tida perloe robah ia poenja nama toeroenan, tapi toch bisa sekali berasa dan berpikir seperti seorang Amerikaan, begitoe poen kita orang tida perloe robah kita poenja nama Tionghoa itoe.<sup>156</sup>

Tampak ada kecenderungan dari Liem untuk menganjurkan Tionghoa peranakan agar tetap mempertahankan identitas sebagai Tionghoa peranakan tetapi ia juga tidak menolak asimilasi atau peleburan ke dalam golongan Pribumi

---

<sup>154</sup> Liem Koen Hian. "Ka Indonesierschap", *loc. cit.*

<sup>155</sup> Liem Koen Hian. "Tiga Aliran Politiek dalem Doenia Tionghoa Peranakan II", *loc. cit.*

<sup>156</sup> Liem Koen Hian. "Haloean Kita V", *loc. cit.*

asalkan asimilasi itu terjadi tanpa paksaan. Ketika koran *Sin Po* menakut-nakuti orang-orang Tionghoa peranakan dengan mengatakan bahwa haluan *Indonesierschap* mengharuskan orang-orang Tionghoa masuk Islam, Liem menjawab:

Sekarang di mana-mana negeri pemerintah tinggal neutral dalem oeroesan igama, mengertinja tida toeroet menjataken lebih soeka sama igama jang ini dari pada jang laen. Tapi lebih penting dari sekalian pertimbangan laen adalah halnja di Tiongkok sendiri, antara bangsa Tionghoa sendiri, ada millioenan orang jang peloek igama Islam. Orang-orang Islam telah mendjabat pangkat-pangkat tinggi di Tiongkok.<sup>157</sup>

Walaupun cenderung menganjurkan untuk mempertahankan identitas sebagai Tionghoa peranakan, Liem sama sekali tidak mempermasalahkan jika Tionghoa peranakan pindah agama memeluk agama Islam atau berasimilasi ke dalam masyarakat Pribumi. Namun ia tidak ingin negara atau pihak-pihak lain memaksakan peleburan tersebut. Liem menginginkan proses percampuran terjadi dengan sendirinya dalam negara Indonesia yang demokratis dan multikultural.

### **3.4 Dampak Pers Tionghoa Peranakan Bagi Gerakan Nasionalisme Pribumi**

Pengalaman hidup sebagai kelompok yang dipisahkan oleh sekat-sekat rasialis yang dijalankan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda berdampak pada sikap saling mencurigai di antara penduduk pribumi dan etnis Tionghoa peranakan. Sentimen anti Tionghoa, yang pertama kali menemukan ekspresinya dalam pers pada era 1870-an, terus menggema dalam sejumlah koran yang lebih populer di Batavia, Semarang, dan Surabaya sampai menjelang akhir abad ke-19. Namun, sebenarnya kebencian golongan etnis Tionghoa terhadap sikap kalangan pribumi tersebut tidak sebesar kekecewaan mereka atas perlakuan pemerintah Kolonial Hindia Belanda terhadap komunitas Tionghoa peranakan di Hindia Belanda pada umumnya. Khususnya, mereka tidak senang pada peraturan *wijkenstelsel* (sistem pemukiman) yang membatasi domisili mereka pada apa yang disebut *Pecinan*.<sup>158</sup>

---

<sup>157</sup> Liem Koen Hian. "Menjesatken Pambatja" dalam *Sin Tit Po*, 7 April 1930.

<sup>158</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm. 85.

Mereka juga mengeluh karena tidak bisa masuk ke kampung-kampung pribumi di Jawa dan karenanya ruang gerak mereka terhalang oleh sistem surat pas (*passenstelsel*), yang diperkenalkan pemerintah Kolonial Belanda sejak 21 April 1863.<sup>159</sup>

Pemberlakuan pajak dan penyelesaian perkara kriminal pun dipandang sebagai kebijakan yang tidak adil buat orang-orang Tionghoa. Kecemburuan terhadap warga pribumi mengemuka dalam peradilan. Mereka tidak senang karena orang pribumi duduk di dewan yang memutuskan masalah hak waris di antara orang-orang Tionghoa, dan menuntut orang Tionghoa juga bisa duduk di dewan itu. Keluhan-keluhan di atas diilustrasikan melalui sepucuk surat panjang seorang Tionghoa dari Kupang dalam *Hindia-Nederland* edisi 8 dan 12 Januari 1881, dan kemudian dikutip oleh surat kabar *Bintang Timoer* pada 22 Januari 1881, yang menunjukkan “ketidakhahagiaan” orang Tionghoa atas kebijakan pemerintah Kolonial Belanda terhadap komunitas mereka pada umumnya. Kutipannya adalah sebagai berikut:

Kita orang, bangsa Tjina, jang berdoedoek di antero tana India-Nederland di seboet orang menoeumpang, sebabnja negri Tjina belon talok di bawah prentah Gouvenement Olanda. Tegal itoe kita orang tiada bole berboeat barang perkara dengan kesoesian salakoe anak-anak tanah sendiri, soeaktoe kepala Tjina di India Nederland haroes ia bermoehoen pada Gouvernment kaloe-kaloe ia boleh tinggal di sana pada mentjari kehidoepannja.<sup>160</sup>

Keluhan-keluhan yang terlontar di permukaan itu berkaitan dengan masalah-masalah pengaturan penduduk Tionghoa. Hal ini membekas di kehidupan etnis Tionghoa sampai periode awal abad ke-20. Ini juga berarti bahwa sejak periode awal penerbitan pers Tionghoa, yang dimulai dengan dwi-mingguan *Matahari* sampai dengan periode kebangkitan, ditandai dengan bangkitnya gerakan Pan-Tionghoa. Ditambah lagi dengan kampanye dan keluhan yang dirasakan oleh orang-orang Tionghoa sepanjang tiga dasawarsa terakhir abad ke-19, maka tak heran bila sejak 1900 menjadi penanda penting bagi kesadaran

---

<sup>159</sup> Adam, *op. cit*, hlm. 103.

<sup>160</sup> Dalam Adam, *ibid*, hlm. 104-106

identitas Tionghoa peranakan di Hindia Belanda. Kesadaran akan status mereka sebagai kelompok minoritas dalam masyarakat Kolonial Hindia Belanda diekspresikan dengan sungguh-sungguh sepanjang tahun-tahun awal abad ke-20 dalam pers Tionghoa *peranakan*, yang menyatakan diri sebagai suara atau *organ* gerakan Pan-Tionghoa, yakni THHK (*Tiong Hoa Hwee Koan*). Dalam hal ini, kekuatan *Sin Po* yang didukung oleh perkumpulan Tionghoa *peranakan* di seluruh Hindia Belanda memberikan pengaruh yang luas kepada rakyat pribumi. Sebagaimana digambarkan dalam salah satu artikel di bawah ini, yang menyatakan sebagai berikut:

Pengaroehnja ini bagian dari pers soedah sering diakoei oleh banjak pihak dan baroe ini dalem weekblad *Sin Po* (30 November 1935), baroe oentoeok pertama kali sastrawan Boemipoetra, jakni toean Armyn Pane, oendjoek bagaimana penting ada'nja bahasa Tionghoa-Melajoe yang digoenakan oleh pers terseboet dan bagaimana oempama verslag voetbal dalem pers Tionghoa-Melajoe enak dibatja sebab idoeop bahasa'nja.<sup>161</sup>

Meskipun surat kabar *Sin Po* berhaluan nasionalisme Tiongkok dan menyuarakan pandangan orang-orang Tionghoa, bukan berarti surat kabar ini mengabaikan perjuangan nasional orang-orang Indonesia. Apalagi kelompok Tionghoa yang mengelola surat kabar *Sin Po* ini juga menolak kewarganegaraan Belanda. Dengan demikian, mereka tetap menjalin hubungan dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional di Indonesia. Dalam beberapa periode, *Sin Po* banyak memakai wartawan pribumi dan banyak pula memuat berita tentang kelompok pergerakan nasionalis pribumi. Melalui *Sin Po* juga lagu “Indonesia Raya” gubahan W.R. Supratman – yang menjadi lagu kebangsaan Indonesia – untuk pertama kalinya dipublikasikan.<sup>162</sup>

Rasa tidak suka etnis Tionghoa peranakan kepada langkah penolakan kaum pergerakan nasionalis pribumi ini pun akhirnya berubah menjadi rasa simpati dan keinginan untuk membantu perjuangan kaum pribumi. Adalah surat

---

<sup>161</sup> Dalam Kenangan Tjamboek Berdoeri, “Pengaruhnya Pers Tionghoa” dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/199>, 2007, (diakses di Jember: 14 Agustus 2014).

<sup>162</sup> Dalam Adam, *op. cit.*, hlm. 93.

kabar *Sin Tit Po*, sebagai wakil pers Tionghoa *peranakan*, yang bersedia menerima penuh ideologi nasionalisme Indonesia. Pengelola surat kabar ini, yang menjadi corong setengah resmi dari PTI (Partai Tionghoa Indonesia), menganggap bahwa Indonesia sebagai tanah airnya dan bersedia berjuang untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Mereka juga merasa bahwa nasibnya telah terikat dengan nasib orang Indonesia pribumi. Maka, tak aneh jika *Sin Tit Po* ikut menyebarkan ide-ide nasionalisme Indonesia.<sup>163</sup>

*Sin Tit Po* semula bernama *Sin Jit Po* dan merupakan surat kabar pengganti dari surat kabar *Sin Po* edisi Jawa Timur yang mengalami kegagalan dan diambil-alih oleh tuan Lim Bok Sioe dan ditukar namanya menjadi *Sin Jit Po* dan akhirnya menjadi besar dengan nama *Sin Tit Po*. Surat kabar ini menjadi koran ternama di Jawa Timur pada zaman pergerakan nasional. Adalah menarik untuk mengutip perkembangan surat kabar ini pada zaman pergerakan nasional di Hindia Belanda, sebagai berikut:

[...] oleh kerna masjarakat Tionghoa di Djawa Wetan merasa perloe mempoenjai soerat kabar harian jang sedikit-dikitnya mirip *Sin Po* di Djakarta, maka sebagian pemimpin Tionghoa di sana (Djawa Timoer) mengandjoerkan pada pemimpin *Sin Po* di Djakarta agar di Soerabaia, *Sin Po* mengadakan edisi Djawa Timoer. Hal ini diloloeskan, maka pada bulan Djoeli dari taon 1922, “*Sin Po* mempoenjai edisi Djawa Timoer dengan berkedoedoean di Soerabaia. [...] oleh toean Lim Bok Sioe ditoeker namanja menjadi *Sin Jit Po*, dan berkat djasanya toean Lim Koen Hian diperkokoh mendjadi *Sin Tit Po*, dan hingga dewasa mendjadi koran ternama di Djawa Timoer.”<sup>164</sup>

Ide kesadaran identitas kaum Tionghoa *peranakan* yang muncul sebagai antitesa terhadap politik *apharteid* Kolonial Hindia Belanda menjadi alat pemersatu kaum Tionghoa *peranakan* dan berkembang dengan pesat bersamaan dengan keberadaan pers yang menjadi pendukung laju pergerakan nasional di Hindia Belanda. Kehidupan pers Tionghoa *peranakan* terus berkembang

---

<sup>163</sup> Suryadinata, *Politik Tionghoa... op. cit.*, hlm., 97.

<sup>164</sup> Kenangan Tjamboek Berdoeri, “Riwayat *Sin Po* dan Perkembangannya” dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/199> 2008, (diakses di Jember: 14 Agustus 2014).

menyuarakan identitas mereka meskipun keberadaannya terus-menerus diancam kebijakan pembredalan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Aspek yang paling mudah dipertimbangkan dalam melihat dampak pers Tionghoa peranakan dengan gerakan nasionalisme kaum pribumi adalah aspek politik. Pers Tionghoa peranakan dipergunakan oleh tokoh pergerakan untuk menyebarkan ide-ide perjuangan pergerakannya. Hal itu dilakukan dengan pertimbangan keamanan dan efektivitas pers Tionghoa peranakan. Pers Tionghoa peranakan dianggap relatif aman karena posisinya yang netral, sedangkan pers pribumi lebih mudah terdeteksi dan akhirnya dibredel dan pemimpin atau penyumbang pemikirannya ditangkap dan diasingkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda.

Pandangan politis yang ditampilkan dalam pers Tionghoa peranakan umumnya menunjukkan pandangan para pemilik, staf redaksi dan pembaca langganan yang mendukung pers tersebut. Secara garis besar spektrum politis pers Tionghoa peranakan terbagi atas tiga kelompok besar. Kelompok pertama Pers Tionghoa peranakan tampil sebagai wakil pers yang menerima penuh ideologi nasionalisme kaum pribumi. Kelompok ini tidak diragukan lagi peranannya dalam menyebarkan ide nasionalisme Indonesia, terutama dalam masyarakat Tionghoa peranakan. Kelompok pertama ini diwakili oleh *Sin Tit Po*, yang menjadi corong setengah resmi dari PTI (Partai Tionghoa Indonesia). Kelompok kedua dan ketiga, memilih netral dan tetap pada pendiriannya. Kelompok kedua memilih nasionalisme Tiongkok daratan sebagai orientasi politik. Sementara kelompok ketiga bersikap konservatif mempertahankan identitas etniknya dan memilih berorientasi politik dengan lebih mendukung pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kelompok kedua diwakili oleh surat kabar *Sin Po* yang menganut aliran nasionalisme Tionghoa. Kelompok ketiga diwakili oleh kabar *Siang Po* dan *Pelita*. Meskipun *Sin Po* yang mewakili kelompok kedua berhaluan nasionalisme Tionghoa tidak berarti mereka mengabaikan perjuangan nasional kaum pribumi. *Sin Po* senantiasa menjalin hubungan yang baik dengan tokoh-tokoh pergerakan nasional kaum pribumi.

Nasionalis kaum pribumi dan nasionalis kaum Tionghoa peranakan pada masa itu belum memikirkan adanya peluang pertentangan kedua nasionalisme

tersebut setelah Indonesia merdeka. Hal yang dipikirkan hanyalah bahwa mereka memiliki musuh yang sama, yaitu pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Soekarno mengatakan pada Tjoe Bou San bahwa ia lebih menghargai orang Tionghoa yang menyokong pergerakan nasionalis kaum pribumi tanpa menghiraukan bahaya, dibandingkan dengan mereka yang mau menjadi orang pribumi, akan tetapi semata-mata karena ingin mendapat keuntungan. Kedekatan Soekarno dengan beberapa surat kabar Tionghoa peranakan mendapat sorotan dari beberapa surat kabar Tionghoa peranakan. Harian *Soeara Publiek* tahun 1928, misalnya, memberikan seruan penting tentang diri Soekarno sebagai berikut:

Toean Ir. Soekarno c.s. oendjoek boekan sadja mendjadi poetra Indonesia sedjati, tapi djoega mendjadi pemimpin dalem artian toelen dari pergerakan jang moelia dan bisa dimengerti. Jang orang Olanda oemoemnja tida bisa setoedjoe dengan itoe pergerakan, ini barang tentoe, sebab siapa djoega nanti tida ingin keilangan djajahannja. Tapi bisa dipertjaja jang dalem hati'nja sesoeatoe orang Olanda jang djoedjoer pasti tida bisa tida moesti poedji tindakannja toean Ir. Soekarno.<sup>165</sup>

Hubungan antara pers Tionghoa peranakan dengan nasionalisme kaum pribumi dapat dilihat melalui fungsi utama pers, yaitu sebagai media komunikasi massa. Pers Tionghoa peranakan memberikan informasi yang jernih dan opini-opini dari tokoh terkemuka, sehingga pemikirannya dapat tersebar secara luas dan dapat menjadi pegangan masyarakat dalam mengidentifikasi masalah sosial yang ada. Pers dalam hal ini menjadi barometer perasaan kolektif dan menjadi wakil dari opini publik. Apa yang dirasakan kaum Tionghoa peranakan yang tercermin melalui surat kabar dan terbitan lainnya secara tidak langsung mempengaruhi kesadaran kaum pribumi akan identitas bangsanya. Semua hal yang yang dikatakan dan diperjuangkan oleh tokoh-tokoh Tionghoa peranakan terkemuka seperti Tjou Bou San, Kwee Hing Tjiat, Kwee Tek Hoay, Liem Koen Hian, Kwee Kek Beng memberikan manfaat secara tidak langsung bagi kaum pribumi dalam

---

<sup>165</sup> Kenangan Journalist Tjamboek Berdoeri, "Berachirnja ... di Depan Bangkenja Swara Publiek" dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/179>, 2006a (diakses di Jember: 15 Desember 2014).



memupuk kesadaran dan mendorong penemuan identitas dan martabat masyarakat Indonesia sebagai sebuah bangsa.

Tulisan-tulisan dalam pers Tionghoa peranakan yang mendapat pengaruh dari gerakan nasioanalisme Tionghoa juga memiliki imbas terhadap bagian-bagian dari reaksi bangsa Indonesia terhadap pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Pada masa pergerakan nasional, pers pribumi sering mengalami kesulitan yang disebabkan oleh pemerintah Kolonial Hindia Belanda. Kehidupan pers terus menerus diancam kebijakan pembredelan dan delik pers. Seperti yang pernah dialami surat kabar pribumi Doenia Bergerak, tiga buah artikel dalam DB yang bertemakan ketidakbenaran orde kolonial terkena *persdelict* (delik pers), dan pemimpinnya Mas Marco Kartodikromo harus menjalani hukuman penjara di kota Semarang selama 8 bulan. Dalam keadaan politik yang mengancam, keberadaan surat kabar Tionghoa peranakan yang relatif aman menjadi salah satu sumber dan media penting dalam mengetahui dan mendorong laju pergerakan nasional.

Beberapa pers pribumi baik itu surat kabar maupun majalah pada awal perkembangannya menggunakan berbagai fasilitas yang dimiliki orang-orang Tionghoa peranakan dalam perusahaan penerbitannya, seperti percetakan, permodalan, dan tenaga ahli editorial. Majalah Darmo Kondo milik Budi Utomo yang terbit di Surakarta pada awalnya dimiliki dan dicetak oleh Tan Tjoe Kwan, sedangkan redaksinya dipimpin oleh Tjhie Siang Ling yang mahir dalam kasustraan Jawa. Beberapa surat kabar lain yang juga bekerja sama dengan modal Tionghoa peranakan antara lain surat kabar Kebangoenan yang diterbitkan di Jakarta dicetak dipercetakan Siang Po dan memuat artikel-artikel bersamaan dengan Siang Po sekurang-kurangnya pada periode awal. Bentuk kerja sama lainnya adalah dipekerjakannya wartawan-wartawan pribumi di beberapa surat kabar Tionghoa peranakan. Orang-orang seperti Saeroen, W.R Soepratman, D. Koesoemaningrat, Bintarti, Sudarjo Tjokrosisworo, dan J.D Syaranamual merupakan wartawan-wartawan pribumi yang bekerja di berbagai surat kabar milik Tionghoa peranakan. Di samping memperoleh imbalan ekonomis dari pekerjaannya, mereka juga mempelajari teknik pengelolaan surat kabar Tionghoa peranakan yang kemudian mereka terapkan pada pers pribumi.

Kemampuan finansial yang tinggi pemilik pers Tionghoa peranakan yang mampu membayar koresponden dan staf ahli yang tinggal di luar negeri menjadikan berita-berita luar negeri baik menyangkut informasi mancanegara maupun tentang Hindia Belanda menjadi sumber utama bagi surat kabar pribumi untuk mengutip kembali informasi tersebut bagi berita yang hendak diturunkan. Kerja sama seperti itu merupakan hal yang luar biasa pada masa itu mengingat biaya penggunaan jasa telekomunikasi sangat tinggi sehingga hanya surat kabar tertentu yang mampu menggunakan jasa informasi tersebut.

Akan tetapi sejak tentara pendudukan Jepang menguasai tanah Hindia Belanda, dunia pers dikendalikan berdasarkan Undang-Undang Penguasa, atau *Osamu Seirei*, No.16 tentang pengawasan badan-badan pengumuman dan pemilikan pengumuman serta penerangan. Pada pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan sebagai berikut:

Terlarang menerbitkan barang tjetakan yang berhoebong dengan pengemoeman ataoe penerangan, baik beroepa penerbitan setiap hari, setiap minggoe, setiap boelan, maoepoen penerbitan dengan tidak tertentoe waktoenja, kecoeali oleh badan-badan jang soedah mendapat izin.<sup>166</sup>

Berdasarkan ketentuan penguasa Jepang tersebut, semua surat kabar Belanda dan Tionghoa peranakan dilarang terbit. Panglima militer Jepang kemudian menerbitkan nama-nama sejumlah surat kabar pribumi sesuai keinginannya. Sensor dilakukan atas segala cetakan, bahkan berita-berita dan karangan-karangan juga disaring dahulu oleh petugas sensor. Akhirnya, usai sudah sebagian besar surat-surat kabar Tionghoa peranakan di Hindia Belanda, kecuali yang dapat bertahan dengan diam-diam dan itupun selalu mendapat pengawasan yang ketat dari pemerintah pendudukan Jepang. Umumnya, koran-koran besar seperti *Thian Sung*, *Sin Po*, *Sin Jit Pao*, *Siang Po*, *Keng Po*, dan *Kong Ha Po* mengalami nasib yang sama, yakni penerbitannya diberhentikan dan para pemimpin Redaksinya ada yang ditangkap oleh pihak militer Jepang kalau mereka

---

<sup>166</sup> Tribuana Said, *Sejarah Pers Nasional dan Pembangunan Pers Pancasila*. (Jakarta: Haji Masagung, 1988), hlm. 48.

tidak mau mengakui propaganda Jepang. Sebagaimana digambarkan oleh *Tjamboek Berdoeri* tentang suasana pada masa itu, sebagai berikut:

[...] waktoe berdjalan teroes hingga tibalah saat'nja Djepang doedoeki ini kepoelaoean, seperti djoega soerat2 kabar Tionghoa-Melajoe laennja, seperti *Thian Sung, Jit Pao, Tja Pao, Siang Po, Keng Po, Kong Hwa Po* [...] *Sin Po* djoega di-beslag Djepang. Seantero redactie'nja soerat-kabar itoe diinternir, tjoema boleh di-bilang sanget beroentoeng toean Kwee Kek Beng jang ditjari Djepang tida ketangkep.<sup>167</sup>

Dengan berakhirnya aktivitas pers Tionghoa peranakan akibat kekuasaan Tentara Pendudukan Jepang di Hindia Belanda mendorong pers pribumi berkembang menjadi pers yang berdiri sendiri. Kekuasaan Tentara Pendudukan Jepang juga menjadi tanda bagi titik balik dalam sejarah pers Tionghoa di Hindia Belanda, di mana pers Tionghoa peranakan digantikan kedudukan dan peranannya oleh pers pemerintah pendudukan Jepang dan pers pribumi.

---

<sup>167</sup> Kenangan Tjamboek Berdoeri, "Riwajat *Sin Po*: Achir dan Maksoed Toelisan" dalam <http://tjamboek28.multiply.com/journal/item/199>, 2009, (diakses di Jember: 14 Agustus 2014).